

LAPORAN TAHUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN 2025



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
FISHERY AND MARINE SERVICES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE**

JALAN BAJIMINASA NO. 12, TELP 0411-873680, FAX 0411-858779
MAKASSAR Website : www.dkpsulsel.id

2026

LAPORAN TAHUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN 2025



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
FISHERY AND MARINE SERVICES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

JALAN BAJIMINASA NO. 12, TELP 0411-873680, FAX 0411-858779
MAKASSAR Website : www.dkpsulsel.id

2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat tersusun. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan gambaran dan informasi sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025.

Secara umum program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di tahun 2026 dan masa mendatang.

Disadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik dan terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terbitnya Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diucapkan terima kasih.

Makassar,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Dr. M. ILYAS, ST, M.Sc

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700606 199603 1 006

RINGKASAN

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota Makassar terletak antara $0^{\circ}12'$ - 8° LS dan diantara $116^{\circ}48'$ - $112^{\circ} 36'$ BT dengan luas wilayah sekitar 45.764,53 Km², panjang garis pantai 1.937 Km yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, 304 kecamatan.

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan tahun 2025 tercatat sebanyak 9.563.127 jiwa. Diantara jumlah penduduk tersebut terdapat tenaga kerja yang mengelola sumberdaya Kelautan dan Perikanan (nelayan, pembudidaya) sebanyak 468.420 orang atau 4,9 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 281.262 orang (2,9 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 187.158 orang (1,9 %).

Untuk mengorganisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik non teknis maupun teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan staf yang cukup dan memiliki integritas yang handal. Pada tahun 2025 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki staf pegawai negeri sipil sebanyak 170 orang.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengacu pada Visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat.

Pelaksanaan masing-masing sub program dibiayai melalui APBD sebesar Rp. 86,862,381,251,-. Hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama tahun 2025 tercatat total produksi sebesar 5,227,864.7 ton, sedangkan pada tahun 2024 produksi perikanan sebesar 4,825,587.5 ton dimana mengalami kenaikan sebesar 402,276.7 ton atau 8,3 %. Pada tahun 2025 total volume ekspor sebesar 202,712 ton naik 0,3 % dari tahun 2024 dan nilai sebesar US\$ 515,2 Juta US\$ naik 38,3 % dari tahun 2024.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas usaha, maka tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan pada berbagai usaha sebagai berikut: Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat antara Rp. 16,242,553 sampai Rp. 53,419,327. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah Budidaya Dilaut (Rumput Laut) Rp. 53,419,327, Budidaya Tambak Rp. 46,865,203, Budidaya Kolam Rp. 31,378,105, Budidaya KJA Laut Rp. 22,748,593, Budidaya sawah Rp. 20,362,454 dan Budidaya KJA tawar Rp. 16,242,553 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 45,220,574 dan nelayan perairan umum Rp. 54,858,120.

Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 73,6 kg/kapita/tahun (naik 1,4 %).

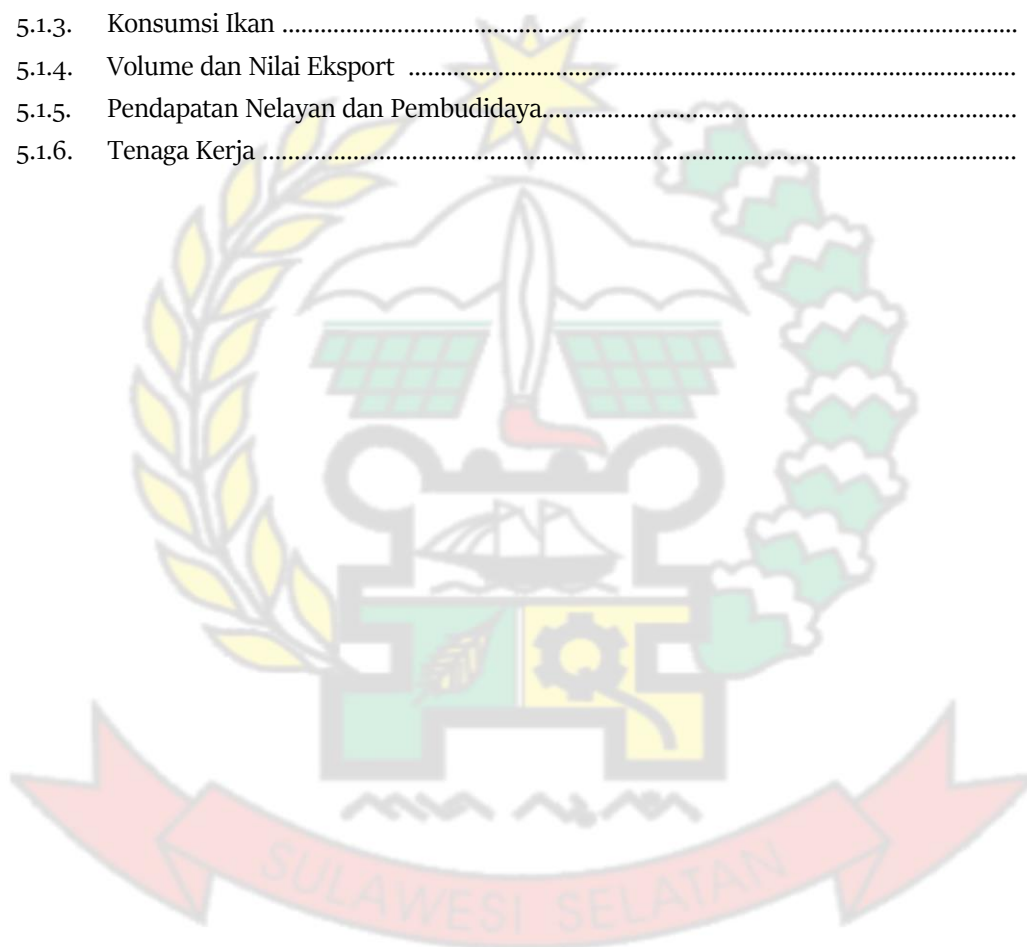
Sekaitan dengan pelayanan baik dalam memanfaatkan asset pemerintah maupun bentuk jasa yang dilakukan, maka dengan mengacu pada perda-perda yang ada, besarnya pendapatan asli daerah sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat Rp. 2,716,520,956 (135.83 %) dari target Rp. 2,000,000,000.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
RINGKASAN	<i>ii</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>vi</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>viii</i>
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN.....	3
2.1. Keadaan Geografis	3
2.2. Demografi	3
2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan	3
a. Perikanan Tangkap	3
b. Perikanan Budidaya	4
c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan.....	4
d. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.....	4
e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.....	6
f. Unit Pelaksana Teknis pelabuhan Perikanan Wilayah I.....	10
g. Unit Pelaksana Teknis pelabuhan Perikanan Wilayah II.....	17
III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	29
3.1. Struktur Organisasi.....	29
3.2. Kepegawaian.....	32
3.3. Keuangan.....	34
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	34
IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN	36
4.1. Kebijakan dan Program Strategis	36
a. Kebijakan	36
b. Program Strategis	38
4.2. Sumber Pembiayaan	44
4.2.1. Dana Daerah	44
a. Belanja Daerah.....	44
4.3. Kegiatan Pembangunan	44
4.3.1. Perikanan Budidayadan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....	44
4.3.2. Perikanan Tangkap.....	49
4.3.3. Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	58
4.3.4. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.....	67
4.3.5. CDK Bosowasi.....	82
4.3.6. CDK Mamminasata.....	92
4.3.7. CDK Ajatappareng.....	159

4.3.8.	CDK Wilayah Selatan.....	108
4.3.9.	CDK Selayar.....	114
4.3.10.	CDK Pangkep dan Kepulauan.....	115
4.3.11.	CDK Luwu Raya.....	121
V.	HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN	126
5.1.	Ekonomi	126
5.1.1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.....	126
5.1.2.	Produksi Perikanan.....	126
a.	Budidaya	126
b.	Penangkapan.....	129
5.1.3.	Konsumsi Ikan	129
5.1.4.	Volume dan Nilai Eksport	129
5.1.5.	Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya.....	129
5.1.6.	Tenaga Kerja	130



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan oleh UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	7
2. Daftar Jumlah Sertifikat Uji Dan Jumlah Hasil Uji Per Bulan, Tahun 2025.....	8
3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.....	29
4. Susunan Organisasi UPT dan CDK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.....	30
5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan 2025.....	32
6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2025.....	32
7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2025.....	33
8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2025.....	33
9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	34
10. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2024 – 2025.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Wilayah Peta Penangkapan Udang, Tuna, dan Rumput Laut.....	132
2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	133
3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2025.....	134
4. Data Produksi Perbenihan Udang Windu pada UPT Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut Tahun 2025.....	135
5. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	136
6. Jumlah Produksi Benih di Instalasi BBI Lajoa Kab. Soppeng Tahun 2025.....	145
7. Data Pokmaswas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	146
8. Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.....	158
9. Data Penanaman Mangrove dan Transplantasi Karang Tahun 2025.....	165
10. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Wilayah Selatan selama Tahun 2025.....	166
11. Data kasus <i>illegal fishing</i> atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Bosowasi selama Tahun 2025.....	167
12. Data Tindak Pidana Perikanan yang Ditemukan di Wilayah CDK Pangkep Tahun 2025.....	168
13. Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan CDK Ajatappareng Tahun 2025.....	169
14. Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan CDK Luwu Raya Tahun 2025.....	170
15. Data Produksi Pemanfaatan Kegiatan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut Tahun 2025.....	175
16. Daftar Unit Pengolahan Ikan/Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.....	178

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah pula memberikan kewenangan otonomi bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai kebutuhan serta sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi telah membenahi diri untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepan tetap diarahkan pada visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER”** sedangkan dari 4 (Empat) Misi Provinsi Sulawesi selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan menjalankan 1 misi yaitu **“ Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan.** Hal ini untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu ***Pro-Poor*** (Pengentasan kemiskinan), ***Pro-Job*** (Penyerapan Tenaga Kerja), ***Pro-Growth*** (Pertumbuhan) dan ***Pro-Sustainability*** (Keberlanjutan), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi dibidang kelautan dan perikanan (***Pro-Business***).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan melalui pendekatan sektor kegiatan yang meliputi **(1) Perikanan Budidaya dan Daya Saing hasil Produk Perikanan, (2) Perikanan Tangkap (3) Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4) Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.**

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan

(Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu optimalisasi dan pengembangan kegiatan produksi, peningkatan daya saing melalui penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan, dan pengembangan mekanisme dan jaringan pemasaran. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.



II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

2.1. Keadaan Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota di Makassar terletak antara $0^{\circ} 12' - 8'$ Lintang Selatan dan di antara $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sulawesi Barat
Sebelah Timur	: Teluk Bone dan Prov. Sulawesi Tenggara
Sebelah Selatan	: Laut Flores
Sebelah Barat	: Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.083,94 Km², secara administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan 3 kota yang terdiri dari 304 kecamatan. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.365,51 Km² atau luas kabupaten tersebut merupakan 15,98 % dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 sungai. Aliran sungai terbanyak terdapat di kabupaten Luwu, yaitu 25 aliran sungai. Sungai Saddang adalah sungai terpanjang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 Km.

Di Sulawesi Selatan terdapat 5 (lima) danau yakni Danau Tempe, Sidenreng dan Lapompak yang masing-masing berada di Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng serta Danau Matano dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur.

2.2. Demografi

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2025 tercatat sebanyak 9.563.127 jiwa, dimana dari total jumlah penduduk Sulawesi selatan tersebut sekitar 468.420 jiwa yang terdiri dari 187.158 jiwa adalah nelayan, 281.262 jiwa adalah pembudidaya ikan.

2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah prasarana perikanan tangkap yang berfungsi untuk menunjang kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Pada prasarana tersebut terdapat sarana penunjang yakni tempat pemasaran ikan, tempat kapal bersandar, perkantoran, gedung pertemuan dan tempat perbengkelan.

Sampai tahun 2025 terdapat 19 unit PPI yang terdapat di 16 Kabupaten/kota yang sudah diserahkan pengelolaannya ke Provinsi Sulawesi Selatan yang kondisinya rata-rata baik, namun terdapat 2 (dua) PPI yang tidak operasional yaitu PPI Polejiwa Kab Barru dan PPI Tanru Sampe Kabupaten Jenepono (Musiman). Produksi PPI Tahun 2025 sebesar 10,115.6 ton dengan nilai Rp. 263,845,161,300.

b. Perikanan Budidaya

Prasarana utama pada kegiatan budidaya adalah saluran irigasi baik untuk irigasi tambak maupun irigasi kolam/Mina Padi (sawah). Selama ini untuk membuat saluran irigasi dinas Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dengan dinas Pengairan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan

Di Sulawesi Selatan ada dua jenis sarana pengolahan/pengawetan hasil perikanan yakni bersifat modern dan tradisional (konvensional), kedua jenis usaha tersebut memiliki segmen pasar yang hampir sama. Untuk pengolahan modern hampir sebagian besar dipasarkan ke luar negeri (ekspor), sedangkan yang konvensional pasarnya dalam negeri dan luar negeri.

Pengolahan modern meliputi produk segar (udang, ikan dan kepiting), beku (Udang, ikan, kepiting, paha kodok), kering (sirip ikan hiu, rumput laut, telur ikan terbang dan teripang), olahan (rumpun laut dan kepiting), sedangkan tradisional meliputi produk asap (ikan), kering (cumi, ikan dan rumput laut), pindang (ikan), terasi (ikan) dan peda (ikan).

d. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui visi **“Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER”** berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk budidaya perikanan, dalam rangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif serta meningkatkan daya saing produk sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian visi tersebut.

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut, sebagai salah satu unit yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di wilayah ini. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi maupun peningkatan kualitas

budidaya, menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Laporan Tahunan 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran tentang berbagai pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut dalam mendukung pengembangan sektor budidaya perikanan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

REALISASI TARGET PRODUKSI, PAD UPT BAPL BOJO

1. Realisasi dan Capaian Produksi Benur

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI		KET.
			PRODUKSI	CAPAIAN (%)	
1.	Perbenihan (Ekor)	10.000.000	4.900.000	49,6	
2.	KJA (Kg)	1.000	52	5,2	

Sumber : UPT BAPL Bojo Kab Barru, 2025

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan target PAD yang telah ditetapkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 297.147.000 dengan realisasi 42,27% atau sebesar Rp. 125.605.000. Realisasi PAD UPT PBAPL pada tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya jumlah produksi yang direncanakan, yang disebabkan oleh berbagai kendala dalam proses produksi dan budidaya. Ketidaktercapaian target produksi ini berdampak langsung pada penerimaan PAD, mengingat pendapatan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil produksi benur udang dan ikan yang dihasilkan oleh unit.

Faktor-faktor seperti keterbatasan ketersediaan bahan-bahan pendukung, ketidaksesuaian jadwal panen dengan musim udang, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung turut mempengaruhi rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam aspek produksi dan manajemen sangat diperlukan agar di tahun mendatang, target PAD dapat tercapai secara optimal. uraian realisasi PAD.

NO.	URAIAN	TARGET PAD (RP)	REALISASI		KET.
			(RP)	(%)	
1.	Perbenihan	272.147.000	124.005.000	45,57	
2.	Budidaya KJA	25.000.000	1.600.000	6,40	
Jumlah		297.147.000	125.605.000	42,27	

Sumber : UPT PBAPL Bojo Kab Barru, 2025

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan UPT PBAPL Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan SPD berdampak pada proses kontrak, menyebabkan hambatan dalam pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Jadwal panen benur yang tidak sesuai dengan musim udang mengakibatkan kesulitan dalam pemasaran dan distribusi.
3. Curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi kualitas air media pemeliharaan dan air pasok, sehingga menurunkan laju pertumbuhan ikan dan produksi induk serta benur.
4. Arus yang tidak stabil mengakibatkan penumpukan sisa pakan yang berpengaruh pada sirkulasi air dan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ikan.
5. Keterbatasan fasilitas laboratorium menyulitkan pengendalian hama dan penyakit, meningkatkan risiko infeksi dalam perbenihan udang dan pemeliharaan ikan

Upaya Pemecahan

Melihat berbagai permasalahan yang muncul diatas, maka untuk kelancaran operasional kegiatan di UPT PBAPL kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak keuangan guna mempercepat penerbitan SPD.
2. Mengintensifkan kegiatan pemasaran melalui koordinasi dengan penyuluh Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi sumber pasar.
3. Melakukan penyesuaian lingkungan serta pengontrolan media pemeliharaan secara berkala.
4. Melakukan pengadukan secara manual dan pembersihan jaring secara berkala.
5. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai guna mendukung proses perbenihan udang dan pemeliharaan ikan.

e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan tupoksi melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 37 Tahun 2017.

Sesuai tupoksi pelayanan teknis operasional pengujian mutu, UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan melaksanakan sertifikasi hasil uji dengan mengeluarkan hasil uji yang benar, teliti dan dipercaya. Hal ini memegang peranan penting dalam menjamin kepercayaan konsumen akan mutu produk perikanan yang diperdagangkan dan terus mengikuti perkembangan dengan

menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk perikanan sebagai jaminan agar produk perikanan Sulawesi Selatan dapat bersaing pada pasar Ekspor.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi hasil uji, UPT BPMPP menghadirkan Inovasi e-Sejuta Ikan yang memudahkan pengurusan pelayanan Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan bagi eksportir ikan di Sulawesi Selatan dan menjadikan layanan menjadi cepat, ringkas, hemat, dan mudah. Upaya Pelayanan pengujian mutu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan permintaan standar negara tujuan menjadi enam hari kerja yang sebelumnya 12 hari kerja dan 1 Hari kerja (One Day Service) untuk pengujian Organoleptik (Sensory test). Sistem memangkas waktu pelayanan administrasi dan penerbitan sertifikat di persingkat. Bahkan, petugas UPT BPMPP menyediakan layanan jemput sampel dan antar sertifikat tanpa tambahan biaya (gratis) serta menyiapkan layanan pengaduan pengguna jasa. Selain inovasi e-sejuta ikan, UPT BPMPP dituntut melakukan pelayanan sertifikat hasil uji secara online dengan menggunakan aplikasi, dengan e-sejutaikan tersebut UPT BPMPP telah menerbitkan sertifikat sejumlah 1.776 Lembar bagi pelaku usaha eksportir dengan capaian PAD Rp. 1.235.734.000,- dari target Rp. 780.000.000,- (158,43 %). Dalam menjalankan tugas dan fungsi UPT BPMPP tahun anggaran 2025 melakukan dua program pokok yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total anggaran Rp. 889.637.003,- mencapai realisasi keuangan Rp. 832,325,707.50 dengan persentasi 93,56 % dan realisasi fisik 99,38 %.

Tabel 1. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan Oleh UPT BPMPP Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Parameter	Jenis Pengujian	
		Test Result (TR)	Total Pengujian Tahun 2025
	Organoleptik		
1	Organoleptik/Sensory	173	173
2	Filth	4	4
3	Bobot Tuntas	2	2
4	Ph	11	11
5	Suhu Pusat	3	3
	Mikrobiologi		
1	ALT Anaerob	100	100
2	ALT Aerob	759	759
3	ALT K air	68	68
4	E. Coli	764	764
5	E. Coli Kualitas Air	106	106
6	Coliform	294	294
7	Coliform Kualitas Air	103	103

No	Parameter	Jenis Pengujian	
		Test Result (TR)	Total Pengujian Tahun 2025
8	Salmonella	572	572
9	Vibrio Cholerae	1033	1033
10	Vibrio Parahaemolyticus	574	574
11	Staphylococcus Aureus	332	332
12	Listeria	293	293
13	Kapang	61	61
14	Khamir	61	61
15	Enterococci Kualitas Air	68	68
16	Eterobactriae	53	53
Kimia			
1	Histamin (Spectrofotometer)	409	409
2	Histamin(HPCL)	109	109
3	Mercury (Hg)	201	201
4	Plumbum/Timbal (Pb)	334	334
5	Cadmium (Cd)	337	337
6	OTC	2	2
7	CTC	2	2
8	Tetracycline	32	32
9	Chloramphenicol (Elisa)	305	305
10	AOZ	99	99
11	AMAZ	86	86
12	AHD	51	51
13	SEM	50	50
14	TVB	81	81
15	Kadar Air	35	35
16	Kadar Lemak	9	9
17	Kadar Protein	0	0
18	Formalin	6	6
19	Karbohidrat	0	0
20	Kadar Abu	17	17
21	Arsen (As)	232	232
Total		7.831	7.831

Sumber : Laporan tahunan UPT BPMPP Tahun 2025

Ket : Test Result : Pengujian berdasarkan permintaan Pelanggan

Tabel 2. Daftar Jumlah Sertifikat Uji Dan Jumlah Hasil Uji Per Bulan, Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Sertifikat Uji	Jumlah Hasil Uji
1	Januari	117	377
2	Februari	188	1092
3	Maret	117	591
4	April	134	521
5	Mei	151	432
6	Juni	95	347
7	Juli	146	804
8	Agustus	125	745
9	September	126	594
10	Oktober	181	666
11	November	232	974
12	Desember	164	688
	Jumlah	1.776	7.831

Sumber : Laporan tahunan UPT BPMPP Tahun 2025

Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tidak adanya anggaran pemeliharaan alat laboratorium berakibat tidak maksimalnya hasil uji yang diperoleh. Hal ini berdampak langsung pada validitas data, dan kelangsungan fungsi laboratorium secara keseluruhan,
2. Ruang pengujian tidak memenuhi standar Laboratorium uji untuk keselamatan kerja bagi analis dimana ruangan terdapat sarana exhaust dan laminary air flow tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan uap bahan kimia diruangan tidak terbuang keluar,
3. Alokasi dan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan mutu hasil perikanan belum memadai. Aplikasi Website <https://sejutaikan-bpmpp.sulselprov.go.id> belum mengalami pembaruan (update) sejak tahun 2022. Pembaruan perangkat lunak akan memastikan semua fitur, formulir kontak, dan plugin berfungsi dengan benar dan kompatibel satu sama lain. Hal ini mencegah kerusakan link atau error lainnya.

Upaya Pemecahan

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi persoalan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pengadaan alat sangat diperlukan dalam rangka kelancaran pelayanan dan keselamatan kerja didalam ruangan.
2. Perlu dukungan Anggaran dalam rangka pembaruan aplikasi website <https://sejutaikan-bpmpp.sulselprov.go.id> untuk pelayanan sertifikat hasil uji yang berdampak pada penghasil PAD

f. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah I

Provinsi Sulawesi Selatan dengan segenap wilayah administrasi darat dan perairannya sebagai kawasan maritim bagian Timur Indonesia merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI-713) dengan garis pantai sepanjang 1.937 km. Kawasan maritim tersebut ada dalam WPP-713 memiliki empat wilayah zona potensial penangkapan ikan yaitu Teluk Bone, Selat Makassar, Laut Flores dan Laut Bali yang masih memiliki potensi pemanfaatan yang sangat prospektif. Selain itu kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya juga masih memiliki potensi dan prospek pengembangan dan pemanfaatan, khususnya bagi budidaya air payau, budidaya laut dan kegiatan ekowisata pada beberapa kabupaten/kota. Seiring peluang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang didominasi kegiatan bidang perikanan penangkapan dan pembudidayaan ikan, yang masih memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan sehingga peranan pelabuhan perikanan sangat penting sekali dalam kegiatan usaha perikanan yang mana pelabuhan perikanan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara terukur dan sistematis terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan yang dilegitimasi melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang pengelolaan pelabuhan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah kerja meliputi : (1) PPI Bontobahari Kabupaten Maros, (2) PPI Maccini Baji Kabupaten Pangkep, (3) PPI Polejiwa Kabupaten Barru, (4) PPI Sumpang Binangae Kabupaten Barru, (5) PPI Cempae Kota Pare Pare, (5) PPI Ujung Lero Kabupaten Pinrang, (6) PPI Ulo Ulo Kabupaten Luwu, (7) PPI Balambangan Kabupaten Luwu, (8) PPI Pontap Kota Palopo, dan (9) PPI Lonrae Kabupaten Bone).

HASIL PROGRAM/KEGIATAN PADA UPT PELABUHAN WILAYAH I TAHUN 2025

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program pengelolaan perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Selatan berupa kegiatan Penetapan Lokasi Pelabuhan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana pagu anggaran Rp. 4.012.268.100,- (Empat Milyar Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Seratus Rupiah). Pagu anggaran Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Rp. 4.012.268.100,- dengan realisasi anggaran keuangan Rp. 3.643.652.100 atau 80,06 dan realisasi fisik 90,81 %. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 368.616.000,- merupakan item belanja pada sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang tidak dikerjakan dikarenakan tidak cukup waktu yaitu pekerjaan air bersih di PPI Pontap Kota Palopo dan pengawasan air bersih dan Sisa Kontrak Kegiatan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan telah melaksanakan Rehabilitasi Turap Penahan Tanah (Ravetment) di PPI Lonrae Kab.Bone, Pengawasan Rehabilitasi Turap PPI Lonrae Kab.Bone, Pengadaan Kontainer dan Pompa, Pembangunan Portal jalan Besi, Perencanaan Rehabilitasi PPI Pontap Kota Palopo Sedangkan untuk **Sub Kegiatan Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan Pengusahan Pelabuhan Perikanan** dengan realisasi anggaran pagu 30.905.200 Realisasi Keuangan 27.565.000 Sisa anggaran 3.340.200. item tersebut yaitu Cetak laporan, Cetak Blangko, Kertas HVS A\$, Tinta Printer.



Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa (2 Unit) di UPT.Pelabuhan Perikanan Wilayah I



Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah (Bak Mobil Sampah 2 Unit) di PPI Pontap Kota Palopo



**Pembangunan Portal Jalan besi Pelabuhan Perikanan Wilayah I
Lokasi PPI Pontap Kota Palopo**



PPI Cempae Kota Pare-pare



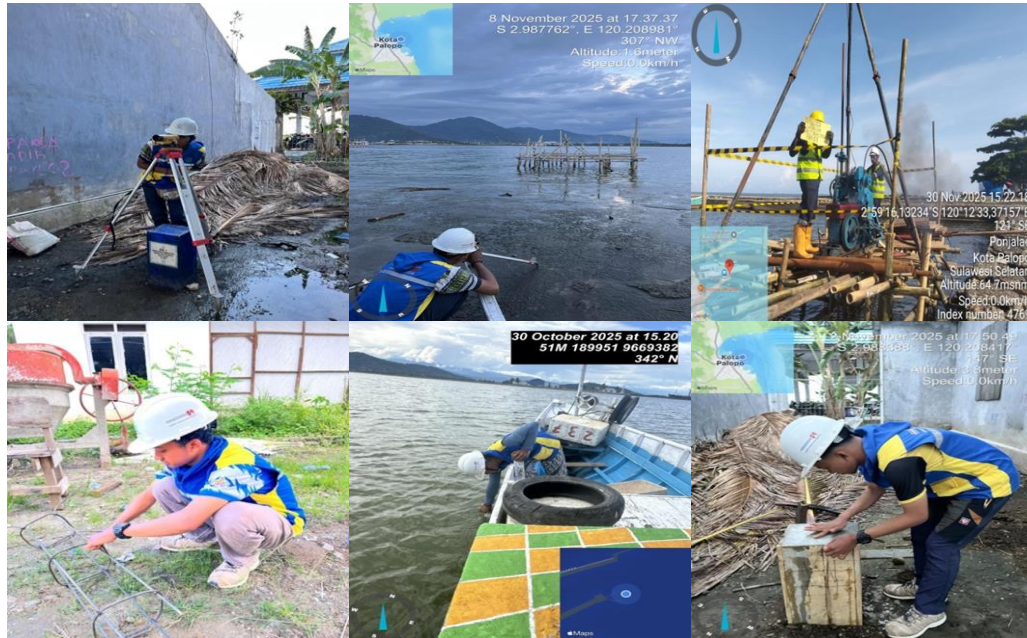
PPI Lonrae Kabupaten Bone



**Pekerjaan Rehabilitasi Turap Penahan Tanah (Ravetment)
Di PPI Lonrae Kabupaten Bone**



**Pengawasan Rehabilitasi Turap Penahan Tanah (Ravetment)
Di PPI Lonrae Kabupaten Bone**



PERENCANAAN REHABILITASI PPI PONTAP KOTA PALOPO

B. DATA PRODUKSI PADA PPI DI UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

Produksi perikanan pada tahun 2025 di setiap PPI yang berada dalam kewenangan UPT Pelabuhan Wilayah I dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	PPI	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
1.	PPI LONRAE		
2.	PPI BONTO BAHARI	24.1	559,169,500
3.	PPI MACCINI BAJI	480.4	14,498,000,000
4.	PPI POLE JIWA	-	-
5.	PPI SUMPANG BINANGAE	278.4	4,474,131,500
6.	PPI CEMPAE	264.6	6,456,185,000
7.	PPI UJUNG LERO	457.4	5,102,075,500
8.	PPI BALAMBANG	67.4	1,838,350,000
9.	PPI ULO ULO	-	-
10.	PPI PONTAP	1,175.2	26,558,865,000
Total		3,442.2	73,104,557,800

Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2025

Terdapat 2 (dua) PPI di wilayah UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I yang tidak operasional, yaitu PPI Polejiwa Kabupaten Barru dan PPI Ulo-ulo Kabupaten Luwu. Kedua PPI tersebut tidak operasional karena sarana dan prasarana pendukung yang telah rusak dan tidak dapat digunakan, saat ini kawasan PPI Ulo-ulo dimanfaatkan oleh pembudidaya rumput laut

sebagai tempat mengikat bibit rumput laut dan penanganan pasca panen rumput laut. Kawasan perairan di sekitar PPI Ulo-ulo dimanfaatkan oleh nelayan setempat sebagai area budidaya rumput laut.

DOKUMENTASI KEGIATAN BONGKAR MUAT KAPAL NELAYAN DI PPI



PPI Sumpang Binangae Kab. Barru



PPI Maccini Baji Kab. Pangkep



PPI Cempae Kota Pare - Pare



PPI Lonrae Kab. Bone



PPI Balambang Kab. Luwu



PPI Ujung Lero Kab. Pinrang



PPI Bonto Bahari Kab. Maros



PPI Pontap Kota Palopo

JASA RETRIBUSI PPI WILAYAH I PAD 2025

Adapun kegiatan Retribusi jasa Usaha yang sudah ditetapkan di pelabuhan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	NILAI	SATUAN	KET
1	Jasa retribusi kendaraan - Motor - Mobil Roda 4 - Mobil Roda 6	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000	Per unit Per unit Per unit	
2	Jasa tambat perahu - 0 – 5 GT - 5 – 10 GT - 10 – 30 GT	Rp. 5.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-	Per kapal per hari Per kapal per hari Per kapal per hari	
3	Kios - Tingkat Rendah - Tingkat Sedang - Tingkat Tinggi	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,-	Per Bulan Per Bulan Per Bulan	
4	Lahan - Tingkat Rendah - Tingkat Sedang - Tingkat Tinggi	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,-	Per Bulan Per Bulan Per Bulan	

Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2025

Kegiatan Retribusi Jasa Usaha di setiap PPI di UPT.Pelabuhan Perikanan Wilayah I Telah berjalan sesuai Peraturan Daerah Sulawesi selatan No.1 Tahun 2024 . Untuk **Target PAD Tahun 2025 Sebesar Rp. 302.153.000** dan Untuk **Realisasinya PAD Tahun 2025 Sebesar Rp. 597.937.046**.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
1	PPI LONRAE KAB. BONE			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	15.000.000	20.700.000	138
	(-) Parkir Roda 4	12.000.000	18.495.000	154,1
	(-) Tambat Perahu	7.000.000	10.500.000	150,0
	- Sewa lahan	6.300.000	9.960.830	158,1
	- Kios/wisma	3.600.000	19.239.733	385,0
	- Jasa TPI	-	-	-
2	PPI BONTO BAHARI KAB. MAROS			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	-	-	-
	(-) Parkir Roda 4	-	-	-
	(-) Tambat Perahu	2.000.000	1.000.000	50,0
	- Sewa lahan	1.000.000	-	-
	- Kios/wisma	-	-	-
3	PPI MACCINI BAJI KAB. PANGKEP			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	3.600.000	7.197.000	199,9
	(-) Parkir Roda 4	2.500.000	3.150.000	126,0
	(-) Tambat Perahu	-	2.190.000	100,0
	- Sewa lahan	4.853.000	10.440.000	215,1
	- Kios/wisma	-	-	-
4	PPI SUMPANG BINANGAE KAB. BARRU			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	6.300.000	7.200.000	114,3
	(-) Parkir Roda 4	10.000.000	10.500.000	105,0
	(-) Tambat Perahu	-	-	-
	- Sewa lahan	3.600.000	-	(100)
	- Kios/wisma	10.000.000	18.560.000	185,6
5	PPI CEMPAE KOTA PARE PARE			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	6.300.000	7.200.000	114,3
	(-) Parkir Roda 4	6.000.000	8.300.000	138,3
	(-) Tambat Perahu	3.000.000	2.060.000	68,7
	- Sewa lahan	14.400.000	31.380.000	217,9
	- Kios/wisma	25.700.000	35.355.000	137,6

6	PPI UJUNG LERO KAB. PINRANG			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	1.000.000	1.772.000	177,2
	(-) Parkir Roda 4	1.500.000	1.600.000	106,7
	(-) Tambat Perahu	2.000.000	5.250.000	262,5
	- Sewa lahan	3.000.000	7.140.000	238,0
	- Kios/wisma	700.000	960.000	137,1
7	PPI BALAMBANG KAB. LUWU			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	1.200.000	4.275.000	356,3
	(-) Parkir Roda 4	1.000.000	1.130.000	113,0
	(-) Tambat Perahu	-	150.000	100,0
	- Sewa lahan	20.000.000	21.633.333	108,2
8	PPI PONTAP KOTA PALOPO			
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu			
	(-) Parkir Roda 2	55.000.000	84.300.000	153,3
	(-) Parkir Roda 4	36.000.000	64.000.000	177,8
	(-) Tambat Perahu	2.000.000	8.990.000	449,5
	- Sewa lahan	-	10.660.000	100,0
	- Kios/wisma	-	-	-
	- Jasa TPI	-	-	-
9	COLD STORAGE	50.0000.000	52.500.000	105,0
	PABRIK	60.000.000	107.500.000	179,2
	JUMLAH	302.153.000	597.937.046	197,9

Sumber : Laporan tahunan UPT Pelabuhan Wilayah I Tahun 2025

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Pelaksanaan Program/Kegiatan di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Tahun 2025 terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Adapun permasalahan dapat disampaikan sebagai berikut :

- Sebagian besar sarana prasarana utama dan pendukung PPI sudah tidak layak digunakan dan dibutuhkan perbaikan.
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan pelabuhan perikanan memberikan dampak beuim optimalnya pada pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan dan pelayanan di kawasan tersebut.
- Fasilitas pendukung operasional pelabuhan yang disewakan kepada pihak ketiga sebagian besar telah rusak sehingga berimbas pada pemenuhan target PAD UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I.
- Terbatasnya SDM yang dimiliki untuk menunjang PAD di masing masing PPI.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025, yaitu :

- Menyusun DED setiap PPI di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 sehingga memudahkan untuk melakukan pengembangan PPI.
- Melakukan rehabilitasi sarana prasarana utama dan pendukung yang ada di setiap PPI sehingga dapat memaksimalkan pelayanan operasional pelabuhan perikanan dan pelayanan lainnya.

g. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II

Kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan produksi di sektor perikanan sebagai input kontribusi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sehingga dibutuhkan pemikiran mendasar tentang percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan yang mampu mengakomodasikan sarana dan prasarana, pelayanan pada masyarakat dan pengembangan teknologi dan informasi melalui konsep pengembangan kelautan dan perikanan secara regional yang dilakukan di wilayah daerah yang memiliki potensi pengembangan kelautan dan perikanan dengan sejumlah potensi sumberdaya yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan dan kewenangan yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 sehingga dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan lebih terarah dan tepat sasaran.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah untuk membantu fungsi teknis khususnya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagi pihak terkait bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Memberikan data dan informasi serta pelayanan teknis di dalam penanganan hasil tangkapan mulai dari pra penangkapan sampai dengan pasca penangkapan.
3. Memberikan gambaran bagi pihak terkait bahwa dengan fungsi yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II meliputi penyediaan layanan dalam rangka

memudahkan masyarakat dalam melakukan usaha kelautan dan perikanan di pelabuhan perikanan.

4. Membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Teknis yang dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah II.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II beralamat di Jalan Tokambang Kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba dengan wilayah kewenangan meliputi: Kota Makassar (PPI Paotere), Kabupaten Gowa (TPI Barombong), Kabupaten Takalar (PPI Be'ba), Kabupaten Jeneponto (PPI Tanrusampe), Kabupaten Bantaeng (PPI Birea), Kabupaten Bulukumba (PPI Bonto Bahari dan Kajang), Kabupaten Sinjai (PPI Lappa) dan Kabupaten Selayar (PPI Bonehalang).

KEGIATAN FISIK APBD TAHUN 2025

1. Pembangunan Portal Jalan Besi 3 Unit

Jumlah alokasi anggaran (pagu) sebesar Rp. 19.161.000,- telah menyerap anggaran biaya dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.147.500,- (Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah) atau realisasi anggaran (99,80 %), dengan capaian realisasi fisik 100 %. terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.500,- atau (0,2%).



Dokumentasi Pengadaan Portal PPI Kajang, PPI Lappa Dan PPI Beba

2. Kawasan Penyusunan Dokumen AMDAL di Pelabuhan Perikanan Beba

Jumlah alokasi anggaran (pagu) sebesar Rp. 700.257.375,-. Dimana telah mengalami proses tender sebesar Rp. 661.107.675,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Rupiah Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau realisasi anggaran (99,50 %), dengan capaian realisasi fisik 100 %. terdapat sisa anggaran tender sebesar Rp. 30.147.700,- atau (0,5%).

Lingkup pekerjaan Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PPI Beba Takalar Lingkup kegiatan ini tidak terbatas pada : 1). Tahap Persiapan Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan: a). Pengumpulan data-data sekunder diantaranya peta RTRW (Kab. Takalar), peta Tata Guna Lahan, dan lain-lain, b). Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan untuk penentuan lingkup wilayah studi, c). Penentuan lingkup komponen studi,

d). Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang, e). Pengecekan (validasi) dan Pengurusan Permohonan Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang pada instansi yang berwenang. Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan penanganan lingkungan dan yang berlaku sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW). 2). Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air, kualitas udara ambien, getaran dan kebisingan. Pengambilan sampel untuk analisis kualitas udara ambien, analisis bising, analisis getaran, analisis kualitas air sungai dan kualitas air sumur dilakukan masing-masing pada 4 (Empat) titik lokasi yang keseluruhannya ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Pengambilan sampel untuk analisis biologi meliputi plankton, bentos, flora, fauna dilakukan masing-masing sebanyak 4 (Empat) sampel. 3). Penyusunan Dokumen AMDAL, tahapannya sebagai berikut :

a). Proses penapisan (screening) wajib AMDAL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah.

b). Proses pengumuman dan konsultasi publik Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum melakukan penyusunan 3 AMDAL.

Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian tanggapan saran, pendapat dan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Pengumuman dilakukan di surat kabar setempat (lokal dan/atau nasional) dan di kantor kelurahan, kantor kecamatan dan rencana lokasi pembangunan selama 10 (sepuluh) hari kerja. c). Proses pelingkupan (scoping) Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan. Pada proses ini dilakukan sosialisasi atau konsultasi publik kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak dan juga masyarakat pemerhati lingkungan. Pelaksanaan

konsultansi publik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012. Muatan pelingkupan berisi tentang :

- Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji;
- Deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting);
- Hasil pelibatan masyarakat;
- Dampak penting hipotetik;
- Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian. d). Penyusunan dan penilaian dokumen Kerangka Acuan

Penyusunan dokumen kerangka acuan (KA) bertujuan untuk:

- Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL;
- Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Fungsi dokumen Kerangka Acuan (KA) adalah:

- Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen ANDAL, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai ANDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan;
- Sebagai salah satu rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL. Setelah Kerangka Acuan selesai disusun, selanjutnya adalah mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Pada proses penilaian Kerangka Acuan, wakil 4 masyarakat diundang untuk persidangan, begitu juga dengan instansi terkait. Penyedia jasa berkewajiban melakukan perbaikan konsep dokumen Kerangka Acuan, sampai Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan. Gambar 1. Alur Penilaian Kerangka Acuan (KA) e). Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan draft ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Acuan yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, dapat mengajukan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai dalam sebuah rapat Komisi Penilai AMDAL. Masyarakat dan instansi terkait kembali diundang untuk mengikuti rapat mengenai dokumen tersebut. Konsultasi dilakukan oleh penyusun kepada komisi penilai. Penyedia jasa berkewajiban melakukan perbaikan ANDAL, RKL, dan RPL, sampai Komisi Penilai AMDAL menyampaikan hasil rekomendasi penilaian akhir kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Gambar 2. Alur Penilaian ANDAL dan RKL/RPL 5, f). Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, setidaknya-tidaknya memuat :

 - Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - Pernyataan kelayakan lingkungan;
 - Persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai RKL-RPL;
 - Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Penyedia jasa harus melakukan pengurusan sampai terbitnya ijin kelayakan lingkungan hidup atau ketidak layakan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) dan Ijin Kelayakan Lingkungan. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa : a) Laporan dan Data Penyedia jasa dapat meminjam buku-buku laporan studi terdahulu yang berkaitan dengan pekerjaan ini b) Staf Pengawas/Pendamping Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konsultasi. c) Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa, adalah ruang pertemuan berikut audio sistem dan layar (screen) untuk presentasi. Berdasarkan uraian di atas, maka pendahuluan pada dasarnya berisi informasi mengenai: a). ringkasan deskripsi rencana usaha dan /atau kegiatan; b). ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/ dikaji; c). batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; Pada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut jika ada. Uraian ini disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan yang tercantum dalam dokumen KA. Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah; Pada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan secara singkat mengenai dampak penting hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA. Uraian singkat tersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan. Batas wilayah studi dan batas waktu kajian; Pada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan secara singkat batas wilayah studi dan menampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi. Penyusun dokumen AMDAL juga menjelaskan batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan dibandingkan dengan perubahan rona lingkungan dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. 2. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup:

a). Komponen lingkungan terkena dampak penting rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya), yang pada dasarnya paling sedikit memuat: 1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya. 2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau 11 endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya. 3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya. 4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.

b). Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup awal tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut. Uraian rona lingkungan hidup awal pada dasarnya memuat data dan informasi dalam wilayah studi yang relevan dengan dampak penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Uraian rona lingkungan hidup sedapat mungkin agar menggunakan data runtun waktu (time series). Selain itu komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekologis dan ekonomis perlu mendapat perhatian. Uraian rona lingkungan hidup awal tersebut juga dapat dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan; Pada bagian ini juga, penyusun dokumen AMDAL menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan. 3. Prakiraan Dampak Penting Analisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang dikaji. Karena itu dalam bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak

untuk setiap Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang dikaji. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut 12 menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode prakiraan dampak penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam AMDAL.

Dalam menguraikan prakiraan dampak penting tersebut, penyusun dokumen AMDAL hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.) Penggunaan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. b.) Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya. Tidak semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki seluruh tahapan tersebut. c.) Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak. d.) Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut: 1. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; 2. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi; 3. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian rangkaian menimbulkan dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi; 4. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; 5. Dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri; 6. Dampak penting pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang telah diutarakan

selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan. e. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif. f.) Proses analisis prakiraan dampak penting dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.

Dalam melakukan analisis prakiraan besaran dampak penting tersebut sebaiknya digunakan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan. Penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non formal. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti 4. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen AMDAL menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting Hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen AMDAL menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam AMDAL. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada pemilihan alternatif, maka evaluasi atau telaahan tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif. Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misal: alternatif 14 lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalam bagian ini, penyusun dokumen AMDAL sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut. Dalam melakukan pemilihan alternatif tersebut, penyusun dokumen AMDAL dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting Hipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagai berikut: a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain

seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama. b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan. c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan international lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti: 1) Area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat; 2) Area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau 3) Kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b atau lainnya.

Penyusun dokumen AMDAL selanjutnya melakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (best available technology), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (best achievable technology) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal. Dari hasil telaahan ini, penyusun dokumen AMDAL dapat merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional. Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen 15 lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan informasi tersebut di atas (hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternatif terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan), pemrakarsa/penyusun AMDAL dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan antara lain sebagai berikut: ➤ Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ➤ Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ➤ Kepentingan pertahanan keamanan. ➤ Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan. ➤ Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan

saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negative. ➤ Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. ➤ Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view).



DOKUMENTASI PROSES PENYUSUNAN AMDAL PPI BEBA KAB. TAKALAR

Kegiatan Retribusi Jasa Usaha di setiap PPI di UPT.Pelabuhan Perikanan Wilayah II Telah berjalan sesuai Peraturan Daerah Sulawesi selatan No.1 Tahun 2024 . Untuk **Target PAD Tahun 2025 Sebesar Rp. 356,587,000** dan Untuk **Realisasinya PAD Tahun 2025 Sebesar Rp. 371,404,660**.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
1	PPI KAJANG KAB. BULUKUMBA	39,000,000	34,760,000	89.1
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	20,000,000	20,500,000	102.5
	(-) Parkir Roda 2	7,500,000	9,000,000	120.0
	(-) Parkir Roda 4	7,500,000	10,500,000	140.0
	(-) Tambat Perahu	5,000,000	1,000,000	20.0
	- Sewa lahan	10,000,000	13,510,000	135.1
	- Jasa TPI	9,000,000	-	-
2	PPI BONTO BAHARI KAB. BULUKUMBA	31,587,000	27,366,660	86.6
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	23,000,000	19,500,000	84.8
	(-) Parkir Roda 2	7,500,000	3,000,000	40.0
	(-) Parkir Roda 4	7,500,000	2,500,000	33.3
	(-) Tambat Perahu	8,000,000	14,000,000	175.0
	- Sewa lahan	2,587,000	3,666,660	141.7
	- Kios/wisma	6,000,000	4,200,000	70.0
3	PPI BONTO BAHARI KAB. BULUKUMBA	138,340,000	230,533,000	166.6
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	122,630,000	225,000,000	183.5
	(-) Parkir Roda 2	116,630,000	222,000,000	190.3
	(-) Parkir Roda 4	-	-	-
	(-) Tambat Perahu	6,000,000	3,000,000	50.0
	- Kios	-	1,600,000	-
	- Jasa TPI	10,710,000	-	-
	- Sewa Lahan (Pihak Ke-3)	5,000,000	3,933,000	78.7

Lanjutan.....

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
4	PPI BIREA KAB. BANTAENG	11,000,000	17,545,000	159.5
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	7,000,000	-	-
	(-) Parkir Roda 2	2,000,000	-	-
	(-) Parkir Roda 4	3,000,000	-	-
	(-) Tambat Perahu	2,000,000	-	-
	- Kios/Wisma	2,000,000	17,545,000	877.3
	- Jasa TPI	2,000,000	-	-
5	PPI LAPPa KAB. SINJAI	52,000,000	52,300,000	100.6
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	37,000,000	52,300,000	141.4
	(-) Parkir Roda 2	10,000,000.00	10,800,000	108.0
	(-) Parkir Roda 4	15,000,000.00	22,500,000	150.0
	(-) Tambat Perahu	12,000,000.00	19,000,000	158.3
	- Cold Storage	15,000,000.00	-	-
6	PPI BONEHALANG KAB. SELAYAR	75,660,000	2,000,000	2.6
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	4,000,000	2,000,000	50.0
	(-) Parkir Roda 2	2,000,000	-	-
	(-) Parkir Roda 4	2,000,000	1,000,000	50.0
	(-) Tambat Perahu	-	1,000,000	-
	- Cold Storage	71,660,000	-	-
7	PPI. PAOTERE KOTA MAKASSAR	5,000,000	5,900,000	118.0
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	5,000,000	5,900,000	118.0
	(-) Tambat Perahu	5,000,000	5,900,000	118.0
8	PPI. BAROMBONG KAB. GOWA	4,000,000	1,000,000	25.0
	- Parkir R2, R4/ Tambat Perahu	4,000,000	1,000,000	25.0
	(-) Tambat Perahu	4,000,000	1,000,000	25.0
	Jumlah	356,587,000	371,404,660	104.2

Sumber : laporan Tahunan UPT Pelabuhan Wilayah II 2025

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- ✓ Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PPI di UPT Pelabuhan Perikanan sebagai pelabuhan perikanan yang akuntabel, profesional, andal, berkemampuan tinggi dan efisien maka diperlukan adanya monitoring, evaluasi yang lebih maju maka diperlukan fungsi pemerintah untuk mengaturnya dan pelayanan di Pelabuhan Perikanan PPI di UPT Pelabuhan Perikanan perlu ditingkatkan sarana dan prasarana, rehabilitasi dan operasional. Di Pelabuhan Perikanan.
- ✓ Sebagai Unit Pelaksana Tehnis di Pelabuhan Perikanan Wilayah II pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyumbang PAD sebesar 104.2 Persen dari target yang diberikan dinas.
- ✓ Dimana evaluasi pelabuhan perikanan pada PPI di UPT Pelabuhan Perikanan pada Unit Pelaksana Tehnis di Pelabuhan Perikanan Wilayah II harus dapat dipertimbangkan untuk

dimasukkan dalam kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan khususnya breakwater, kolam Pelabuhan, Rehabilitasi TPI, pabrik es, cold stroge dan Bahan Bakar Minyak.

Saran

- ✓ Kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan mempertimbangkan tata ruang wilayah.
- ✓ Dimana wilayah kerja UPT pelabuhan perikanan wilayah II terdiri atas bagian daratan dan bagian perairan yang dipergunakan kegiatan kepelabuhan dimana, Fungsi pemerintahan dalam hal ini UPT pelabuhan perikanan wilayah II adalah salah satunya merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal di pelabuhan perikanan.
- ✓ Dimana tatanan kepelabuhanan perikanan suatu sistem pelabuhanan perikanan yang memuat fungsi, fasilitas dan klasifikasi pelabuhan perikanan serta rencana induk pelabuhan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur Organisasi Dinas dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan susunannya sebagai berikut :

Tabel 3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

No.	Jabatan	Nama	Nip.	Pangkat/Golongan
1	Kepala Dinas	Dr. M. Ilyas, S.T., M.SC.	197006061996031006	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Sekretaris	Dr. Hj. Sitti Masniah Djabir S.Pi., M.P.	197305022005012010	Pembina Tingkat I (IV/b)
3	Kasubag UKH	Muhammad Risqan Qadri S.I.P., M.Si.	197901092010011019	Penata Tingkat I (III/d)
4	Kasubag Keuangan	Sitti Nurdjihad S.Pi., M.P.	196908231999032005	Pembina (IV/a)
5	Kasubag Program	Nurtjahyan Husain S.St.Pi, M.Si	198405122006041004	Pembina (IV/a)
6	Kabid Kelautan dan Pesisir	-	-	-
7	Kabid Perikanan Tangkap	Andi Mei Agung, S.ST.Pi.	197805302003121006	Pembina Tingkat I (IV/b)
8	Kabid Budidaya dan Daya Saing Produk	Suhartono Nurdin S.Pi., M.P., Ph.D.	198207072008031001	Pembina (IV/a)
9	Kabid Pengawasan	-	-	-
Jabatan Fungsional				
10	Analisis Pasar Hasil Perikanan - Ahli Madya	-	-	-
11	Analisis Pasar Hasil Perikanan - Ahli Madya	Ir. Ignatius Eko Susetioy, M.M.	196601011995031005	Pembina (IV/a)
12	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - Ahli Madya	Ir. Rosdiana, M.M.	196701161995032002	Pembina Tingkat I (IV/b)
13	Perencana - Ahli Madya	Marhamah, ST., M.Si.	197604202001122001	Pembina (IV/a)
14	Arsiparis - Ahli Muda	Nurlaila Sangkala Sirate, S.Sos.	197309031993032005	Penata Tingkat I (III/d)

Sumber : Subag Kepegawaian

Susunan organisasi tersebut di atas juga dilengkapi dengan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 7 (Tujuh) Cabang Dinas Kelautan yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana langsung kegiatan teknis di daerah. Adapun UPT dan CDK yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 4. Susunan Organisasi UPT dan CDK Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025**

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I			
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Hamsinah S.Pi.	196812082007012014	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Emirat Mayassir, S.ST.Pi.	197711032003121008	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan	-	-	-
2.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	Ijas Fajar, S.STP, M.A.P.	198004302000121001	Pembina Tingkat I (IV/b)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Febrian Budianto, S.Pi., M.M.	197302011999031008	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Adi Bastian, S.St.Pi	197905102008011008	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Tata Kelola Pelabuhan	Muh. Thamrin Nour, A.P.I., M.Si.	197507042007011013	Pembina (IV/a)
3.	Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Abdul Kadir, S.Pi., M.Si.	196712311999031031	Pembina (IV/a)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Muhammad Noer Fadri, S.Pi.	198405052006041016	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Produksi	Andi Mallombasang, S.Pi., M.Si.	197209082000031007	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan	Deppalanna, S.Pi., M.M.	197406051998031007	Pembina (IV/a)
4.	Kepala UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan	-	-	-
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	H. Masdar, S.Sos., M.A.P.	197406041998031005	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Standarisasi Mutu	Muhammad Hasby Rasyad, S.Pi., M.Si.	198001142010011011	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Pengembangan Produk	Muhammad Ridha, S.Pi., M.Si.	196806151998031013	Pembina (IV/a)
5.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar	-	-	-
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Amir, S.Sos.	196812311989031033	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Sitti Syamsuarni, S.Pi., M.Si.	197212102007012015	Penata (III/c)
	Kasie Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	-	-	-

Lanjutan.....

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
6.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan	Aron Arfandy Pananrang, S.Pi.	198008272009041005	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Andi Ashurni SL, S.H.	197104191993031009	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Muh. Erwin Azis S.Pi.	198407082010011019	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Tenri AR, S.Pi.	197604222008012013	Penata Tingkat I (III/d)
7.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya	Arsal Abdullah, S.Hut.,M.Hut.	197002072010011009	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Sub Bagian TU	-	-	-
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Kelik Kamaruddin, S.Pi.	196807241990011001	Penata (III/c)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Irwan Rahim, S.Pi.	197805102009011017	Penata Tingkat I (III/d)
8.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng	Sukmawati Gaffar, S.ST.Pi., M.Si.	197303311998032009	Pembina (IV/a)
	Kepala Tata Usaha	-	-	-
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Faizal K, S.Pi., M.Si.	196902032009021001	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Widyawati Rusman, S.E., M.Si.	197210281993032004	Pembina Tingkat I (IV/b)
9.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Bosowasi	Herimisniaty, S.Pi., M.Si.	197309231993032006	Pembina (IV/a)
	Kepala Sub Bagian TU	Taufik, S.Pi., M.M.	196904161992031013	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Nursalam, S.Pi., M.Si.	196809042005021001	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	-	-	-
	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	A. M. Suhriawan S, S.STP, M.M.	198601132006021002	Pembina (IV/a)
	Kepala Tata Usaha	Andi Yusneri, S.ST.Pi., M.Si.	197611112003122009	Pembina (IV/a)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Nursalam, S.Pi.	197106012000031006	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Rosliawati Arfah, S.Pi.,M.Si.	196803082007012022	Penata Tingkat I (III/d)

Lanjutan.....

No.	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
10	Kepala Cabang Dinas Kelautan Mamminasata	Sayyid Zainal Abidin, S.Pi.	198205182009031006	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ismail, S.Pi.	198408032011011003	Penata (III/c)
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Achmad Saenal, A.P.I.	197301302007011009	Penata Tingkat I (III/d)
	Kepala Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan	Rizky Sapharina Utami, S.Pi, M.Si.	198312042011012003	Penata Tingkat I (III/d)

Sumber : Subag Kepegawaian

3.2. Kepegawaian

Pada tahun 2025 tercatat jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 170 orang turun 6,6 % bila dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun jumlah komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 dan 2025

Tingkat/Gol	Tahun				(%)
	2024	%	2025	%	
IV	45	24,7	48	28,3	6,7
III	128	70,3	114	67,1	(10,9)
II	8	4,4	7	4,1	(12,5)
I	1	0,6	1	0,5	-
Jumlah	182	100	170	100	6,6

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian

Tabel 6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2025

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama/ IV e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya/ IV d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda / IV c	1	-	1
4	Pembina Tingkat I / IV b	3	4	7
5	Pembina/ IV a	18	22	40
6	Penata Tingkat I/ III d	31	40	71
7	Penata/ III c	8	8	16
8	Penata Muda Tingkat I / III b	8	3	11
9	Penata Muda / III a	10	6	16
10	Pengatur Tingkat I / II d	4	-	4
11	Pengatur / II c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tingkat I /II b	1	-	1

Lanjutan.....

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
13	Pengatur Muda/ II a	-	1	1
14	Juru Tingkat I / I d	-	-	-
15	Juru/ I c	1	-	1
16	Juru Muda Tingkat I / I b	-	-	-
17	Juru Muda/ I a	-	-	-
Total		86	84	170

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 7. Rekapitulasi PNS Berdasar Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2025.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	3	2	5
2	S2	23	37	60
3	S1	42	44	86
4	Sarjana Muda	3	-	3
5	SMA	14	1	15
6	SMP	-	-	-
7	SD	1	-	1
Total		86	84	170

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2025

No	Bidang/Unit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	17	21	38
3	Bidang Kelautan dan Pesisir	2	5	7
4	Bidang Perikanan Tangkap	5	5	10
5	Bidang Pengawasan	1	5	6
6	Bidang Budidaya dan Daya Saing Produk	4	8	12
7	Cabdin Kelautan Kep. Selayar	2	1	3
8	Cabdin Kelautan Pangkajene dan Kepulauan	7	3	10
9	Cabdin Kelautan Luwu Raya	5	4	9
10	Cabdin Kelautan Ajatappareng	4	3	7
11	Cabdin Kelautan Bosowasi	3	3	6
12	Cabdin Kelautan Wilayah Selatan	2	5	7
13	Cabdin Kelautan Mamminasata	4	2	6
14	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	6	6	12
15	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	11	1	12
16	UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan	4	5	9
17	UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	7	3	10
18	Jabatan Fungsional	1	3	4
19	Dipekerjakan	-	1	1
Total		86	84	170

Sumber : Subag Kepegawaian

3.3. Keuangan

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga menangani PAD, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa obyek pajak.

Untuk tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 2,000,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,716,520,956 atau 135.83 %. Adapun sumber dan target besarnya PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

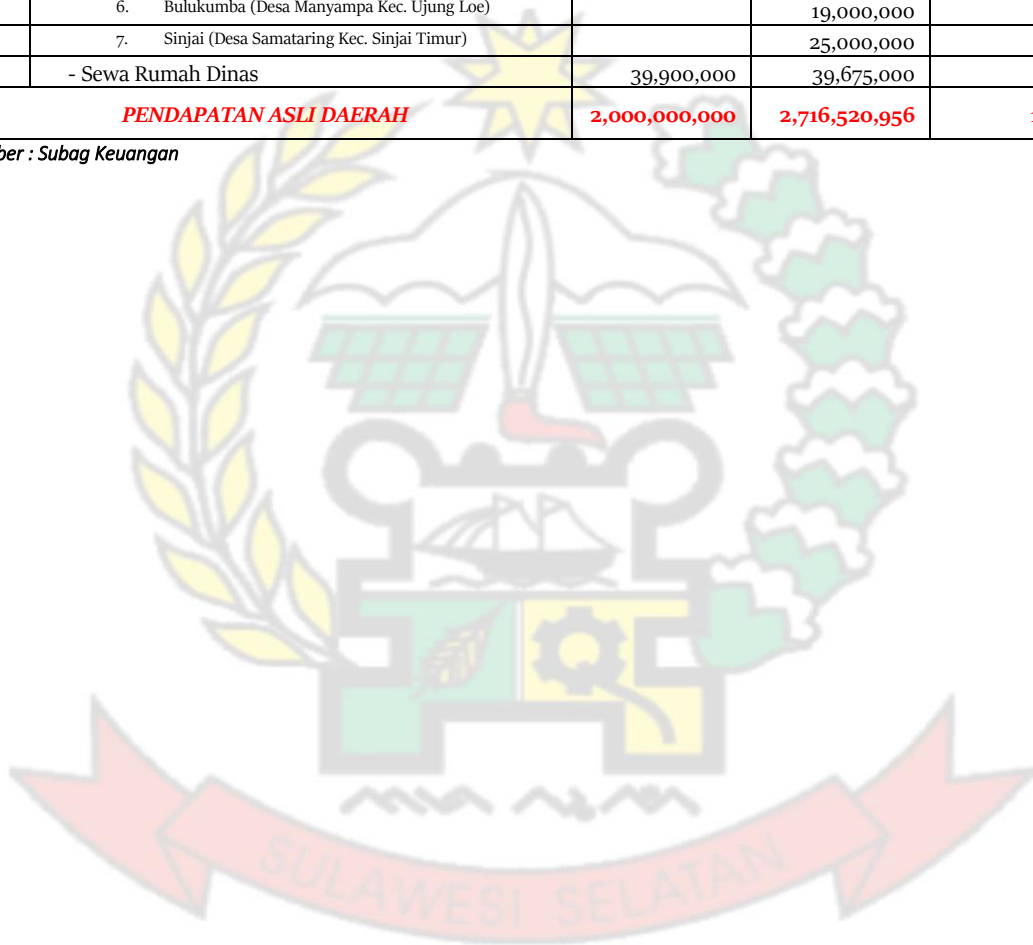
Tabel 9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	658,740,000	969,341,706	147.15
	UPT Pelabuhan Wil. I	302,153,000	597,937,046	197.89
	- Jasa Parkir			
	• Sewa Parkir Roda Dua	45,500,000	133,868,000	294.22
	• Sewa Parkir Roda Empat	39,500,000	107,675,000	272.59
	• Sewa Parkir Tambat Perahu	15,000,000	29,310,000	195.40
	- Sewa Kios	40,000,000	102,154,733	255.39
	- Kerjasama sewa Lahan	52,153,000	92,429,313	177.23
	- Pabrik dan Pengolahan	60,000,000	80,000,000	133.33
	- Coldstorage	50,000,000	52,500,000	105.00
	UPT Pelabuhan Wil. II	356,587,000	371,404,660	104.16
	- Jasa Parkir			
	• Sewa Parkir Roda Dua	145,630,000	22,800,000	15.66
	• Sewa Parkir Roda Empat	36,000,000	36,500,000	101.39
	• Sewa Parkir Tambat Perahu	42,000,000	44,900,000	106.90
	- Sewa Kios	8,000,000	23,345,000	291.81
	- Kerjasama sewa Lahan	39,297,000	243,859,660	620.56
	- Coldstorage	85,660,000	-	-
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	30,740,000	42,082,000	136.90
	- Kerjasama Sewa Lahan	15,500,000	31,042,000	200.27
	- Sewa Koperasi Pegawai	8,040,000	8,040,000	100.00
	- Sewa Kantin Pegawai	7,200,000	3,000,000	41.67
3	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1,119,620,000	1,512,389,000	135.08
	- Sertifikasi Mutu Ekspor dan Surat Keterangan Asal	819,620,000	1,235,734,000	150.77
	- UPT PBAPL Bojo / Barru	150,000,000	125,605,000	83.74
	• Penjualan Benur	140,000,000	124,405,000	88.86
	• KJA (Keramba Jaring Apung)	10,000,000	1,200,000	12.00
	- BBI Lajoa Soppeng	150,000,000	151,050,000	100.70

Lanjutan.....

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	190,900,000	192,675,000	100.93
	- Kerja Sama Sewa Tambak	151,000,000	153,000,000	101.32
	1. Jenepono (Kel. Monro2 Kec. Binamu)			
	2. Maros (Desa Pajukukang Kec. Bontoa)		10,000,000	
	3. Maros (Desa Bori Masunggu Kec. Maros)		67,500,000	
	4. Pangkep (Desa Talaka Kec. Ma'rang)		27,500,000	
	5. Takalar (Desa Takalar Kec. Mappakasunggu)		4,000,000	
	6. Bulukumba (Desa Manyampa Kec. Ujung Loe)		19,000,000	
	7. Sinjai (Desa Samataring Kec. Sinjai Timur)		25,000,000	
	- Sewa Rumah Dinas	39,900,000	39,675,000	99.44
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,000,000,000	2,716,520,956	135.83

Sumber : Subag Keuangan



IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

4.1. Kebijakan dan Program Strategis

a. Kebijakan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan tahapan pembangunan tahunan (arah kebijakan) sebagai prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang didukung oleh SDM yang berdaya saing dimana pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat posisi provinsi sebagai pilar utama maritim Indonesia melalui konsep **Ekonomi Biru (Blue Economy)** yang berkelanjutan. Berikut adalah kebijakan dan program strategis yang dijalankan:

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Mewujudkan Menguatkan sektor pertanian, Peningkatan Pengelolaan ekonomi biru melalui peternakan, dan perikanan berbasis Sumber Daya Kelautan dan perlindungan laut, kawasan unggulan yang didukung Perikanan yang berkelanjutan	Menguatkan sektor pertanian, peternakan dan perikanan berbasis Kawasan unggulan yang didukung inovasi teknologi dan tatakelola rantai pasok yang efisien, meningkatkan hilirisasi berbasis SDA, serta pengamanan Cadangan pangan strategis una mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan secara berkelanjutan.	Peningkatan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi Teknologi dan Infrastruktur , pemberdayaan nelayan dan Masyarakat Pesisir, penguatan pemasaran dan Nilai tambah, pengembangan Wisata perikanan dan Bahari	

Lanjutan.....

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
			Peningkatan pengelolaan Kawasan konservasi rehabilitasi ekosistem laut dan adaptasi perubahan iklim serta pembersihan sampah plastik di laut	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan inovatif melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan kualitas pelaporan kinerja, kualitas engawasan dan kualitas kinerja ASN yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan mengedepankan pelayanan prima yang inovatif	Peningkatan tata Kelola layanan perangkat daerah yang akuntabel, adaptif dan inovatif	

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 berfokus pada penguatan Ekonomi Biru yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Melalui peluncuran kegiatan prioritas senilai Rp48 miliar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

- **Implementasi Roadmap Ekonomi Biru 2025-2045:** Menjadikan pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai pilar utama.
- **Hilirisasi Produk Unggulan:** Fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas hasil laut, terutama rumput laut, untuk menarik investasi global.
- **Penguatan Tekad Biru Sulsel 2029:** Program akselerasi yang menargetkan Sulawesi Selatan sebagai pemimpin sektor kelautan nasional pada akhir dekade ini

Prioritas Pembangunan Daerah pada sektor Kelautan dan Perikanan

- a) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
Sasaran Prioritas Pembangunan :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
2. Optimalnya Kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan :

1. Nilai SAKIP Provinsi
Target 2025 : 69,27 (B)
2. Indeks Pelayanan Publik
Target 2025 : A-(4,35-4,50)

b) Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah

Sasaran Prioritas Pembangunan :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan :

1. Pertumbuhan Ekonomi

b. Program Strategis Utama

Berikut adalah program strategis yang dilaksanakan pada tahun 2025 :

1. **Rehabilitasi Ekosistem dan Konservasi**

Sebagai fondasi ekonomi biru, Pemprov Sulsel secara konsisten melakukan rehabilitasi ekosistem melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan pemeliharaan padang lamun. Program unggulan mencakup pembangunan lebih dari 1.657 unit apartemen ikan dan pemasangan rumpon untuk memulihkan populasi ikan serta mencegah kerusakan lingkungan akibat alat tangkap yang merusak

2. **Pengembangan Pelabuhan Perikanan**

Sektor logistik diperkuat melalui rehabilitasi dan peningkatan layanan pelabuhan perikanan, terutama yang terintegrasi dengan kawasan Teluk Bone. Langkah ini bertujuan menjadikan pelabuhan sebagai sentra ekonomi yang efisien untuk mendukung distribusi hasil tangkapan nelayan ke pasar lokal maupun ekspor.

3. **Hilirisasi dan Budidaya Rumput Laut Ramah Lingkungan**

Sulawesi Selatan memperkuat posisinya sebagai produsen utama dengan membagikan 2.000 paket sarana prasarana budidaya rumput laut. Paket ini mencakup:

- Bibit berkualitas: Sebanyak 300 kg per paket untuk menjaga stabilitas produksi.
- Pelampung ramah lingkungan: Sebagai bagian dari kampanye ramah lingkungan, nelayan didorong menukar botol plastik bekas dengan pelampung standar guna meminimalisir limbah di laut.
- Kebun Bibit: Pengembangan kebun bibit rumput laut untuk memastikan keberlanjutan pasokan bibit unggul bagi pembudidaya lokal

4. **Modernisasi Armada dan Perlindungan Nelayan**

Untuk meningkatkan kapasitas tangkap dan keselamatan nelayan, pemerintah menyalurkan bantuan:

- Kapal 1-15 GT: Pengadaan unit kapal berukuran 1 GT, 5 GT, hingga 15 GT yang disesuaikan dengan kebutuhan nelayan kecil dan menengah.

- Asuransi Nelayan: Memberikan jaminan perlindungan sosial bagi nelayan dalam menjalankan profesinya.
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPDN): Kerja sama dengan mitra pembangunan untuk menyediakan fasilitas pengisian bahan bakar guna memastikan ketersediaan energi bagi operasional melaut nelayan.

5. Peningkatan Nilai Tambah Produk

Pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana pengolahan hasil perikanan untuk mendorong hilirisasi produk perikanan. Hal ini dimaksudkan agar hasil tangkapan dan budidaya tidak hanya dijual mentah, tetapi memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 adalah penerapan strategi Ekonomi Biru yang Terintegrasi. Kebijakan ini tidak hanya mengejar pertumbuhan angka produksi, tetapi juga memastikan kesejahteraan nelayan dan kelestarian alam berjalan beriringan.

Berikut adalah poin-poin utama :

- Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi: Rehabilitasi ekosistem (seperti apartemen ikan dan mangrove) menjadi fondasi agar produktivitas laut tetap terjaga untuk jangka panjang.
- Modernisasi dari Hulu ke Hilir: Pemerintah melakukan intervensi menyeluruh, mulai dari perkuatan armada tangkap (kapal 1-15 GT), penyediaan bahan bakar (SPDN), hingga sarana pengolahan hasil untuk menciptakan nilai tambah produk perikanan.
- Kemandirian Sektor Rumput Laut: Penekanan pada bibit unggul melalui kebun bibit dan sarpras yang ramah lingkungan menegaskan posisi Sulsel sebagai hub utama rumput laut nasional yang berkelanjutan.
- Perlindungan Sosial dan Fasilitas: Program asuransi nelayan dan kerja sama dengan mitra pembangunan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam memitigasi risiko kerja nelayan serta memastikan infrastruktur dasar terpenuhi Selaras dengan visi daerah, seluruh program ini bertujuan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama kelautan nasional dan akselerator kesejahteraan masyarakat pesisir melalui tata kelola yang lebih modern dan inklusif.

4.2.1. Dana APBD

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

- Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha

- Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

- **Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

- Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha

- Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

- **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

- Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

- **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- **Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT**
 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
- **Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi**
 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- **Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**
 - Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- **Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

■ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
- Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah

■ Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi.
- Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi.
- Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi.

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

■ Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

■ Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir

4.2. Sumber Pembiayaan

4.2.1. Dana Daerah

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung pendanaan APBD, untuk tahun 2025 total anggaran sebesar Rp. 86,862,381,251,- ini berarti terjadi penurunan sebesar 5,03 % dari tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 91,464,384,438.0,-,

Belanja Daerah

Belanja daerah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 86,862,381,251,- dengan realisasi keuangan Rp. 78,957,380,030.49 (90,9 %).

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan. Alokasi dana tersebut terdapat pada Enam program kegiatan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 36,061,806,950.99 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 34,267,677,875 (98,66 %).
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp. 15,403,256,800 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 13,799,122,350 (99,9 %).
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 23,032,785,775,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 21,017,626,375,- (98,4 %).
- d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 9,841,571,459 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 7,798,150,451,- (98,01 %).
- e. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1,851,255,867,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1,415,919,880 (79,8 %).
- f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 671,704,400,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 658,504,290.5,- (99,9 %).

4.3. Kegiatan Pembangunan

4.3.1. Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan dan kemaritiman, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi yang ramah lingkungan. Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan kedepan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang

dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan daya saing dan pemasaran melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter, dan pengembangan mekanisme serta jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Adanya arahan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024 oleh pemerintah pusat yaitu Berbasis Ekonomi Biru dengan output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kebijakan tersebut diantaranya yaitu : Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal.

Berbagai masalah juga akan dihadapi dalam memanfaatkan peluang tersebut, baik pada sektor hulu maupun pada pembudidaya dengan sektor hilir sehingga diperlukan suatu langkah strategis yang mampu menggerakkan secara optimal seluruh komponen yang terkait dengan usaha perikanan budidaya. Langkah tersebut adalah perubahan paradigma perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen terkait. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator/intermediasi, sementara pelaku usaha budidaya sebagai pemeran utama.

Beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan telah terlaksana pada Tahun Anggaran 2025 melalui Anggaran Pokok dan setelah mengalami proses perubahan anggaran melalui Anggaran Perubahan TA. 2025, yakni:

1. PROGRAM : Pengelolaan Perikanan Budidaya

✓ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dilaut

A. Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

■ Pengembangan Rumah Bibit Rumput Laut

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Agustus – Desember.
- c. Tempat Pelaksanaan : Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab.Takalar.
- d. Realisasi Keuangan : Rp. 230.010.140,-
- e. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Pengembangan Rumah Bibit Budidaya Rumput laut TA. 2025.



Rumah Bibit Budidaya Rumput Laut

B. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

■ Sarana Budidaya Rumput Laut (Bibit Rumput Laut *E. cottonii* dan *E. spinosum*)

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DS Produk
- b. Waktu Pelaksanaan : Agustus - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Wajo, Pinrang, Barru, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kab.Bone, Selayar, Pangkep.
- d. Realiasi Keuangan : Rp. 2.764.500.000,- Nilai Kontrak
- e. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Penyerahan Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput laut TA. 2025 (Bibit Rumput Laut).



Penyerahan Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput laut TA. 2025 (Bibit Rumput Laut)

■ Sarana Budidaya Rumput Laut (Pelampung Rumput Laut)

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DS Produk
- b. Waktu Pelaksanaan : Agustus - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Wajo, Pinrang, Barru, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kab.Bone, Selayar, Pangkep.
- d. Realiasi Keuangan : Rp3.875.010.000,- Nilai Kontrak
- e. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Penyerahan Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput laut TA. 2025.



Penyerahan Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput laut TA. 2025 (Pelampung Rumput Laut)

✓ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

A. Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

■ Pembuatan Mini Bioflok Ikan Air Tawar 1 Set 6 Kolam

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Oktober – Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Desa Gentungang, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa.
- d. Realiasi Keuangan : Rp132.201.400,- Nilai Kontrak
- e. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Pembuatan Mini Bioflok Ikan Air Tawar di Kabupaten Gowa TA. 2025.



B. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

■ Dukungan Operasional Perbenihan Instalasi BBI Lajoa Kab. Soppeng

- a. Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b. Waktu Pelaksanaan : Juli - Agustus
- c. Tempat Pelaksanaan : Instalasi BBI Lajoa Kabupaten Soppeng
- d. Realisasi Keuangan : Rp. 196.303.400,- Nilai Kontrak
- e. Hasil yang dicapai : Terlaksananya Dukungan Operasional Perbenihan BBIS Soppeng



2. PROGRAM : Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

✓ **Bantuan Sarana Pengolahan/Pemasaran Produk Hasil KP.**

- a) Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b) Waktu Pelaksanaan : 60 (enam puluh) hari kalender
- c) Tempat Pelaksanaan : Poklhasar Dapur Rusda Kabupaten Pinrang
- d) Realisasi Keuangan : Rp. 98.630.000
- e) Hasil yang dicapai : Tersalurnya bantuan sarana pengolahan untuk Poklhasar Dapur Rusda di Kabupaten Pinrang



✓ **Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan**

- a) Pelaksana Kegiatan : Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP
- b) Waktu Pelaksanaan : 14 (empat belas) hari kalender
- c) Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa
- d) Realisasi Keuangan : Rp. 49.900.000
- Hasil yang dicapai : Terlaksananya Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan/Edukasi Pentingnya Protein Ikan untuk anak usia sekolah dasar di Kab.Jeneponto dan Kab.Maros



SDN Nomor 8 Binamu Jeneponto



SDN 136 Bonto Tallasa, Kabupaten Maros

4.3.2. Perikanan Tangkap

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi selatan dan Sumatra di utara, Teluk bone dan Sulawesi tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut flores di selatan. Sulawesi Selatan secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan sebelah Barat dengan Selat Makassar. Di sebelah Timur berbatas dengan Teluk Bone dan di sebelah Selatan dengan Laut Flores. Ibukotanya Makassar dengan posisi yang strategis di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi Kawasan Timur Indonesia maupun untuk skala internasional.

Sejalan dengan usaha pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, maka masalah mendasar yang harus dilakukan dan dibenahi adalah yang terkait dengan dukungan serta keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat perikanan atau nelayan.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, khususnya Bidang Perikanan tangkap sangat dibutuhkan sarana prasarana penunjang perikanan tangkap berupa Kapal penangkap ikan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2025 ini telah memfasilitasi pemberian sarana penunjang Perikanan Tangkap berupa Mesin, alat tangkap dan kapal penangkap ikan kepada nelayan penerima manfaat. Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ke depan, selain berfungsi sebagai tempat berlabuh atau bertambahnya perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan juga diarahkan untuk pengembangan Industrialisasi Pengembangan Perikanan Tangkap untuk mendukung pengembangan sentra ekonomi perikanan berbasis kawasan. Paket kebijakan peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan meliputi : (1) Peningkatan kualitas pelayanan ; (2) Revitalisasi pelabuhan perikanan; dan (3) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana. Peningkatan peran dan fungsi pelabuhan perikanan dimasa yang akan datang mutlak diperlukan. Disamping menciptakan iklim usaha yang kondusif, pelayanan yang cepat, juga harus memberikan rasa aman bagi setiap pelaku usaha dan dalam pelaksanaannya menuntut partisipasi aktif segenap stakeholder. Masih rendahnya tingkat operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dilokasi masing masing pelabuhan. Evaluasi kinerja pelabuhan perikanan merupakan sebagian dari kegiatan manajemen, untuk menilai kinerja pelabuhan perikanan secara terukur dan hasilnya sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga keberadaanya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh nelayan

dan stakeholders lainnya. Diharapkan dengan telah diserahkannya bantuan tersebut kepada nelayan penerima manfaat, sarana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan yang ada, mampu meningkatkan produksi hasil tangkapan, mampu menjaga mutu ikan hasil tangkapan nelayan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap

I. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

a) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

- Pagu Anggaran : Rp. 2.121.200,-
- Realisasi : Rp. 2.121.200,-
- Keuangan : 0 %
- Output Kegiatan : Alokasi belanja fotocopy, kertas.tinta tidak dilaksanakan karena dalam proses pengadaan tidak mendapatkan penyedia yang bersedia dan honor narasumber tidak dilaksanakan karena efisiensi belanja

b) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

- Pagu Anggaran : 12.548.508.700
- Realisasi : 11.984.520.00 (95,51%)
- Output Kegiatan :

➤ Terlaksananya pembangunan kapal 15 GT sebanyak 3 Unit

Paket Penyediaan Usaha Perikanan Tangkap Kapal 15 GT

NO	NAMA PAKET	LOKASI	JUMLAH	KET
A	KAPAL 15 GT / 3 UNIT			
1	Kampung Beru Satu	Bulukumba	1	
2	Makmur Sejahtera	Bone	1	
3	KUB Beringain	Bone	1	
			3	



➤ **Terlaksananya Pembangunan kapal 5 GT sebanyak 20 Unit**

Paket Penyediaan Usaha Perikanan Tangkap Kapal 5 GT, Alat tangkap dan Mesin

NO	NAMA PAKET	LOKASI	JUMLAH
1.	Pesisir Jaya	Takalar	1
2.	KUB Sejahtera	Bantaeng	1
3.	Mandala	Bulukumba	1
4.	Pantai Merpati	Bulukumba	1
5.	Kerapu Macan	Selayar	1
6.	Anak Atol	Selayar	1
7.	KUB Lautan Biru	Pangkep	1
8.	KUB Mutiara Biru	Pangkep	1
9.	Ammani Maju Bersama	Pinrang	1
10.	Pasir Putih IV	Barru	1
11.	KUB Jaelani	Bone	1
12.	Ekor Kuning	Luwu	1
13.	Babana Temboe	Luwu	1
14.	Ajuloloe	Luwu Utara	1
15.	Padaita	Luwu Timur	1
16.	Pesisir Jaya	Takalar	1
17.	KUB Sejahtera	Bantaeng	1
18.	Mandala	Bulukumba	1
19.	Pantai Merpati	Bulukumba	1
20.	Kerapu Macan	Selayar	1
21.	Anak Atol	Selayar	1
22.	KUB Lautan Biru	Pangkep	1
23.	KUB Mutiara Biru	Pangkep	1
24.	Ammani Maju Bersama	Pinrang	1
25.	Pasir Putih IV	Barru	1
26.	KUB Jaelani	Bone	1
27.	Ekor Kuning	Luwu	1
28.	Babana Temboe	Luwu	1
29.	Ajuloloe	Luwu Utara	1
30.	Padaita	Luwu Timur	1



➤ **Terlaksananya Pembangunan Kapal 1 GT sebanyak 100 Unit**

Paket Penyediaan Usaha Perikanan Tangkap Kapal 1 GT, Alat tangkap dan Mesin

No	NAMA PAKET	LOKASI	JUMLAH
	Kapal 1 GT/ 100 Unit		
1	Armada Laut	Makassar	1
2	Bontorannu Bahari	Makassar	1
3	Barakka Salama	Makassar	1
4	Cahaya Mulia	Makassar	1
5	Sinar Bahari	Makassar	1
6	KUB Ruru Jarung Bahari	Maros	5
7	Bina Bersama	Maros	1
8	Nelayan Mangesu Jaya	Gowa	1
9	Putra Manjalling	Takalar	1
10	Kaluku Bodo	Takalar	1
11	Tunas Muda Boddia	Takalar	5
12	Jangkar Boddia Jaya	Takalar	5
13	Kurannuang	Takalar	5
14	Resy Amira	Takalar	5
15	Batu Berlian	Takalar	2
16	Tana Balang	Takalar	1
17	Usaha Bersama	Takalar	1
18	Sejahtera Bersama	Takalar	1
19	Jaya Abadi	Takalar	1
20	Sinar Nelayan	Takalar	1
21	Sipakalabbiri	Takalar	1
22	Bahagia	Jeneponto	1
23	Mentari Pagi	Jeneponto	1
24	Lapang Jaya	Jeneponto	1
25	Jangkar Laut	Bantaeng	1
26	Sumber Laut Birkas	Bantaeng	1
27	Batu Laura Bangkit	Bantaeng	1
28	KUB Andalan Bersinar	Bantaeng	2
29	Lina Buana Putri	Bulukumba	1
30	Usaha Bersama	Bulukumba	1
31	Nelayan Damai	Bulukumba	1
32	Ere Poso	Selayar	2
33	Idaman	Selayar	1
34	Nelayan Laut Dangkal	Selayar	1
35	Assupakatau	Selayar	1
36	Jelekko	Pangkep	1
37	Mekar Mandiri	Pangkep	1
38	Bunga Mawar	Pangkep	1
39	Andalan Jaring Bersatu	Pangkep	1
40	Cahaya Mulia	Pangkep	3

Lanjutan.....

No	NAMA PAKET	LOKASI	JUMLAH
41	Batuloangnge	Barru	1
42	Buaka Indah	Barru	1
43	Nelayan Anugrah	Pare Pare	2
44	Mappasitujue	Pinrang	1
45	Pammase	Pinrang	1
46	Sipakario rio	Pinrang	1
47	Nusantara Biru	Bone	1
48	Buana Reski	Bone	1
49	Sinar Laut	Wajo	1
50	Buah Mimpi	Wajo	1
51	Mattirotas I	Wajo	1
52	Mappucu Loloe	Wajo	1
53	Mattiro Tasi	Wajo	1
54	Pattampa Bajae I	Wajo	1
55	Mallusetasi II	Wajo	1
56	Cappabalatue	Wajo	1
57	Matali Berjaya	Luwu	3
58	Nelayan Ponnori Bersatu	Luwu	3
59	Jelajah samudera	Luwu	2
60	Lamborgini	Palopo	1
61	Pabbiring	Luwu Utara	1
62	Dalle Katonik	Luwu Utara	1
63	Aman Bersama	Luwu Utara	2
64	Sipatuo	Luwu Utara	2
65	Hasil Mulia	Luwu Utara	2
66	Laut Biru 03	Luwu Timur	1
Total			100

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Perikanan Tangkap 2025

c) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

- Pagu Anggaran : 5.593.895.200
- Realisasi : 5.014.425.018 (89,64%)
- Output Kegiatan :

- Pengadaan alat tangkap Zero sebanyak 1 unit di KUB Berkarya Kecamatan Bua, Kab. Luwu



➤ Terlaksananya pengadaan alat tangkap Rumpon sebanyak 130 Unit

Paket Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pengadaan Rumpon

No	NAMA PAKET	LOKASI	JUMLAH
1	KUB Sinar Laut	Maros	1
2	KUB Tudang Sipulung	Maros	1
3	KUB Nelayan Nusantara	Maros	1
4	Nelayan Pura Lakatoa	Takalar	4
5	Garassi Jaya	Takalar	4
6	Sunggu Manai	Takalar	2
7	Nelayan Bahagia	Takalar	2
8	Cempaka Tua	Takalar	2
9	Bintang Laut	Takalar	2
10	Bunga Laut	Takalar	1
11	Bulo Pattung Jaya	Takalar	1
12	Bahari	Takalar	3
13	KUB Sinar Kampung Beru	Jeneponto	1
14	Pesisir Putra	Jeneponto	1
15	Bahari Jaya	Jeneponto	3
16	Karya	Jeneponto	3
17	Berkah Ilahi	Bulukumba	3
18	KUB Saudera Mattoanging	Bulukumba	2
19	KUB Ujung Tiro	Bulukumba	2
20	Nur Irsyad	Bulukumba	2
21	Kassi Jaya	Bulukumba	2
22	Disran Jaya	Bulukumba	3
23	Arya Rahmat	Bulukumba	2
24	Anto Jaya 01	Bulukumba	3
25	Athirah	Bulukumba	3
26	Aura Suci	Bulukumba	2
27	Adidas community 2	Bulukumba	1
28	Syibara Putra Turungan Beru	Bulukumba	4
29	Fadhilah 01	Bulukumba	1
30	Cahaya Abadi	Bulukumba	1
31	Pasir Putih	Selayar	1
32	Opu Bulik	Selayar	3
33	Camar Laut	Selayar	2
34	Assamaturu	Selayar	2
35	Bunga Mekar	Pangkep	1
36	Jabar Rahmah	Barru	2
37	Mabbarakka	Pinrang	1
38	Babunni'mah	Pinrang	2
39	Putra Laut	Pinrang	1
40	Pasir Putih	Pinrang	1
41	Perahu Layar	Pinrang	1
42	Laut Biru	Pinrang	2

Lanjutan.....

No	NAMA PAKET	LOKASI	JUMLAH
43	Mnrapi	Pinrang	2
44	KUB Gunung Jati	Pinrang	2
45	Kelompok Nurhikmah	Pinrang	2
46	Karya Agung	Bone	1
47	Dandig8	Bone	3
48	Idar Jaya	Bone	4
49	Mata Pancing	Bone	3
50	Pada Idi Sipadecengi	Bone	1
51	Tuna Timur Mandiri	Bone	1
52	Pakkajatasi 1	Wajo	2
53	Adidas	Luwu	4
54	Jaya Selalu	Luwu	4
55	Tarusan	Luwu	3
56	KUB Pasi Lakotong	Luwu	2
57	KUB Bilado	Luwu	2
58	Linda Buana	Luwu	1
59	Bungawaru	Palopo	2
60	Nirannuang	Palopo	2
61	KUB Pengobatan	Palopo	2
55	Tarusan	Luwu	3
56	KUB Pasi Lakotong	Luwu	2
57	KUB Bilado	Luwu	2
62	Lewetu Pesisir	Luwu Utara	2
63	Hasil Laut Fikram	Luwu Utara	1
64	Sirip Biru	Luwu Timur	1
65	Samaturu	Luwu Timur	1
Total			130

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Perikanan Tangkap 2025



- Terlaksananya belanja iuran jaminan asuransi bagi pekerja rentang (Nelayan)
 - ✓ Bantuan Asuransi Jaminan kecelakaan Tenaga Kerja Nelayan untuk bulan Oktober s.d Desember 2025 sebanyak 10.000 Nelayan sebesar Rp.300.000.000,-
 - ✓ Bantuan Asuransi Jaminan kematian Tenaga Kerja Nelayan untuk bulan Oktober s.d Desember 2025 sebanyak 10.000 Nelayan sebesar Rp.204.000.000,-

Rekapan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan BPJSKT Vulcan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2025

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	BANTAENG	123
2	BARRU	316
3	BONE	1,343
4	BULUKUMBA	1,097
5	GOWA	284
6	JENEPONTO	336
7	LUWU	181
8	LUWU TIMUR	57
9	LUWU UTARA	61
10	MAKASSAR	102
11	MAROS	429
12	PALOPO	30
13	PANGKEP	1,007
14	PARE PARE	63
15	PINRANG	691
16	SELAYAR	1,035
17	SINJAI	787
18	TAKALAR	1,743
19	WAJO	315
Total		10,000

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Perikanan Tangkap 2025

II. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Berusaha Sub Sektor penangkapan dan Pengangkutan Ikan Untuk Kapal Ukuran di Atas % GT - 30 Gt Beroperasi Sampai Dengan 12 Mil

- Pagu Anggaran : 105.000
- Realisasi : 0
- Output Kegiatan : Untuk penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI Selama Bulan Januari s.d Desember 2025 Sebanyak 2.414 buah yang terdiri dari SIUP : 617, SIPI : 1.612 dan SIKPI : 185

III. Kegiatan : Pengelolaan penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai,Waduk, Rawa ,Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

- Pagu Anggaran : 26.620.000.00
- Realisasi : 24.987.000 (93.87%)
- Output Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan alat bantu penangkapan ikan berupa Mesin Tempel Sebanyak 3 Unit di Kabupaten Soppeng untuk

Kelompok Nelayan Sipatuo Desa Batu batu Kec.Marioriawa
Kabupaten Soppeng



IV. Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kab/Kota Dalam I (satu) Daeran Provinsi.

Sub Kegiatan : Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 5 GT

- Pagu Anggaran : 7.392.400
- Realisasi : 1.890.000 (25,57%)
- Output Kegiatan : Untuk penerbitan Buku Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil (eBKP NK) Selama Bulan Januari s.d Desember 2025 Sebanyak 838 eBKP NK

V. Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Provinsi.

Sub Kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

- Pagu Anggaran : 15.021.400
- Realisasi : 8.630.000 (57,34%)
- Output Kegiatan : Rekomendasi Rehab fasilitas pelabuhan perikanan yang meliputi 4 Pelabuhan di antaranya :
 - Pontap (TPI , Pelataran & Draenase)
 - Beba (Breakwater)
 - Lonrae (Perbaikan Turap)
 - Ulo_Ulo Belopa (Rehab Pelataran, Bangunan TPI, Turap,Rehab Jalan Kompleks)

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENCEGAHAN

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan tahun 2025 adalah :

- Kelompok yang mendapatkan bantuan tidak melaporkan hasil produksi tangkapannya secara berkala.
- Masih adanya nelayan yang belum membuat izin usaha terhadap kegiatan yang mereka lakukan, sehingga terdapat permasalahan dalam melakukan aktivitas penangkapan.

- Diharapkan Nelayan yang telah mendapatkan bantuan pembayaran Premi Asuransi Nelayan, supaya bias melanjutkan secara mandiri
- Sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan masih perlu di tingkatkan untuk mendukung operasional pelabuhan perikanan.
- Masih banyak kab/Kota Belum terlaksananya MOU terkait pengelolaan fasilitas TPI .
- Secara umum hampir semua nelayan di Sulawesi Selatan mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM Solar subsidi.
- Terbatasnya personil ASN yang ditempatkan dalam pengelolaan dan operasional pelabuhan perikanan.

2. Upaya Pencegahan dan penyelesaian

Upaya pencegahan dan penyelesaian yang dilakukan antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi secara terpadu dan berkesinambungan dengan Melibatkan penyuluh perikanan Kabupaten/Kota agar kelompok nelayan dapat melaporkan hasil tangkapan secara berkala untuk mengukur asas manfaat dari bantuan yang telah diberikan.
2. Melakukan pendampingan terhadap nelayan untuk melengkapi dokumen perizinannya.
3. Melakukan sinkronisasi dan sosialisasi terkait informasi tentang regulasi atau aturan yang baru kepada nelayan.
4. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada nelayan tentang pentingnya asuransi, sehingga diharapkan nelayan dapat melanjutkan asuransi secara mandiri.
5. Perlunya peningkatan Sarana dan Prasarana (rehab) Pelabuhan Perikanan.
6. Melakukan rekrutmen ASN yang dapat ditempatkan pada beberapa pelabuhan perikanan yang dianggap kurang.

4.3.3. Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan adalah ” *Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2028*” (Dokumen RZWP-3-K Sulsel). Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau

kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan serta menjamin kepentingan umum secara luas, maka dibutuhkan adanya penataan ruang laut yang bertujuan agar wilayah laut dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Faktor pertumbuhan penduduk dan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara terus menerus menyebabkan wilayah laut dan pesisir memerlukan pengelolaan, perlindungan terhadap sumber daya alamnya dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya untuk keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalkan kepentingan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat)

Dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan jasa-jasa kelautan, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan.

Kegiatan APBD

- ✦ **Program** : **Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
- A. Kegiatan** : **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
- Sub Kegiatan** : **Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
- 1. **Sarana dan Prasarana Usaha Garam**
 - A. Geomembran**
 - **Pagu Kegiatan** : Rp. 46.000.000,-
 - **Realisasi Keuangan** : Rp. 42.013.500,- (91,33%)
 - Pelaksanaan kegiatan di bulan November - Desember 2025 di Kabupaten Pangkep
 - Keluaran dari kegiatan adanya bantuan Geomembran 10 (Sepuluh) rol kepada kelompok usaha garam Merdeka / Kab. Pangkep.
 - Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas produksi usaha garam rakyat yang memiliki daya saing tinggi.

- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai jual tinggi.



B. Revitalisasi Gudang Garam

■ Pagu Kegiatan : Rp. 175.000.000,-

■ Realisasi Keuangan : Rp. 169.378.000,- (96,79%)

- Pelaksanaan Kegiatan pada bulan November - Desember 2025 di Kabupaten Jeneponto.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya kegiatan perencanaan, pengawasan dan Pembangunan 1 (Satu) unit Gudang Garam untuk kelompok Sinar Panaikang / Kab. Jeneponto.
- Hasil dari kegiatan ini adalah adanya dukungan dalam upaya peningkatan produksi garam rakyat/industri yang memberi jaminan persediaan dan harga garam.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi melalui dukungan gudang garam.



2. Koordinasi/Konsultasi/Identifikasi/Pelaksanaan/Monitoring/Pembinaan/Kedinasan Lainnya

■ Pagu Kegiatan : Rp. 11.902.800,-

■ Realisasi Keuangan : Rp. 6.906.000 (58,02%)

- Pelaksanaan Perjalanan pada bulan Januari - Agustus 2025, ke Kabupaten Jeneponto, Takalar dan Pangkep.

- Keluaran dari kegiatan adanya informasi dari kelompok yang diidentifikasi dan juga terverifikasi untuk dapat menerima bantuan dan adanya dukungan terhadap produksi usaha garam rakyat di Kab. Jeneponto, dan Pangkep.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam yang berkualitas dan bernilai tinggi.



B. Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan : *Pengelolaan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan*

1. Penerbitan Rekomendasi/Surat Keterangan/Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perijinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
 - Pagu Kegiatan : Rp. 204.400,-
 - Realisasi Keuangan : Rp. 204.400,- (100 %)
 - Pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari – Desember 2025 di Makassar.
 - Keluaran dari kegiatan ini adalah informasi terkait alokasi ruang pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041.
 - Hasil dari kegiatan ini adalah adanya informasi dan keterangan terkait lokasi usaha masyarakat/swasta/pemerintah di wilayah perairan. (0 – 12 mil dari garis pantai).
 - Manfaat kegiatan ini adalah tertatanya ruang laut dan terjaganya sumberdaya alam perairan yang menjamin pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.

C. Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan : *Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

1. Sosialisasi Mitigasi Bencana
 - Pagu Kegiatan : Rp. 230.000,-
 - Realisasi Keuangan : Rp. 230.000,- (100 %)

- Pelaksanaan kegiatan bulan November - Desember 2025 di Makassar.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya informasi terkait pentingnya upaya mitigasi untuk mencegah dan meminimalkan dampak dari bencana maupun perubahan iklim.
- Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran dan kualitas SDM terkait perlindungan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peran dalam perlindungan lingkungan
- Manfaat kegiatan ini adalah terjaganya sumberdaya alam perairan yang menjamin pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan terwujudnya ketahanan lingkungan dari ancaman bencana alam



Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

1. Konsultasi / koordinasi / menghadiri undangan kedinasan lainnya

- Pagu Kegiatan : Rp. 18.276.000,-
- Realisasi Keuangan : Rp. 18.076.000,- (98,91%)
- Pelaksanaan kegiatan dengan menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 15 – 17 Juli 2025 di Jakarta.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang mendukung implementasi kebijakan penataan ruang laut, yang sejalan dengan visi pembangunan ekonomi biru dan target Indonesia Emas 2045.
- Manfaat kegiatan ini adalah terjaganya sumberdaya alam perairan yang menjamin pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.



Sub Kegiatan : Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K

1. Penyusunan Dokumen Kelayakan Study (Feasibility Study) Reklamasi

- Pagu Kegiatan : Rp. 1.602.235.500,-
- Realisasi Keuangan : Rp. 1.559.439.000,- (97,33%)
 - Pelaksanaan kegiatan dan Penyusunan dokumen Feasibility Study pada bulan Juli – Desember 2025 di Kota Makassar.
 - Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya dokumen yang memberikan informasi hasil kajian Teknis dan Rekayasa, Lingkungan dan Sosial, Hukum dan Perizinan, Ekonomi dan Finansial, dan Kelayakan Lingkungan Reklamasi Pantai.
 - Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rekomendasi terkait rencana kegiatan reklamasi di perairan Untia Makassar dimana secara umum rencana reklamasi tersebut memiliki tingkat kelayakan yang memadai untuk dilaksanakan.



Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Penanaman Mangrove

- Pagu Kegiatan : Rp. 1.296.011.600,-
- Realisasi Keuangan : Rp. 1.213.657.540,- (93,65%)
 - Pelaksanaan kegiatan penanaman bibit mangrove pada bulan Juli – November 2025 yang terbagi di 7 (Tujuh) Lokasi yaitu Desa Mattirobombang (Pangkep), Desa Watang Suppa (Pinrang), Desa Padatuo (Bone), Desa Pallengu (Jeneponto), Desa Buntu Kamiri (luwu), Desa Mattirobaji (Takalar) dan Desa Bontobangun (Kepulauan Selayar). Bibit yang di tanam antara lain dari jenis *Rhizophora Stylosa*, *Rhizophora Mucronata* dan *Apiculata sp.* Adapun metode penanaman yang digunakan adalah 3 ajir dan 3 bibit yang masing-masing saling mengikat untuk menghindari bibit hanyut karena arus, dengan bantuan ajir dan tali pengikat bibit bisa aman dari gangguan arus. Bibit di ikat di dengan posisi ajir berada di luar bibit untuk melindungi bibit dari terisipan yang dapat membuat bibit mati dan berlubang. Pola tanam adalah baris rangkap dengan Jarak antara titik penanaman bibit adalah 0,5 meter.

- Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya penanaman mangrove sebanyak 249.233 bibit mangrove.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketahanan lingkungan yang memiliki peran sebagai mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta juga menjadi plasma nutfah bagi biota di darat maupun perairan.



2. Transplantasi Karang

- Pagu Kegiatan : Rp. 3.711.004.000,-
- Realisasi Keuangan : Rp. 3.146.934.000,- (84,80%)
- Pelaksanaan kegiatan Transplantasi Karang pada Bulan Juli – Desember 2025 yang terbagi di 8 (Delapan) Lokasi yaitu Desa Labuang dan Wiringtasi (Pinrang), Kelurahan Barrangcaddi (Makassar), Desa Bontorannu (Jeneponto), Desa Darubiah (Bulukumba), Desa Buhung Pitue (Sinjai), Desa Munte (Luwu Utara) dan Desa Harapan (Luwu Timur). Transplantasi karang dilakukan dengan cara pencangkakan bibit karang yang ditanam/ditempelkan pada media substrat berupa fragmen karang pada rangka *spider/reef star*. Pemasangan fragmen karang sebanyak 15-16 buah dalam 1 (satu) rangka *spider/reef star*.
- Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya penempatan Transplantasi Karang 7.334 unit spider dengan kedalaman 3 – 8 mdl.
- Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa rehabilitasi terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup di wilayah perairan dimana tersedianya substrat buatan bagi pertumbuhan karang secara alami dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



3. Apartemen Ikan

- Pagu Kegiatan : Rp. 8.251.860.000,-
- Realisasi Keuangan : Rp. 7.373,650.000,- (89,36%)

- Pelaksanaan kegiatan Apartemen Ikan pada Bulan Juli – Desember 2025 yang terbagi di 14 (Empat Belas) Lokasi yaitu Desa Tasiwaile (Pinrang), Desa Kupa dan Madello (Barru), Desa Mattirowalie (Pangkep), Kelurahan Sangkarrang dan Lae-Lae (Makassar), Desa Tompo Tanah (Takalar), Desa Pao (Jeneponto), Desa Borongloe (Bantaeng), Desa Lembanna (Bulukumba), Desa Padaelo (Sinjai), Desa Bontolebang (Kepulauan Selayar), Kelurahan Takkalala (Palopo) dan Desa Harapan (Luwu Timur). Jumlah pengadaan P.embangunan Apartemen Ikan sebanyak 1.657 set. Susunan submodul apartemen ikan terdiri dari 4 tingkat. Satu modul apartemen ikan terdiri dari 4 susunan sub modul apartemen ikan, dimana modul tersebut akan disusun menjadi 1 koloni apartemen ikan yang terdiri dari 5 modul apartemen ikan. Pemberat Apartemen Ikan terbuat dari pemberat kotak beton dengan ukuran minimal 30 cm x 30 cm x 15 s/d 20 cm. Pemasangan dilakukan di kedalaman 8 – 16 mdl.
- Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya penempatan Apartemen Ikan sebanyak 1.657 Set.
- Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa pemasangan apartemen ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup di wilayah perairan yang mendukung tersedianya substrat buatan bagi pertumbuhan karang secara alami sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



4. Identifikasi/Pelaksanaan/Monitoring/Penanaman Mangrove/Apartemen Ikan/ Koordinasi Lainnya

■ Pagu Kegiatan : Rp. 83.499.400,-

■ Realisasi Keuangan : Rp. 81.525.800,- (97,64%)

- Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bulan Mei – November 2025 di Kab/Kota. Pinrang, Barru, Pangkep, Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulikumba Sinjai, Kepulauan Selayar, Bone, Luwu. Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur.
- Keluaran dari kegiatan terlaksananya kegiatan perjalanan Identifikasi/Pelaksanaan/Monitoring/Penanaman Mangrove / Apartemen Ikan ke kabupaten/kota Lokasi penanaman mangrove dan penempatan Apartemen Ikan.
- Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penanaman mangrove, pengadaan dan penempatan Apartemen Ikan sesuai dengan acuan kerja yang telah ditentukan.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah semakin meningkatnya ketahanan lingkungan dan teersedianya daerah penangkapan ikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

3.1. Permasalahan

- Adanya kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan realisasi keuangannya karena tidak adanya dokumen pendukung (Administrasi yang tidak lengkap).
- Adanya kendala dalam proses pencairan yang disebabkan kurangnya SDM di bagian keuangan serta lambatnya penyediaan dokumen administrasi kegiatan oleh pelaksana kegiatan yang menghambat proses pencairan.

3.2. Upaya Pemecahan

Dalam memaksimalkan pencapaian target program kerja yang telah di rencanakan, beberapa upaya pemecahan permasalahan yang dilaksanakan antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dalam upaya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pogram kegiatan dan strategi penyelesaian masalah yang terjadi/akan terjadi.
- Memaksimalkan SDM untuk proses administrasi untuk meningkatkan realisasi kegiatan dan keuangan.

4.3.4. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan-DKP Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memberikan solusi melalui tugas pokok dan fungsi teknis yang diemban selama tahun 2025. Bidang ini bertanggung jawab melaksanakan program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan lebih khusus lagi melaksanakan kegiatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, serta kegiatan Pengawasan sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya, yang bebabankan oleh organisasi (DKP Provinsi Sulsel). Pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung peningkatan peran dan kemampuan operasional aparat pengawasan di bidang perikanan agar dapat mewujudkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Beberapa permasalahan penting yang masih dijumpai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya adalah minimnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya; minimnya ketaatan dan kesadaran hukum para pelaku usaha; minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan dan plestarian; maraknya peraktek *destructive fishing*, penangkapan ikan secara berlebih (*over fishing*), pencemaran perairan dan pembuangan limbah

secara *illegal*, *degradasi* habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuari); minimnya peran kelembagaan pengawasan di daerah serta lemahnya koordinasi dan kerjasama pengawasan serta penegakan hukum di daerah.

Pelaksanaan kegiatan dalam program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 masih menyisahkan beberapa permasalahan *destruktive fishing* dan *illegal fishing* yang kini telah menjadi isu nasional yang menimbulkan kerugian negara atau pemerintah. Kondisi tersebut tentunya melegitimasi pemerintah daerah provinsi akan pentingnya pelaksanaan tugas dan peran dalam seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan sebagaimana diamanatkan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004, serta UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Mengakhiri pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan tahun 2025, terdapat beberapa rencana program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan akan menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2029.

Salah satu bentuk keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan oleh Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025, diantaranya adalah : 1) Meningkatnya jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Meningkatnya jumlah aparaturnya pengawasan perikanan dan kemampuan teknis SDM aparaturnya dalam peran pengawasan dan penegakan hukum; 3) Terdatanya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Kegiatan APBD

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/9172/X/BKAD, Tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.50.0000.001.2025 Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi / persetujuan anggaran untuk pelaksanaan program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 125.703.800,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta, Tujuh Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Program tersebut dengan nomor kode (3.25.05) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mill (Nomor Kode : 3.25.05.1.01) dengan jumlah alokasi anggaran pada masing masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Daerah (3.25.05.1.01.018) dengan jumlah anggaran Rp. 3.760.000,-; telah menyerap anggaran dengan presentase realisasi keuangan sebesar 98,86% dan realisaasi fisik 100%.
 - b. Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Kewenangan Provinsi (3.25.05.1.01.16) dengan jumlah anggaran Rp. 28.496.000,-; telah menyerap anggaran dengan presentase realisasi keuangan sebesar 99,16% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - c. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 mill Sesuai Kewenangan Provinsi (3.25.05.1.01.13) dengan jumlah anggaran Rp. 27.721.200,-; telah menyerap anggaran dengan presentase realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kode kegiatan (3.25.05.1.01.17) dengan jumlah anggaran pokok sebesar Rp. 18.345.000,- telah menyerap anggaran dengan presentase realisasi 99,18% dan realisasi fisik 100%.
2. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya, (Nomor Kode : 3.25.05.1.02) dengan jumlah alokasi anggaran pada masing masing sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengawasan usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (3.25.05.1.02.05) dengan jumlah anggaran Rp. 23.403.600,-; telah menyerap anggaran dengan presentase 72,70% dengan realisasi fisik 72,91%.
 - b. Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya (3.25.05.1.02.06) dengan jumlah anggaran Rp. 11.272.800,-; telah menyerap anggaran dengan presentase realisasi keuangan sebesar 82,85 % dengan realisasi fisik 83,03%
 - c. Pengawasan usaha pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi (3.25.05.1.02.04) dengan jumlah anggaran Rp. 12.625.200,-, menyerap anggaran dengan presentase realisasi keuangan sebesar 86,65% dan realisasi fisik 92,75%.

Rincian jumlah anggaran biaya sebagai input pelaksanaan per-kegiatan seperti tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mill

1. Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Daerah

a. Zoom meeting Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Daerah

- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 November 2025
- Hasil yang dicapai :
 - ✓ Sejak UU Cipta Kerja, ada pengenalan pidana, sanksi administrative, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena sekarang rezim UU Cipta Kerja, jadi pidana merupakan langkah akhir. Sudah dibagi pengenalan pidana dan sanksi. Ada pasal di UU Perikanan yang tadinya adalah pidana, diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi sanksi administrasi. Di pasal 27 UU CK tidak ditemukan adanya amanat sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Tadinya kita selalu menyidik pelaku lapangan, tapi sekarang, kita bisa langsung ke siapa yang menerima manfaat pertama dan korporasi. Penyidik perikanan sekerang punya kewenangan menyidik dalam pencucian uang, kita sudah kerja sama dengan KPK untuk TPPU di perikanan. Kasus pemalsuan dokumen perikanan merupakan pidana, ini pernah ada kasus di Jawa Tengah, Pati dan Tegal. Saat ini mungkin kita belum terbiasa dengan alat bukti elektronik, penyidik harus update terus, karena penjahat lebih pintar. Contohnya penyidikan M.V Run Zheng. Perbuatan yang dapat langsung dikenakan sanksi pidana: destructive fishing, pemalsuan perizinan berusaha, penangkapan ikan berbendera asing, produk perikanan illegal keluar masuk, setiap kegiatan yang menimbulkan kecelakaan itu pidana, misalnya kegiatan budidaya yang menimbulkan keracunan.
 - ✓ Strategi yang dilakukan Ditjen Perikanan Budidaya untuk mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan antara lain melalui a) revitalisasi dan pemodelan sistem perikanan budidaya, b) pembangunan Kampung Perikanan Budidaya, c) pengembangan bahan pakan berbasis local, d) peningkatan produksi, nilai produk dan akses pasar untuk 5 komoditas unggulan udang, rumput laut, nila, lobster, kepiting, e) pengembangan Pusat Induk Ikan (Broodstock Center) dan peningkatan sektor hilir (coldstorage dan unit pengolahan ikan), dan f) penguatan sumber daya manusia, regulasi, dan pengawasan
 - ✓ Penerapan sanksi administrasi ada beberapa tingkatan. Peringatan tertulis apabila baru pertama melakukan, belum ada kerugian negara, atau masih sedikit/kecil, maka dibina. Kedua, penghentian sementara kegiatan. Denda administrative. Pembekuan izin berusaha, bisa dilakukan oleh kadis.

Denda administrasi itu bisa menambah uang negara dengan cepat. Sanksi administrasi itu bertahap: sp1, sp2, denda, pembekuan izin. Tapi bisa juga tidak bertahap, dan langsung denda. Ada pula kumulatif internal yaitu pelanggaran sekaligus. Kumulatif eksternal yaitu gabungan sanksi administrasi dan pelanggaran tindak pidana, ini yang paling sering.

- ✓ Penggunaan air laut juga sudah harus ada izin, seperti usaha budidaya yang menggunakan air laut. Pelanggaran yang paling banyak itu tidak memenuhi dokumen perizinan berusaha, yang dikatakan pidana yaitu yang tidak memiliki dokumen perizinan berusaha sama sekali. Modus di lapangan yang perlu kita waspadai.
- ✓ Sinergi pengawasan laut, tni al, polri, bakamla, bea cukai, daerah. Karena kita dibatasi oleh kewenangan. Forum koordinasi adalah forum yang cukup bagus untuk kita. WPP 713 menjadi sasaran dari pulau jawa, karena nelayan di sana sudah padat sekali, sedangkan nelayan kita disini malah ke Papua sampai Australia. Maka perlu dievaluasi;



Dokumentasi Kegiatan Pertemuan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Daerah

2. Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kewenangan Provinsi

a. *Perjalanan Dinas Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Pesisir Turikale-Puntondo, Desa Laikang, Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar*

- Waktu Pelaksanaan : 24-25 April 2025
- Hasil yang dicapai :
- Perjalanan Dinas Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut dilakukan berdasarkan surat dari Kepala Cabang Dinas Kelautan Mamminasata, nomor 523/05/CDK.MMT, perihal Tindak Lanjut Pemanfaatan Ruang Laut terkait laporan masyarakat mengenai Petakan Tambak Rumput Laut di Pesisir Turikale-Puntondo, Desa Laikang, Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar, serta Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan No. 523/544/DKP Perihal Permohonan Penanganan Bersama Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut
- Dari hasil kunjungan lapangan, dapat dilaporkan bahwa terdapat bangunan berupa Petakan Tambak Rumput Laut yang tersebar di Pesisir Turikale-Puntondo Desa Laikang Kabupaten Takalar. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, yang juga

merupakan pemilik dari salah satu petakan, bahwa terdapat sekitar 10 petakan, yang kepemilikannya berbeda-beda.

- Beberapa diantara petakan yang terlihat, dibangun di atas lahan yang diduga sebelumnya merupakan lahan mangrove yang dikonversi menjadi tambak melalui penebangan. Adapun pembuatan lahan tambak dilakukan dengan menggunakan alat bantu Excavator. Selain itu, ditemukan pula bahwa pembuatan pematang atas petakan, beberapa diantaranya menggunakan rubble/pecahan terumbu karang.
- Tim kemudian melakukan pengambilan titik koordinat terhadap lahan tambak yang ditemukan menggunakan alat bantu drone dan Digital GPS. Selanjutnya akan dilakukan overlay terhadap peta garis pantai untuk memastikan bahwa bangunan yang ada memang berada di luar garis pantai.
- Setelah dilakukan analisa terkait lokasi pembangunan Tambak Rumput Laut tersebut, maka akan ditentukan langkah yang akan diambil selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Perjalanan Dinas Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Kabupaten Pangkep

- Waktu Pelaksanaan : 04-05 November 2025
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil diawali kunjungan ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Team diterima Langsung oleh Kepala Dinas (Amril, S.Pi,MT,MA). Kepala Dinas menjelaskan bahwa beberapa bulan belakangan ini terjadi konflik oleh pembudidaya rumput laut yang lokasi budidayanya mengganggu jalur pelayaran dan ada oknum yang melakukan pengkavlingan wilayah laut dan menyewakan lahan yang telah dikavling tersebut kepada nelayan pembudidaya. Menindak lanjuti hal tersebut telah melakukan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh:
 1. Kepala Kantor UPP Maccini Baji
 2. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pangkep
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pangkep

4. Polairud Resort Pangkep
 5. Camat Labakkang
 6. Lurah Pundata Baji
 7. Kabid Pengawasan Dinas Perikanan Pangkep
 8. Kabid Budidaya Dinas Perikanan Pangkep
 9. Penyuluh Perikanan Pundata Baji
 10. Pelaku Usaha Budidaya Rumput Laut.
- Hasil dari pertemuan bersama tersebut adalah kesepakatan untuk penata-kelolaan aktifitas budidaya rumput laut agar tidak mengganggu alur pelayaran yang ada. Tata kelola tersebut meliputi relokasi kawasan budidaya rumput laut ke tempat yang lebih sesuai dan tidak mengganggu alur pelayaran



c. Perjalanan Dinas Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Kota Parepare

- Waktu Pelaksanaan : 01-02 Desember 2025
 - Hasil yang dicapai :
- Setiap pemanfaatan ruang laut harus memiliki izin yang sesuai, seperti KKPRL dan izin reklamasi untuk kegiatan reklamasi. Perizinan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.
- Berkaitan hal tersebut diatas maka dilakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pengelolaan ruang laut di Kota Parepare, tim pengawasan mengunjungi lokasi pemanfaatan ruang laut di kecamatan Soreang kota parepare, lebih tepatnya titik lokasinya tidak jauh dari TPI/PPI Cempae, kami didampingi oleh beberapa staf Cabang Dinas Kelautan Ajattapareng.
- Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah bangunan beton yang dipergunakan oleh Komunitas Perendam/Perenang Teluk Cempae (KPTC) di desa watang soreang, kecamatan soreang. Bangunan tersebut berupa bangunan batu dengan panjang bangunan

kurang lebih 3 meter, lebar 3 meter. Lebar area yang dibeton kurang lebih mencapai 4 meter di luar dari fondasi batas pantai.

- Menurut pak Syukri Masse selaku ketua dari komunitas KPTC, bangunan ini digunakan oleh komunitas maupun masyarakat umum berupa ruang/kamar ganti sebagai sarana anggotanya untuk membersihkan diri dan berganti pakaian pada saat mereka selesai berendam atau berenang. Kegiatan berendam oleh komunitas maupun masyarakat umum ini bertujuan untuk pengobatan beberapa penyakit.
- Terkait ijin bangunan hal ini sudah dilaporkan ke kantor lurah, dan bahkan sudah di fasilitasi oleh anggota dewan bagian kelautan dan perikanan untuk bersurat ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan atau wilayah yuridiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Laut berdasarkan Kepdirjen PKRL no. 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
- Lokasi kedua yang dikunjungi adalah bangunan yang terbuat dari kayu dan beratap seng atau biasa disebut gazebo. Gazebo tersebut dibangun oleh masyarakat lokal yang tinggal dekat dari gazebo. Salah satu yang dikunjungi ada gazebo milik kios beringin.
- Kios beringin memiliki Gazebo sebanyak 3 petak, yang digunakan untuk tempat duduk bagi pelanggan kios beringin yang menginginkan tempat outdoor untuk menikmati hidangan dari kios tersebut
- Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pelaku usaha kios di sekitar gazebo, antara lain kemungkinan adanya pembuangan sampah di area pantai. Maka dari hasil pengamatan bahwa di sekitar lokasi gazebo masih terjaga kebersihannya yaitu tidak adanya terlihat sampah rumah tangga atau sampah dari aktivitas usaha (makan dan minum) yang dilakukan oleh pelanggan kios. Dan menurut mereka, bahwa pelataran yang mereka buat membantu fondasi pantai menjadi lebih kuat.
- Lokasi usaha di sekitar tanggul cempae sudah pernah menjadi isu kelautan dan perikanan terkait pemanfaatan ruang laut yaitu disekitar pesisir pantai. Dari hasil pengawasan benar bahwa mereka dalam hal ini masyarakat lokal melakukan aktivitas usaha di sekitar bibir pantai tanggul cempae. Selanjutnya dari hasil pengamatan kami

melakukan Analisa terkait lokasi usaha masyarakat lokal dengan bidang terkait yaitu bidang kelautan dan pesisir.



3. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 mill Sesuai Kewenangan Provinsi

Sosialisasi Pengelolaan Ruang Laut untuk Kegiatan Budidaya

- Waktu Pelaksanaan : 28 November 2025
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui zoom meeting yang diikuti oleh :
 - 1) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
 - 2) Balai penyuluh, riset dan sumberdaya Makassar
 - 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 4) Cabang Dinas Kelautan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5) Bidang Kelautan dan Pesisir DKP Prov. Sulsel
 - 6) Bidang Budidaya dan Daya Saing DKP Prov Sulsel
 - 7) Sub Bagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel
 - 8) Pelaku Usaha Budidaya Laut
- Tujuan kegiatan ini adalah :
 - 1) Memberikan pemahaman masyarakat pesisir dan pelaku usaha tentang kebijakan pengelolaan ruang laut untuk budidaya
 - 2) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha
- Terdapat 2 (dua) Pokmaswas aktif yang berada di Kota Parepare yaitu Pokmaswas Bagan Lolo dan Madecenge dengan jumlah anggota sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunya laporan pelaksanaan kegiatan zoom meeting Sosialisasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Budidaya, serta rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang laut untuk budidaya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai peraturan dan persyaratan perizinan dan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas izin usaha.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Kegiatan Budidaya

4. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas

■ **Rapat Koordinasi Pokmaswas Tingkat Provinsi**

- Waktu Pelaksanaan : 26 November 2025
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui zoom meeting yang diikuti oleh : Kepala Dinas Kabupaten/Kota se Sulsel, CDK Lingkup DKP Prov Sulsel, dan Pokmaswas Prov Sulsel.
- Narasumber dalam kegiatan ini adalah :
 - ✓ Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan judul materi Penguatan Pokmaswas: Strategi, Sinergi, dan Dukungan Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Partisipatif yang Efektif
 - ✓ Yayasan Flora dan Fauna Indonesia dengan judul materi Smart Patrol di Sulawesi Selatan : Mekanisme Digital dan Model Pendampingan untuk Pokmaswas Daerah
 - ✓ Kelompok Masyarakat Pengawas Barrang Lompo Kota Makassar sharing session Praktik Baik Pokmaswas Barrang Lompo untuk Menjaga Ekosistem dan Peningkatan
 - ✓ Yayasan Konservasi Laut Indonesia dengan judul materi Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Partisipatif.
- Tujuan dari kegiatan ini adalah : Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pokmaswas selama periode berjalan, meningkatkan koordinasi antar pokmaswas dan instansi terkait, dan, menyusun rekomendasi strategis untuk penguatan kapasitas dan peran Pokmaswas.

■ **Penilaian Pokmaswas aktif dan Keikutsertaan dalam Lomba Tingkat Provinsi/Nasional**

- Waktu Pelaksanaan : 24-25 April 2025
- Hasil yang dicapai :
- Desa Laikang terletak di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, desa ini terletak di pesisir pantai dengan luas wilayah 19,6 km
- Peran Pokmaswas di Desa Tanjung Laikang Kabupaten Takalar :
 1. Pengawasan sumber daya perikanan

- Mengawasi praktik ilegal seperti penggunaan bom, bius, dan alat tangkap merusak.
- Melaporkan aktivitas penangkapan yang melanggar aturan (misalnya di daerah larangan atau musim tertentu).
- 2. Perlindungan ekosistem pesisir
 - Menjaga kelestarian ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
 - Terlibat dalam rehabilitasi mangrove dan edukasi lingkungan di desa pesisir.
- 3. Kemitraan dengan aparat dan pemerintah
 - Menjadi mitra Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi Perairan, serta TNI AL dalam pengawasan lapangan.
 - Menerima pelatihan teknis dan sosialisasi hukum perikanan
- 4. Pemberdayaan masyarakat pesisir
 - Memberikan edukasi ke nelayan tentang alat tangkap ramah lingkungan dan aturan yang berlaku.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga laut agar hasil tangkapan berkelanjutan.
- 5. Pencegahan konflik pemanfaatan ruang laut
 - Menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta ketika ada rencana pemanfaatan kawasan (misalnya industri, tambak, pariwisata).
- Pokmaswas Tanjung Laikang merupakan pokmaswas yang cukup aktif bersinergi dengan pemerintah setempat dalam membantu penanaman mangrove dan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan termasuk penebangan mangrove dan *destructive fishing*. Selain kegiatan tersebut diatas, pokmaswas Tanjung Laikang juga berperan dalam membantu pengawasan budidaya rumput laut.
- Pokmaswas ini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Kab/Kota, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata, dan tenaga penyuluh perikanan. Selain itu, mereka juga secara konsisten mendapatkan pembinaan pokmaswas dan sosialisasi sistem pengawasan berbasis masyarakat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembinaan ini mencakup pembinaan teknis dan pembinaan kapasitas kelembagaan.
- Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Cabang Dinas Kelautan Mamminasata dan Pokmaswas Tanjung Laikang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Berprestasi sesuai Per Dijen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Per-DJPSDKP/2021.
- Berdasarkan dari kegiatan evaluasi penilaian pokmaswas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar maka dapat

disimpulkan bahwa Pokmaswas Tanjung Laikang dinilai aktif dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan di Kabupaten Takalar dan dapat diikutsertakan dalam kegiatan penilaian pokmaswas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan dukungan dan pendampingan dari Dinas Perikanan kab/kota dan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Mamminasata untuk melengkapi kriteria penilaian kelompok masyarakat sesuai Per Dijen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Per-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Berprestasi.



B. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi

- Sub kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pengadaan Test Kit Formalin isi 100 test dan Perjalanan Dinas Pengawasan Pemasaran Hasil Perikanan.
- Kegiatan pengadaan Test Kit Formalin tidak dapat direalisasikan karena anggaran yang tercantum dalam DPA lebih rendah dari harga di pasaran], sehingga tidak mencukupi untuk pengadaan kegiatan.

2. Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi

■ *Perjalanan Dinas Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Sesuai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Soppeng*

- Waktu Pelaksanaan : 05-07 November 2025
- Hasil yang dicapai :
- Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan dinas Perikanan Kabupaten Soppeng yang di terima oleh Bapak HISBULLAH, S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan, menerangkan bahwa Kabupaten Soppeng merupakan kawasan dataran tinggi sehingga usaha budidayanya adalah ikan air tawar.

- Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Titik Nol dan Sipatuo Sipatokkong telah memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha karena sudah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan NIB (Terlampir).
- Menurut Kabid Perikanan (Bapak Hisbullah) pada tahun 2025 terjadi penurunan produksi perikanan di Kabupaten Soppeng, disebabkan beberapa faktor yaitu :
 1. Faktor Ekologis
 - Fluktuasi luas danau ; perubahan iklim membuat membuat habitat ikan tidak stabil dan mengganggu siklus reproduksi
 - Dominasi tumbuhan air ; pada musim kemarau, sekitar 45% permukaan danau tertutup tumbuhan air. Hal ini menurunkan kadar oksigen terlarut, menghambat pergerakan ikan, dan memperburuk kualitas perairan
 - Sedimentasi dan degradasi lingkungan ; Sungai Walanae membawa sedimen ke danau, menyebabkan pendangkalan dan menurunkan daya dukung ekosistem. Pendangkalan mempersempit ruang hidup ikan dan mengurangi produktivitas perikanan
 2. Faktor Sosial Ekonomi
 - *Destructive Fishing*, Praktik penangkapan ikan dengan cara yang merusak (misalnya bahan kimia atau alat tidak ramah lingkungan) mengurangi populasi ikan secara drastis. Hal ini merugikan nelayan lokal dan mempercepat penurunan produksi.
 3. Faktor Teknis dan Biologi
 - Gangguan rantai trofik ; Penelitian menunjukkan struktur trofik ikan di Danau Tempe mengalami tekanan, sehingga transfer energi dalam ekosistem tidak berjalan optimal Akibatnya, populasi ikan tertentu menurun dan keseimbangan ekosistem terganggu (pertumbuhan ikan sapu sapu semakin meningkat, sehingga mengganggu produksi ikan air tawar lainnya seperti ikan Nila dan Ikan Mas)



3. Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Sesuai Kewenangan Provinsi

■ ***Perjalanan Dinas Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Sesuai Kewenangan Provinsi di Kabupaten Wajo***

- Waktu Pelaksanaan : 03-05 November 2025
- Hasil yang dicapai :
- Pengawasan Penangkapan ikan di PUD team didampingi oleh beberapa dari staf Dinas Perikanan Wajo Ibu Nengsih, Penyuluh Perikanan Ibu Arfah dan Ka.TPI Bapak Anwar Kepala .TPI Desa Salomenraleng Kecamatan Tempe Kab.Wajo. Adapun beberapa informasi disampaikan bahwa menurut data statistik Kab. Wajo tahun 2024 data produksi PUD sebanyak 34.723,5 ton sedangkan untuk Jan-Oktober 2025 data produksi perikanan sementara sampai triwulan III sebanyak 8,975,1 ton. Adapun Aktifitas. Alat tangkap digunakan Nelayan sehari-hari nelayan menggunakan jaring insang tetap , seser, alat tangkap anco. Adapun nelayan penangkap ikan tersebar di beberapa wilayah salah satunya di wilayah
- Obyek pengawasan penangkapan perikanan yang kami kunjungi yaitu Kelompok “ SIPAKATAU” di Ketuaui Bapak Hatta beralamat Kelurahan Salomenraleng Kec.Tempe yang beranggotakan 12 orang yang rata-rata nelayan tangkap. Kelompok ini melakukan penangkapan ikan di perairan Danau Tempe.dengan menggunakn kapal motor tempel 1 GT, dengan menggunakan alat tangkap jaring insang ukuran 5 cm rata-rata hasil tangkap 300-400 kg. Dan hasil tangkapan didaratkan di TPI 45 hanya sebagai persinggahan langsung di bawa ke pasar ato pengumpul ikan dengan jenis ikan seperti ikan nila, tawes, sepat siam dan patin. Pemenuhan perizinan kelompok ini belum memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP) , termasuk NIB sebagai salah satu persyaratan pelaku usaha terhadap kepatuhan perizinan berusaha berbasis resiko yang mengacu pada formulir Pengawasan Pelaku Usaha KBLI 03121 (standar Usaha Penangkapan Pisces di Perairan Darat).
- Disampaikan pula bahwa sebagian dari nelayan masih mendapati penggunaan alat tangkap illegal seperti penggunaan setrum ikan yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah perairan Danau Tempe.

- Selanjutnya Team melanjutkan kunjungan ke kelompok Penangkap Ikan ‘ MASSIDDI’ yang diketuai Bapak Muh. Yang berada di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Kelompok ini anngotakan 12 orang, yang mata pencaharin sebagai nelayan penangkap ikan. Alat tangkap yang digunakan jaring insang dengan ukuran mata jaring 5 inci dengan tangkap ikan patin dan ikan tawes rata-rata hasil tangkap 30 kg. Kelompok ini sama halnya dengan kelompok lainnya belum memiliki Ijin seperti NIB ato sejenisnya sebagai persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan karena menganggap merupakan nelayan kecil yang belum perlu untuk memiliki perijinan perikanan seperti NIB hanya pemahaman bahwa hanya bergabung menjadi kelompok kiranya dapat mengusulkan/ megharapkan bantuan sarana prasarana dari Pemerintah.



IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. PERMASALAHAN

Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Adapun permasalahan dapat disampaikan sebagai berikut :

- Belum optimal pelaksanaan pembinaan POKMASWAS di kabupaten/kota, terutama POKMASWAS yang berada di wilayah kepulauan yang disebabkan keterbatasan alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS.
- Sebagian Pokmaswas belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pengawasan SDKP secara mandiri sehingga masih berharap bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- Kurangnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga diperlukan sosialisasi peraturan dan pembinaan serta pendampingan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku.

B. UPAYA PEMECAHAN

- Diharapkan sinergitas antara bidang Pengawasan dan Cabang Dinas Kelautan guna mendukung program Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- Dibutuhkan dukungan penganggaran yang sesuai dengan ruang lingkup pengawasan guna mendukung kelancaran program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4.3.5. CDK BOSOWASI

Cabang Dinas Kelautan Bosowasi yang berkedudukan di kabupaten Bone pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Bosowasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, DKP Sulawesi Selatan Tahun 2025 salah satunya adalah kegiatan Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Flores . Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Yaitu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha dengan cara merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksploitasi habitat laut yang dilindungi. *Destructive fishing* merupakan mall praktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Secara umum, maraknya kegiatan *destructive fishing* disebabkan oleh beberapa faktor : (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di laut, (3) Orientasi keuntungan jangka pendek secara maksimal, (4) Kemiskinan, (5) Posisi tawar industri lebih tinggi dari pada kepentingan pelestarian lingkungan, (6) Bahan handak dan zat kimia mudah di dapat dan tidak mengenal musim, (7) Kurangnya alternative alat tangkap yang produktif tapi ramah lingkungan, (8) Rendahnya penguasaan iptek dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan dan menguntungkan, (9) Masih lemahnya penegakan hukum, serta (10) Lemahnya koordinasi dan

komitmen antar aparat penegak hukum. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam peran pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah kab/kota Sulawesi Selatan. Pada dasarnya, prinsip dan kebijakan pengawasan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih tetap mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan, sosialisasi penyadaran dan penegakan hukum/ refressif. Semakin tinggi kesadaran dan ketaatan hukum para pelaku usaha maka penindakan/refressif akan menurun, dimana penindakan terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan merupakan upaya terakhir dalam kebijakan pengawasan SDKP Pemprov Sulawesi Selatan.

Hal tersebut diatas, merupakan acuan bagi Cabang Dinas Kelautan Bosowasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel dalam menyusun program kegiatannya dalam kurun waktu tahun anggaran 2022. Hal ini juga merupakan realisasi dari tupoksi CDK Bosowasi, sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tupoksinya, CDK Bosowasi melakukan beberapa program/kegiatan antara lain :

➤ **Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**

a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil

No	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi output Kegiatan
1	Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas) sebanyak 90 %	94,48 %
2	Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan sebanyak 250 dokumen kapal perikanan	290 dokumen kapal perikanan
	Uraian : Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, CDK Bosowasi	3 kali	3 Kali
	Uraian : Kegiatan Pemantauan ketaatan kapal perikanan, CDK Bosowasi	36 kali	36 kali

Sumber : Laporan Tahunan CDK Bosowasi tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan), Formulir DPA – OPD 2.2.1, Pemerintah Provinsi Sulsel TA 2025, yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan), Formulir DPPA – OPD 2.2.1, Pemerintah Provinsi Sulsel TA 2025, Cabang Dinas Kelautan Bosowasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulsel Tahun Anggaran 2025. Telah merealisasikan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (3.25.05) tersebut diatas yang didukung dengan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil dan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan tangkap Sampai dengan 12 Mill (3.25.05.1.01.02).

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan tangkap Sampai dengan 12 Mill (3.25.05.1.01.02) dilaksanakan dalam bentuk patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebanyak 3 kali disertai dengan kegiatan pemantauan ketaatan kapal perikanan sebanyak 36 kali, dan Kegiatan Fasilitasi NIB dan Kusuka.

Alokasi anggaran belanja kegiatan tersebut terdiri dari :

- 1) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Spesifikasi pertamax dan oli pelumas) dengan Kode Nomor Rekening (5.1.02.01.01.0004) dengan alokasi senilai Rp. 36.285.900. Secara keseluruhan jumlah realisasi keuangan pada belanja bahan bakar minyak dan pelumas sebesar 96,67 %. Nilai nominal realisasi keuangan belanja bahan bakar minyak dan pelumas Rp. 35.080.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Rupiah*).



- 2) Kegiatan Patroli Pengawasan SDKP, CDK Bosowasi dalam tahun anggaran 2025 dilaksanakan sebanyak 3 kali guna mendukung terwujudnya Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan tangkap Sampai dengan 12 Mil, dengan uraian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, CDK Bosowasi di wilayah perairan Tanete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko Kab. Bone dan Perairan Pulau Sembilan Kab.Sinjai Tanggal 27-28 Mei 2025. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 35 unit. Terdapat 31 unit kapal perikanan taat aturan (antara lain memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku) dan 4 unit kapal perikanan lainnya melanggar memiliki dokumen perizinan expayer / habis

masa berlakunya sehingga diberikan peringatan teguran/peringatan keras dan diperintahkan untuk memperpanjang dokumen perizinannya kepada pejabat yang berwenang. Berdasarkan hitungan aplikasi google map, Luas wilayah patroli pengawasan selama 2 hari mencapai sebesar 455,78 Km², dengan jarak tempuh lintasan patroli pengawasan selama 2 hari sejauh 191,22 Km, dengan Kecepatan Rata Rata Speedboat Kapal Pengawas Perikanan yaitu 27.60 Km/Jam.



- b) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah Perairan Kab Bone dan Perairan Kab. Wajo pada tanggal 24-25 Juni 2025. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 15 unit. Terdapat 11 unit kapal perikanan taat aturan, memiliki dokumen perizinan yang lengkap sah dan masih berlaku dan 4 unit kapal perikanan lainnya Diperintahkan kembali ke pelabuhan pangkalan dan menghadap pejabat di CDK Bosowasi karena menggunakan alat tangkap Trawls yang dilarang. Berdasarkan hitungan aplikasi google map, Luas wilayah patroli pengawasan selama 2 hari (10 Jam) mencapai sebesar 277,55 NM², dengan jarak tempuh lintasan patroli pengawasan selama 2 hari (10 Jam) sejauh 157,18 NM, dengan Kecepatan Rata Rata Speedboat Kapal Pengawas Perikanan yaitu 1,825 Km/Jam.



- c) Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Cdk Bosowasi di wilayah Perairan Tanete Riattang Timur, Barebbo, Tonra, Salomekko, Awangpone dan Kecamatan Tellu Siattinge pada tanggal 24-25 September 2025. Telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 9 unit. Terdapat 5 unit kapal perikanan taat aturan, dan masih berlaku dan 4 unit kapal perikanan lainnya melanggar (dokumen perizinan habis masa berlakunya sehingga diberikan peringatan peringatan dan diperintahkan kepada nakhoda untuk memperpanjang dokumen perizinan. Berdasarkan hitungan aplikasi google map, Luas wilayah patroli pengawasan selama 2 hari (10 Jam) mencapai sebesar 275,23 Km², dengan jarak tempuh lintasan patroli pengawasan selama 2

hari (10 Jam) sejauh 128,83 Km, dengan Kecepatan Rata Rata Speedboat Kapal Pengawas Perikanan yaitu 27.60 Km/Jam.



- d) Selain itu dilakukan pemantauan ketaatan kapal perikanan tiap bulan dengan memeriksa kapal perikanan dengan total pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 290 dokumen kapal perikanan



- 3). Belanja perjalanan dinas biasa dalam rangka pelaksanaan koordinasi / konsultasi / patroli pengawasan SDKP / pemantauan kapal / pembinaan / identifikasi / monitoring / Fasilitasi KUSUKA dan NIB/kedinasan, CDK Bosowasi dengan Kode Nomor Rekening (5.1.02.04.01.0001), telah dilaksanakn di wilayah CDK Bosowasi. Alokasi anggaran perdin senilai Rp.30.100.000,- (*Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah*). Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan juga sebesar 100 %. Nilai nominal realisasi keuangan adalah Rp 30.100.000,- (*Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk Patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemantauan ketaatan kapal perikanan dan kegiatan fasilitasi KUSUKA dan NIB, koordinasi pengawasan, pembinaan, penyelesaian konflik nelayan dan penugasan kedinasan lainnya di wilayah CDK Bosowasi (output) sebagai berikut :



Rapat Koordinasi dan tindaklanjut penanganan konflik kelompok nelayan antar daerah yang terjadi di perairan Kab Sinjai Tanggal 9 Januari 2025



Koordinasi Penegakan Hukum di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai Selaku Ahli dalam sidang pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan di Kantor Pengadilan Negeri Sinjai Januari 2025



Koordinasi Lanjutan Penanganan Konflik kelompok nelayan antar daerah yang terjadi di perairan Kab Sinjai Tanggal 10 Februari 2025



Kegiatan Sosialisasi dan Mediasi Konflik antara kelompok Nelayan dengan Kelompok Pembudidaya Kerang di wilayah pesisir Waetua, Tanete Riattang Timur Kab Bone



Memenuhi panggilan Subdit Polairud Polda Sulsel dalam rangka penerimaan limpahan kasus tindak pidana perikanan untuk pembinaan di CDK Bosowasi (Ultimum Remidium) Tanggal 4 September 2025



Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Nelayan Jaring Tarik Berkantong Sesuai Permen KP No.36/2023 di wilayah Pesisir Kah Bone



Koordinasi dengan PSDKP Sinjai Di PPI Lappa Kabupaten Sinjai



Kegiatan Fasilitas KUSUKA dan NIB

- 3) Pemeliharaan Speed boat/kapal pengawas perikanan KP Mangiwang 04 Kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkut Bermotor Lainnya Dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 99.968.000. realisasi fisik 100% keuangan sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah)



- 4) **Belanja personal computer Pengadaan Laptob dan Print**

Belanja personal computer (Laptop) untuk Fasilitas KUSUKA dan NIB Dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 15,900,000. realisasi fisik 100% keuangan sebesar Rp. 15,817,500 (Lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Belanja Modal Peralatan personal computer (Print) untuk Fasilitas KUSUKA dan NIB Dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 5.459,000. realisasi fisik 100% keuangan sebesar Rp. 5.333.550 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).



- 5) **Pengadaan ATK**

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer untuk Fasilitas KUSUKA dan NIB dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 111.000. realisasi fisik 100% keuangan sebesar Rp. 111.000. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover untuk Fasilitas KUSUKA dan NIB Dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 120,400. realisasi fisik 100% keuangan sebesar Rp. 120,400.

➤ **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi**

a. **Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil**

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Penanaman Mangrove**

Kegiatan Pemeliharaan Penanaman Mangrove Di Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yaitu kegiatan Pemeliharaan tanaman mangrove seluas 1 Ha dengan nilai nominal realisasi keuangan sebesar Rp. 9.804.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu rupiah) atau presentase realisasi keuangan mencapai 98,04 %, dan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan mangrove dan persentase keberhasilan penanaman mangrove



Kegiatan Pemeliharaan Mangrove di Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone



Pengecekan lokasi pemeliharaan Mangrove



Mencari lokasi MC o sekaligus melakukan penanaman di desa Pada Tuo, Kec. Tonra, Kab. Bone
Tanggal 3 September 2025

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

- 1) Tingkat kesadaran dan ketaatan pelaku usaha untuk melakukan penangkapan ikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perikanan akan semakin menurun bila mana para pelaku usaha jarang mendapat kunjungan pengawasan oleh aparat pengawas di lapangan.
- 2) Kehadiran armada kapal pengawas perikanan di Jalur I dan Jalur II untuk melakukan fungsi pengawasan SDKP akan berdampak positif terhadap ketaatan para pelaku usaha perikanan di perairan.
- 3) Terbatasnya biaya operasional pengawasan perikanan untuk dapat memenuhi frekuensi

pengawasan pada titik rawan destructive fishing di wilayah perairan pedalaman Bone, Wajo dan Sinjai.

- 4) Adanya sparepart mesin armada kapal pengawas yang mengalami penurunan fungsi sehingga tidak dapat dioptimalkan di lapangan.
- 5) Belum adanya penempatan atau penugasan personil selaku operator atau nakhoda kapal pengawas KP Mangiwang 04 CDK Bosowasi, selama ini dalam kegiatan patroli memakai staf CDK Bosowasi yang belajar secara otodidak

B. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil

- 1) Terjadinya peningkatan arus dan gelombang pada musim tertentu (Musim angin timur) yang mengakibatkan bibit mangrove yang sudah di tanam dapat mengalami gangguan titik tumbuh (Kematian)
- 2) Adanya binatang atau hewan yang menempel/ pada batang mangrove yang menyebabkan kematian pada tanaman mangrove
- 3) Masyarakat sering memanfaatkan ranting dan daun mangrove sebagai alat bantu penangkapan ikan (Rumpon)

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

- 1) Meningkatkan kunjungan pemantauan ketaatan kapal perikanan pada sentra perikanan tangkap di pelabuhan rakyat dan pelabuhan tangkahan.
- 2) Meningkatkan kunjungan Pembinaan, Sosialisasi dan Penyadaran Terhadap Pelaku Usaha di lapangan dan sentra- sentra nelayan perikanan tangkap.
- 3) Melakukan kerjasama penegakan hukum dengan aparat polairud untuk melaksanakan tindakan repressif terhadap pelaku destructive fishing yang membangkang aturan.
- 4) Usulan penempatan personel sebagai operator KP Mangiwang 04 CDK Bosowasi, sangat krusial karena menyangkut tanggung jawab organisasi pemerintah prov Sulsel dalam hal pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan regulasi keselamatan pelayaran dalam hal penunjukan atau penugasan personil operator selaku nakhoda pada kapal pemerintah atau kapal negara yang digunakan sebagai operasional kapal pengawas perikanan.

B. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama pengawasan bersama DKP Kabupaten, pemerintah desa, penyuluh perikanan, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat pesisir untuk pengawasan pertumbuhan hasil penanaman mangrove.

- 2) Perlu adanya pengkajian ulang penyebab kurangnya bibit mangrove yang tumbuh guna memberi solusi agar bibit hasil pertanaman baru dapat memiliki titik tumbuh yang baik dan tahan dari tekanan arus gelombang pasang.
- 3) Area yang sudah ditanami mangrove perlu di beri pelindung (Pemecah Ombak)
- 4) Perlu dilakukan pemeliharaan mangrove minimal satu kali setahun
- 5) Perlu dilakukan pembinaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pelestari di wilayah pesisir.

KESIMPULAN

- a. Secara umum Cabang Dinas kelautan Bosowasi telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh organisasi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan serta telah dapat memenuhi capaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
- b. Kegiatan Patroli Pengawasan SDKP CDK Bosowasi dengan Nomor Kode Rekening (5.1.02.01.01.0004) telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 36.285.900,- dan menyerap anggaran biaya dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.080.000,- (96,67 %), dan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Pelaksanaan Pengawasan SDKP telah dilaksanakan dalam bentuk patroli pengaswasan di laut (perairan pedalaman dan perairan kepulauan) selama 3 kali dan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan ketaatan kapal perikanan sebanyak 36 kali dengan memeriksa kapal perikanan sebanyak 290 unit, diantaranya terdapat sebanyak 274 unit kapal perikanan dinyatakan patuh dan taat hukum memiliki kelengkapan dokumen perizinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 16 unit kapal lainnya di berikan tindakan pemidanaan dan peringatan atau teguran karena melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak, tidak mengindahkan peringatan/teguran/ melawan petugas/tidak memilik atau tidak membawa SIPI/BPKP yang asli dan ada yang menggunakan Alat Tangkap yang dilarang.
- d. Total Luas wilayah perairan yang menjadi objek pengawasan melalui patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak 3 kali di wilayah perairan Bosowasi mencapai sebesar 1.008,56 Km² yang meliputi perairan Bone, Wajo dan Sinjai, dengan panjang jarak lintasan pengawasan sejauh 477,23 km.
- e. Selanjutnya dilakukan kegiatan pemantauan ketaatan kapal perikanan pada tiap

bulan/ triwulan sehingga total jumlah kapal perikanan yang menjadi objek pengawasan sebanyak 290 dokumen kapal perikanan.

- f. Secara statistic tingkat ketaatan atau kepatuhan pelaku usaha mematuhi tertib pelaksanaan usaha berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebesar 94,48 %. Dan selebihnya terdapat 5,52 % melakukan dugaan pelanggaran.
- g. Target Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melakukan pemeliharaan mangrove di Desa Pattiro Sompe Kec. Sibulue kabupaten Bone seluas 1 Ha telah tercapai 100%.

SARAN

- a. Pelaksanaan patroli pengawasan secara mandiri / insidental tetap perlu diintensifkan di daerah rawan *destructive fishing* khususnya di perairan pedalaman dan perairan kepulauan melalui porsi anggaran tersendiri guna mempersempit ruang gerak bagi para pelaku kejahatan tindak pidana perikanan.
- b. Pelaksanaan pemantauan ketaatan kapal perikanan perlu ditingkatkan secara rutin/berkala di beberapa sentra perikanan tangkap termasuk di pelabuhan rakyat, pelabuhan tangkahan dan diatas kapal perikanan, yang menjadi basis pangkalan kapal perikanan nelayan kecil di wilayah CDK Bosowasi.
- C. Perlu dukungan pimpinan melalui Bidang PSDKP untuk segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (Ditpolairud Polda Sulsel) untuk segera dapat dilakukan tindakan tegas terhadap para pelaku bom atau bahan peledak dan pengguna trawls dan/atau penggunaan alat tangkap yang merusak dan meresahkan masyarakat nelayan yang berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat nelayan di seluruh wilayah Cabang Dinas.

4.3.6. CDK MAMMINASATA

Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, petani ikan dan pengolah ikan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Oleh karena itu perlu perhatian terhadap kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Kebijakan pengawasan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan secara teratur, sistematis dan komprehensif yang ditempuh dengan mengacu kepada Rencana

Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 - 2028 serta Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2024 - 2028 yang pelaksanaannya dilakukan selama 5 tahunan.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018, tentang organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana salah satu Cabang Dinas Kelautan yang dibentuk adalah Cabang Dinas Kelautan Mamminasata yang berkedudukan di Kab. Gowa dengan wilayah pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar. Dengan ditetapkannya CDK Mamminasata sebagai organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal urusan pemerintah di bidang kelautan, maka pada tahun anggaran 2025 Cabang Dinas Kelautan Mamminasata dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.374.289.784,- untuk mendukung beberapa program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.003.321,-
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.290.000,-
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan teralokasikan anggaran sebesar Rp. 462.004.116,-

Adapun program yang dilaksanakan oleh CDK Mamminasata selama tahun 2025 antara lain :

➤ **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

■ **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil**

1. **Patroli Pengawasan SDKP**

Aktifitas ilegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing di Perairan wilayah Mamminasata masih cukup banyak dijumpai terutama alat tangkap Cantrang serta pengoperasian alat tangkap ilegal namun tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Hal ini menjadikan tugas kita bersama untuk menanggulangi atau paling tidak meminimalkan aktifitas yang bertentangan dengan aturan tersebut.

Kegiatan Patroli Pengawasan IUU Fishing CDK Mamminasata dan Fasilitasi NIB dan Penataan Pelaku Usaha merupakan salah satu kegiatan pokok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata yang bertujuan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan dokumen perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023 tentang Jalur Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat

Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Patroli Pengawasan IUU Fishing bertujuan untuk pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan kapal perikanan yang wajib dimiliki oleh kapal-kapal penangkap ikan seperti : Pas Besar/Kecil, Surat Ukur, SIUP, SIPI/SIKPI, TDKP, SLO dan SPB serta sosialisasi PERMEN-KP No.36 Tahun 2023 tentang Jalur Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Kegiatan Patroli Pengawasan IUU Fishing CDK Maminasata tahun anggaran 2024 dilaksanakan di wilayah perairan Makassar, Takalar dan Maros sampai bulan Desember dengan Jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 153 kapal dimana 12 kapal melakukan pelanggaran berupa dokumen SIUP/SIPI yang habis masa berlakunya dan sedang dalam proses masa pengurusan.



2. Fasilitas NIB dan Pendataan Pelaku Usaha

Kegiatan Fasilitas NIB dan Pendataan Pelaku Usaha berfungsi sebagai tempat fasilitasi nelayan dalam pengurusan dokumen tanda pengenalan pelaku usaha, baik perorangan dan non perorangan sebagai loyalitas awal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam hal kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik.

Bagi Perorangan sebelum mendaftar NIB pelaku usaha harus menyiapkan beberapa syarat dokumen antara lain : Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Alamat email yang aktif, Nomor telepon yang aktif.

Pengajuan izin usaha di masa lalu dikenal lama dan rumit, kini pendaftaran NIB melalui OSS memudahkan pengajuan izin sehingga prosesnya semakin cepat dan sangat mudah dalam menyimpan data perizinan dalam satu identitas. Jumlah data NIB yang difasilitasi CDK Mamminasata sebanyak 332 Data NIB diantaranya Kab. Takalar 82 Data NIB, Kab. Gowa 1 Data NIB dan Kota Makassar 249 Data NIB.



■ **Sub Kegiatan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi**

1. **BBM Patroli Pengawasan SDKP**

- ✓ Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas (BBM Pertamina) untuk kegiatan patroli Pengawasan SDKP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.750.000,- sampai bulan Desember realisasi fisik 99.98% (Rp. 64.740.000,-) dan realisasi keuangan Rp. 99.98% (Rp. 64.740.000,-)
- ✓ Belanja Pembayaran Utang 2024 Bahan Bakar dan Pelumas kegiatan Patroli Pengawasan SDKP dengan pagu Rp. 8.928.000,- sampai bulan Desember realisasi fisik 100 % (Rp. 8.928.000,-) dan realisasi keuangan 100 % (Rp. 8.928.000,-)

2. **Fasilitasi KUSUKA dan NIB**

- ✓ Belanja cetak brosur ukuran A5 2 sisi sebanyak 913 lembar dengan nilai pagu Rp. 1.826.000,- (Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak tersedia nya penyedia barang)
- ✓ Belanja kertas HVS A4 ukuran 75 Gsm sebanyak 5 rim dengan nilai Pagu Rp. 301.000,- (Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya penyedia barang)
- ✓ Belanja Tinta Printer warna/hitam no.664 uk 100ml sebanyak 5 buah dengan nilai pagu Rp. 555.000,- (Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya penyedia barang)

3. **Pemeliharaan Kapal Pengawas**

- ✓ Belanja Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan badan kapal, kelistrikan dan mesin 1 unit dengan nilai Pagu Rp. 50.000.616,- sampai bulan Desember realisasi fisik 96.63 % (Rp. 48.317.000,-) dan realisasi keuangan 96.63% (Rp.48.317.000,-).



4. Pengadaan Perahu POKMASWAS

- ✓ Belanja Pengadaan Perahu Pokmaswas Jagat Samudera Desa Mattiro Baji Kec. Kep.Tanakeke Kab.Takalar sebanyak 1 Unit dengan nilai Pagu Rp. 230.000.000,-
- ✓ Belanja Biaya Perencanaan Pengadaan Perahu Pokmaswas Jagat Samudera Desa Mattiro Baji Kec. Kep. Tanakeke Kab. Takalar sebanyak 1 dokumen dengan nilai pagu Rp. 6.338.500,- sampai Bulan Desember realisasi fisik 99.47 % (Rp. 6.304.000,-) dan realisasi keuangan 99.47% (Rp. 6.304.000,-)
- ✓ Belanja Biaya Pengawasan Pengadaan Perahu Pokmaswas Jagat Samudera Desa Mattiro Baji Kec. Kep. Tanakeke Kab. Takalar sebanyak 1 dokumen dengan nilai pagu Rp.5.259.000,- sampai Bulan Desember realisasi fisik 98.11% (Rp. 5.194.800,-) dan realisasi keuangan 98.11% (Rp.5.194.800,-)



5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- ✓ Belanja Uang Harian Dalam rangka Koordinasi/Konsultasi/Patroli Pengawasan/Pemantauan kapal /Fasilitas KUSUKA dan NIB Cabang Dinas Mamminasata dengan nilai pagu Rp. 51.600.000,- sampai dengan bulan Desember realisasi fisik 98.33% (Rp.50.740.000,-) dan realisasi keuangan 98.33% (Rp. 50.740.000,-)
- ✓ Belanja biaya transportasi Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Koordinasi/Konsultasi/Patroli pengawasan/Pemantauan kapal/Fasilitas KUSUKA dan NIB Cabang Dinas Mamminasata nilai Pagu Rp. 700.000,- sampai Bulan Desember Realisasi Fisik 0% dan Realisasi Keuangan 0%
- ✓ Belanja Pembayaran Utang Perjalanan Dinas Tahun 2024 1 paket nilai Pagu Rp. 41.710.000,- sampai Bulan Desember Realisasi Fisik 100% (Rp. 41.710.000,-) dan Realisasi Keuangan 100% (Rp. 41.710.000,-)

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2028". Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan.

Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan.

Luas wilayah pesisir dan laut Sulawesi Selatan kurang lebih 94.399,85 km² dengan panjang garis pantai sebesar 1.993,66 km serta memiliki pulau-pulau kecil sekitar 313 pulau. Khusus untuk wilayah Mamminasata total jumlah pulau 21 yang terbagi 9 pulau di kabupaten Takalar dan 12 pulau di Kota Makassar. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ekosistem yang cukup lengkap seperti ekosistem mangrove, dimana terdapat 19 spesies mangrove dengan luas sekitar 77.135 ha. Biomas hutan mangrove di wilayah Sulawesi diperkirakan berkisar 122 -245 ton/ha.

UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki wilayah pesisir wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang kemudian dilegalkan kedalam Peraturan Daerah (Perda). Penyusunan rencana Zonasi WP-3-K Provinsi merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk mengintegrasikan sektor yang berkepentingan di wilayah pesisir melalui pengalokasian ruang WP-3-K untuk aktivitas/sektor tertentu berdasarkan daya dukung dan kesesuaian peruntukkannya.

Secara normatif, kekayaan sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil dikuasai oleh negara. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hak untuk mengelola kawasan perairan yurisdiksi hingga batas 12 mil dari garis pantai. Terkait dengan pemanfaatannya, diperlukan suatu acuan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, yang mengatur atau mengarahkan kegiatan pengelolaan sumberdaya dalam konteks keruangan (spasial) untuk

menjaga keseimbangan antara aspek konservasi dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable*).

- a) Kegiatan ini merupakan upaya pengembangan terhadap pemanfaatan SDKP secara langsung di laut di Wilayah Perairan Mamminasata untuk pengelolaan konservasi secara berkelanjutan.
- b) Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menekan jumlah kerusakan pada wilayah pesisir

Adapun berdasarkan data Balai PDASRHL, data luas potensi mangrove di Sulawesi Selatan, yaitu 123.594,71 Ha dan luas eksisting mangrove wilayah Sulawesi Selatan seluas 12.256,90 Ha. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan dihuni oleh 19 spesies mangrove dengan cakupan vegetasi cukup luas. Propinsi Sulawesi Selatan memiliki areal hutan mangrove yang terluas di Pulau Sulawesi. Selain itu, pada wilayah yang berbatasan dengan laut, hutan mangrove didominasi oleh *Avicennia* dan *Sonneratia*. Di bagian belakang zona tersebut ditemui *Bruguiera* dan *Rhizophora*. Sedang pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan daratan ditemukan pandan, *Ficus*, *Nypa* dan biota lain yang menjadi ciri peralihan antara wilayah laut dan daratan. Biomas hutan mangrove di wilayah Sulawesi diperkirakan berkisar 122 - 245 ton/ha, walaupun dengan laju pembukaan lahan tambak dan pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan bakar dan lainnya dewasa ini diyakini tingkat penutupannya sudah jauh berkurang. Selain jenis-jenis ikan pemakan detritus, mangrove juga diketahui dihuni oleh kekerangan, udang, kepiting serta beberapa jenis burung dan fauna seperti tikus, babi dan kelelawar. Di wilayah mamminasata luas hutan mangrove untuk 3 daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Kabupaten	LuasMangrove	Kondisi(Ha)		
		Baik	Rusak	Rusak Berat
Makassar	236.2	62.2	131	43
Maros	746.3	298.3	-	448
Takalar	5.611.9	826.9	1316	3469

Sumber : Laporan Tahunan CDK Mamminasata Tahun 2025

a) Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

➤ Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Pemeliharaan Mangrove di Lantebung Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000, dengan realisasi fisik sampai bulan desember sudah mencapai 98.19% (Rp. 9.819.000,-) dengan realisasi keuangan sebesar 91.12% (Rp. 9.112.000),-



PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

1. PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pelaksanaan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Mamminasata akan semakin baik dengan tambahan armada kapal pengawas bagi pokmaswas yang tersebar di beberapa lokasi. Namun sampai saat ini proses pengadaan kapal pengawas mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan fisik kapal dan pengawasan belum berjalan. Proses Perencanaan Kapal pengawas, saat ini baru dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal inilah yang mempengaruhi sehingga pekerjaan fisik kapal pengawas dan dokumen pengawasannya belum dapat dilaksanakan.
- b. Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di wilayah Mamminasata belum dapat dilakukan pembinaan secara maksimal. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran biaya operasional untuk melakukan kunjungan pembinaan terhadap Kelompok Pengawas di wilayah pesisir atau pulau, khususnya di Kota Makassar, Takalar dan Maros.
- c. Masih rendahnya kemampuan SDM Pokmaswas dalam pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat, baik secara individual (keanggotaan) maupun secara berkelompok (kelembagaan).
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di daerah, serta minimnya ketaatan dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan, termasuk surat pencatatan atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) di daerah.

2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- a. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus menerus melakukan pembinaan, sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat nelayan di Wilayah Mamminasata guna menyamakan persepsi terhadap aturan penggunaan alat tangkap dan jalur penangkapan juga dalam upaya mendukung sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
- b. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata aktif melakukan koordinasi penegakan hukum dengan aparat Polairud Polda Sulsel guna koordinasi dan kerjasama dalam menegakkan aturan pemanfaatan alat tangkap dan pasal pidana tentang aktivitas pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan.

- c. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian sebagai mitra dan Pembina Pokmaswas agar dapat merepon dengan baik laporan kejadian yang disampaikan masyarakat.
- d. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Mamminasata terus berupaya melakukan pengawasan untuk meminimalisir tindak *andestructive fishing* di seluruh perairan pedalaman pesisir wilayah Mamminasata secara bertahap dengan menggunakan sarana Pokmaswas yang ada.
- e. Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas diprioritaskan terhadap Pokmaswas wilayah pesisir yang memiliki daerah rawan *destructive fishing*, dan/atau Pokmaswas yang memiliki partisipasi aktif melakukan pengawasan atau pelaporan kepada aparat pengawas perikanan.
- f. Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terus menerus melakukan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat pengawas dan masyarakat pelaku usaha lainnya di setiap waktu dan tempat termasuk di sentra-sentra nelayan, pelabuhan/PPI/TPI, di laut dan diatas kapal perikanan agar selalu taat hukum khususnya untuk memiliki dokumen perizinan usaha/BPKP.
- g. Penanggung Jawab Kegiatan harus lebih proaktif dalam mengkawal proses pengadaan barang / jasa agar proses pengadilan kapal pengawas dapat terselesaikan dengan baik.

4.3.7 CDK Ajatappareng

Cabang Dinas Kelautan dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 106 tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Cabang Dinas Kelautan ini dibentuk dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Di dalam pembentukannya untuk daerah Sulawesi Selatan dibentuk 5 Cabang Dinas Kelautan. Salah satu diantaranya adalah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Ajatappareng yang membawahi 5 (lima) kabupaten/Kota Yaitu : Kabupaten Barru, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang dengan berkedudukan di Kota Pare Pare. Adapun Fungsi dan tugas Cabang Dinas Kelautan diatur dalam Pergub no. 5 Tahun 2018. Untuk mendukung pencapaian target maka setiap Cabang Dinas Kelautan diberikan tugas yang intinya sebagai pengelola dan pengawasan perairan.

Sejak berdirinya pada tahun 2018 hingga sekarang, Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng Pembinaan telah berfungsi sebagai Cabang Dinas yang berwenang memberikan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan perairan di 5 (lima) kabupaten/kota sebagai wilayah kerjanya. Adapun wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng adalah Kabupaten Barru, Kota Pare Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang.

Dukungan dana dari APBD (*kinerja*) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 melalui program (1) Program Pengawasan, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir Laut, (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

➤ **APBD**

1. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Patroli, Fasilitasi NIB & Kusuka Wilayah Ajatappareng

■ **Patroli**

Patroli pengawasan dilaksanakan secara rutin dan terkoordinasi dengan menyasar wilayah perairan rawan pelanggaran serta pelaku usaha perikanan. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pengawasan telah menjangkau sebanyak 60 pelaku usaha, yang dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan perizinan, pemantauan alat tangkap yang digunakan, serta pengawasan terhadap metode penangkapan ikan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebanyak 48 pelaku usaha telah patuh terhadap ketentuan yang berlaku, baik dalam hal legalitas usaha, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, maupun kepatuhan terhadap zona dan waktu penangkapan. Terhadap pelaku usaha yang belum sepenuhnya patuh, CDK Ajatappareng telah melakukan pembinaan, teguran, serta penyampaian edukasi guna mencegah terjadinya pelanggaran berulang yang berpotensi merusak sumber daya kelautan.

1. Outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dalam rangka pencegahan *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing* tahun 2025 antara lain:
 - a. Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan, dengan 48 pelaku usaha telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan dan tidak melakukan praktik penangkapan ikan ilegal maupun destruktif.
 - b. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap dampak negatif *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing* terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan.
 - c. Berkurangnya potensi penggunaan alat tangkap ilegal dan metode penangkapan merusak, melalui pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan.
 - d. Terciptanya efek jera dan pencegahan dini, sehingga pelaku usaha lebih berhati-hati dan taat aturan dalam menjalankan aktivitas perikanan.
 - e. Tersedianya data hasil pengawasan lapangan, sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan.

2. Adapun dampak (impact) dari pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan ekosistem laut, khususnya dari ancaman *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing* di wilayah kerja CDK Ajatappareng.
 - Penguatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, melalui penegakan aturan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
 - Menurunnya potensi kerusakan habitat laut, seperti terumbu karang dan biota laut lainnya, akibat praktik penangkapan ikan yang merusak.
 - Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha yang patuh terhadap peran pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan.
 - Mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
 - Menjadi dasar penguatan pengawasan di tahun berikutnya, termasuk perencanaan patroli, pembinaan lanjutan, dan sinergi lintas sector.



■ **Fasilitasi NIB & Kusuka**

Pada tahun 2025, kami telah melaksanakan kegiatan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai bagian dari upaya peningkatan legalitas, pendataan, dan pemberdayaan pelaku usaha, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan fasilitasi ini dilakukan melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha, sosialisasi pentingnya legalitas usaha, serta asistensi dalam proses pendaftaran dan penginputan data pada sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sepanjang tahun 2025, telah berhasil difasilitasi penerbitan sebanyak 133 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 73 Kartu KUSUKA bagi pelaku usaha dan nelayan di wilayah kerja kami.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses legalitas usaha, meningkatkan kepatuhan administrasi, serta mendukung penguatan basis data pelaku usaha sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembinaan ke depan.

1. Outcome yang diperoleh dari pelaksanaan fasilitasi NIB dan KUSUKA tahun 2025 antara lain:
 - a. Meningkatnya legalitas dan kepastian usaha bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan KUSUKA, sehingga usaha yang dijalankan diakui secara resmi oleh negara.
 - b. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan administrasi usaha sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang berkelanjutan.
 - c. Meningkatnya akses pelaku usaha terhadap berbagai program pemerintah, seperti bantuan, pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha yang mensyaratkan kepemilikan NIB dan/atau KUSUKA.
 - d. Tersedianya data pelaku usaha kelautan dan perikanan yang lebih akurat dan terintegrasi, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
2. Dampak (impact) dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi NIB dan KUSUKA pada tahun 2025 antara lain:
 - a. Mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan nelayan, melalui terbukanya peluang akses terhadap permodalan, bantuan pemerintah, dan program pengembangan usaha.
 - b. Penguatan ekosistem usaha kelautan dan perikanan yang formal dan berdaya saing, sehingga pelaku usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.
 - c. Mendukung tertib administrasi dan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong formalitas usaha.
 - d. Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas usaha yang legal, produktif, dan tercatat secara resmi.
 - e. Menjadi fondasi bagi pengembangan program pembinaan lanjutan, baik dalam bentuk pelatihan, fasilitasi akses pasar, maupun peningkatan kapasitas usaha di tahun-tahun berikutnya.
 - f. Kegiatan meliputi sosialisasi dan pendampingan pendaftaran pelaku usaha/nelayan melalui sistem OSS dan KUSUKA. Hingga akhir periode pelaporan, target fasilitasi telah tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh meningkatnya

jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB dan KUSUKA. Serapan anggaran terealisasi secara proporsional dan efisien sesuai dengan capaian fisik serta ketentuan peraturan yang berlaku pada kegiatan Fasilitas KUSUKA dan NIB.



b. Pemeliharaan Kapal Pengawas (Mangiwang 02)

Kegiatan pemeliharaan Kapal Pengawas **Mangiwang 02** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku. Pemeliharaan meliputi pemeriksaan dan perbaikan mesin, Bodi kapal, system kelistrikan, serta perlengkapan keselamatan dan pendukung operasional lainnya. Dengan terlaksananya kegiatan pemeliharaan ini, Kapal Pengawas Mangiwang 02 berada dalam kondisi laik operasi dan siap digunakan untuk melaksanakan patroli pengawasan laut secara optimal.

Kesiapan operasional kapal pengawas tersebut mendukung pelaksanaan patroli laut dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Melalui patroli yang dilakukan, upaya pencegahan terhadap praktik **Illegal Fishing dan Destructive Fishing** dapat ditingkatkan, sehingga tercipta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan tertib, kegiatan ini memiliki output, outcome, dan impact sebagai berikut

1. Output yang diperoleh dari pelaksanaan pemeliharaan kapal pengawas tahun 2025 antara lain sebagai berikut :
 - a. Kapal Pengawas Mangiwang 02 dalam kondisi siap operasi dan laik laut
 - b. Sistem mesin, sistem kelistrikan, dan keselamatan kapal berfungsi dengan baik
 - c. Tersedianya sarana pengawasan laut yang baik untuk pelaksanaan patroli
2. Outcome yang diperoleh dari pelaksanaan pemeliharaan kapal pengawas tahun 2025 antara lain sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya intensitas dan efektivitas patroli pengawasan laut
 - b. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan nelayan terhadap peraturan perikanan
 - c. Berkurangnya potensi dan praktik Illegal Fishing dan Destructive Fishing

3. Impact yang diperoleh dari pelaksanaan pemeliharaan kapal pengawas tahun 2025 antara lain sebagai berikut :
 - a. Terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
 - b. Meningkatnya keberlanjutan ekosistem laut dan hasil perikanan
 - c. Terwujudnya pengelolaan wilayah perairan yang aman, tertib, dan berkelanjutan



c. Pengadaan Laptop dan Printer Portable

Kegiatan pengadaan laptop dan printer portable untuk mendukung fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sarana pendukung ini digunakan dalam kegiatan pendampingan dan pelayanan langsung kepada pelaku usaha dan nelayan, baik di kantor maupun di lapangan. Dengan tersedianya laptop dan printer portable, proses pendaftaran, verifikasi data, serta pencetakan dokumen NIB dan KUSUKA dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien.



2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a) Pemeliharaan Penanaman Mangrove

Kegiatan pemeliharaan penanaman mangrove telah dilaksanakan di **Desa Marambombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang**. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penanaman mangrove sebelumnya guna memastikan tingkat keberhasilan tumbuh dan berkembangnya tanaman mangrove secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan **metode swakelola Tipe IV**, di mana pelaksana kegiatan adalah **Kelompok Usaha Bersama (KUB) Saroja**, yaitu kelompok pemerhati mangrove yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan teknis dalam pemeliharaan ekosistem mangrove. Keterlibatan KUB Saroja sebagai pelaksana utama menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan tanaman mangrove dari berbagai potensi gangguan, baik alami maupun aktivitas manusia.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan, KUB Saroja melakukan berbagai kegiatan antara lain **penyulaman terhadap bibit mangrove yang mati atau tidak tumbuh optimal, pembersihan sampah serta alga yang melekat pada bibit mangrove**, serta upaya pengamanan area tanam agar terhindar dari gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan mangrove. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara rutin dan terencana sehingga kondisi mangrove tetap terjaga dan mampu tumbuh dengan baik.

Dengan adanya pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh kelompok yang kompeten, diharapkan ekosistem mangrove di wilayah Marambombang dapat berkembang secara optimal serta memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini memiliki output, outcome dan impact sebagai berikut :

1. Output yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan mangrove antara lain sebagai berikut :
 - a. Mangrove yang ditanam terpelihara dengan baik dan memiliki tingkat kelangsungan hidup (survival rate) yang tinggi.
 - b. Bibit mangrove yang mati atau rusak telah diganti melalui kegiatan penyulaman.
 - c. Area penanaman mangrove bersih dari sampah dan alga yang dapat menghambat pertumbuhan.
 - d. Terlaksananya pemeliharaan mangrove oleh kelompok lokal yang berpengalaman dan berkompeten.
2. Outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan mangrove antara lain sebagai berikut :
 - a. Pertumbuhan mangrove menjadi lebih optimal dan merata di area penanaman.
 - b. Terjaganya ekosistem pesisir dari kerusakan akibat abrasi dan gangguan lingkungan lainnya.
 - c. Meningkatnya peran serta dan kapasitas kelompok masyarakat (KUB Saroja) dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

- d. Terciptanya kawasan mangrove yang lebih stabil dan berfungsi secara ekologis.
- 3. Impact yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan mangrove antara lain sebagai berikut :
 - a. Terbentuknya ekosistem mangrove yang sehat dan berkelanjutan di wilayah pesisir Kecamatan Suppa.
 - b. Berkurangnya potensi abrasi pantai dan meningkatnya perlindungan alami terhadap kawasan pesisir.
 - c. Meningkatnya keanekaragaman hayati pesisir sebagai habitat berbagai biota laut.
 - d. Memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi, termasuk peluang pengembangan ekowisata dan perikanan berkelanjutan.



3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng berada di bagian Sub Tata Usaha yang menurut Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan no. 3 Tahun 2018 yaitu Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian tata usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Cabang Dinas Kelautan, adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumberdaya Air dan Listrik dengan Jumlah Pagu Sebesar Rp. 14,000,314,- Realisasi Fisik 78.99 % Keuangan Sebesar Rp. 11,058,580 (78.99 %).
- b. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 72,300,000,- ini telah terealisasi dengan menyerap anggaran biaya realisasi keuangan dan fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya laporan administrasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 10.000.000 Realisasi Fisik dan keuangan Rp. 9,879,000,- (98,79%).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 3,138,500 Realisasi Fisik dan keuangan 3,100,000,- (98.77%).
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 14,736,600 Realisasi Fisik 93.69% Keuangan Sebesar Rp. 13,216,400 (89.68%).

4.3.8. CDK WILAYAH SELATAN

Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan memiliki tugas sebagai berikut : 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan; 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Wilayah perairan Sulsel sebagai bagian dari WPP 713 terdiri dari 4 daerah potensial penangkapan ikan yaitu perairan Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone dan Perairan Bali, dimana pada umumnya telah menjadi daerah tujuan penangkapan ikan para nelayan Sulsel secara turun temurun. Wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan yang meliputi kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, DKP Sulawesi Selatan Tahun 2025 salah satunya adalah kegiatan Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Flores . Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Yaitu kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha dengan cara merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida/pembusuan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta

eksploitasi habitat laut yang dilindungi. *Destruktive fishing* merupakan malpraktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Secara umum, maraknya kegiatan *destructive fishing* disebabkan oleh beberapa faktor : (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di laut, (3) Orientasi keuntungan jangka pendek secara maksimal, (4) Kemiskinan, (5) Posisi tawar industri lebih tinggi dari pada kepentingan pelestarian lingkungan, (6) Bahan handak dan zat kimia mudah di dapat dan tidak mengenal musim, (7) Kurangnya alternatif alat tangkap yang produktif tapi ramah lingkungan, (8) Rendahnya penguasaan iptek dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan dan menguntungkan, (9) Masih lemahnya penegakan hukum, serta (10) Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam peran pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah kab/kota Sulsel. Saat ini untuk wilayah selatan hanya memiliki tiga pulau yaitu Pulau Liukang Loe dan Pulau Kambing di Kabupaten Bulukumba dan Pulau Libukang di Kabupaten Jeneponto. Kedua pulau ini belum terkelola dengan maksimal, sehingga dengan keberadaan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan diharapkan kedepan nantinya ketiga pulau ini bisa menjadi daerah konservasi.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh CDK Wilayah Selatan berdasarkan Tupoksinya antara lain:

A. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

➤ Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/ Atau Usaha Pengangkutan Ikan Sampai Dengan 12 Mil Yang Diperiksa Kepatuhan nya Sesuai Kewenangan Provinsi

- Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan melaksanakan tugas patroli pengawasan pengelolaan SDK dan lingkungan berada di Wilayah Laut Flores yang merupakan jalur penangkapan ikan yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) 713 yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (sesuai Permen Kelautan dan Perikanan No.71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
- Kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi/ patrol pengawasan/ pemantauan kapal/ pembinaan/ monitoring/ fasilitasi KUSUKA dan NIB/ kedinasan lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.29.940.000 dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.29.240.000 (97,66 %).

- Kegiatan pengadaan BBM Pertamina untuk Patroli Pengawasan SDKP dengan jumlah anggaran sebesar Rp.29.785.000 dengan realisasi fisik 33,33 % dan realisasi keuangan Rp.9.696.000 (33,33 %). Penggunaan BBM yang direncanakan sebanyak 3 kali patroli hanya bisa dimanfaatkan sebanyak 1 kali. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi mesin KM. Mangiwang 06 lagi bermasalah dan mengingat akhir tahun kondisi cuaca di Laut Flores tidak bagus dan kalau dipaksakan akan berakibat fatal bagi kapal dan personil yang bertugas, maka diambil keputusan untuk tidak melaksanakan sisa kegiatan ini



➔ **Perencanaan Perahu Pokmaswas Sipakatutu Kabupaten Jeneponto**

Kegiatan Perencanaan Perahu Pokmaswas Sipakatutu Kabupaten Jeneponto sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.6.338.500. (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang Biro Barjas, maka ditunjuk sebagai Konsultan Perencana adalah CV. Maleo Sinergi Indonesia dengan SPK nomor : 01/SPK/CDK-WILSEL/REVIU.PRC.PRH.POKMASWAS/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025. Jangka waktu pelaksanaan selama 10 (Sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 16 Juli 2025 s/d 26 Juli 2025. Nilai SPK sebesar Rp.6.327.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.6.327.000,- (99,82 %).

➔ **Kegiatan Pengadaan Perahu Motor POKMASWAS Sipakatutu Kabupaten Jeneponto**

Kegiatan pengadaan Perahu Pokmaswas Sipakatutu Kabupaten Jeneponto sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.230.000.000. (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Setelah dilakukan proses reviu oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Reviu PBJ pada Biro Barjas Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan proses seleksi rekanan melalui aplikasi Inaproc Versi 6 oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dari hasil seleksi ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Mitra Sukses Marine dengan Surat Pesanan nomor : EP-01K4XN1WK1HPQFKBQ1MN1WTKH7 tanggal 12 September 2025. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 12 September 2025 s/d 10 Desember 2025. Nilai SP sebesar Rp.214.163.400,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan

realisasi keuangan sebesar Rp.Rp. 214.163.400,- (93,11 %). Adapun spesifikasi Perahu Pokmaswas Garuda Bahari Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

1. Panjang LOA : 7,50 M
2. Lebar B : 1,80 M
3. Tinggi H : 0,80 M
4. Sarat T : 0,40 M
5. Bahan : FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)
6. Perlengkapan Geladak meliputi Bolder Stainless Steel 2' (ukuran 11 x 11 cm) 1 Set, Hand Railing Stainlees Steel Dia. 3/4' 2 Set, Railing Haluan Stainlees Steel Dia. 3/4' 1 Set, Cleats Stainless Steel 4' 4 Buah, Tali Jangkar & Tali Tambat dia. 10 mm 10 Kg, Tali Lempar dia. 6 mm 4 Kg, Jangkar 10 Kg 1 Unit.
7. Perlengkapan Permesinan meliputi Mesin induk out board 40 PK (Type E40JWL) 1 Unit, Handle control speed dan cable control 1 Set, Battery 12 V - 100 AH 1 Unit, Kemudi Rotary (well helm) dan assesories 1 Set
8. Sistem Kelistrikan, Perpipaan dan Pompa-Pompa meliputi Pipa & Sistem Pipa Bahan Bakar 1 Set, Pompa Bilga DC 12 volt / 2000 GPH 1 Unit, Kabel Listrik (Marine Use) & Asesoris 1 LS, Solar Cell 50 Watt + Asoseries 1 Set, Lampu Interior Merine Use 2 Buah, Lampu Navigasi 4' - CXH4-21P 4 Buah, Lampu Sorot Halogen LED 50 Watt 1 Buah.
9. Alat keselamatan dan navigasi meliputi life jacket 12 unit, lifebuoy 1 buah, portable fire estinguisher 2 kg 1 buah, bendera nasional 1 buah, kotak P3K 1 LS, kompas 1 buah, toolkit box 1 set, horm 1 buah, lampu rotary 1 buah, teropong 1 buah, damprah ban bekas + tali 4 Set, GPS Portable 1 unit, handy talky 2 unit.

Dalam pelaksanaan pembuatan Perahu Pokmaswas Sipkatutu Kabupaten Jeneponto melibatkan Tim Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Dilibatkannya Tim Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas diharapkan perahu yang dibuat oleh rekanan dapat sesuai dengan spesifikasi teknis yang diharapkan, sehingga pada nantinya bisa dimanfaatkan oleh kelompok dengan baik tanpa ada kendala di lapangan.





➤ **Pengawasan Perahu Pokmaswas Sipkatutu Kabupaten Jeneponto**

Kegiatan Pengawasan Perahu Pokmaswas Sipkatutu Kabupaten Jeneponto sebanyak 1 dokumen dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.5.295.000. (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Setelah dilakukan proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang Biro Barjas, maka ditunjuk sebagai Konsultan Pengawasan adalah CV. Gradasi Garis Arsitekno dengan SPK nomor : 01/SPK/CDK-WILSEL/PGWS.PRH.POKMASWAS/IX/2025 tanggal 12 September 2025. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 12 September 2025 s/d 10 Desember 2025. Nilai SPK sebesar Rp.5.050.000,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.050.000,- (95,37 %).

➤ **Pemeliharaan Speedboat/ Kapal Pengawas KM. Mangiwang 06**

Kegiatan Pemeliharaan Speedboat/ Kapal Pengawas KM. Mangiwang 06 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi fisik 0 % dan realisasi keuangan Rp. 0 (0 %). Kegiatan ini batal dilaksanakan disebabkan pada proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan barang Biro Barjas, rekanan tidak memasukkan penawaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Karena sistem aplikasi sudah ditutup oleh pejabat pengadaan maka harus dilakukan proses ulang dengan mengganti usulan rekanan lain. Dengan pertimbangan proses seleksi dan pelaksanaan tidak memungkinkan lagi karena sudah berada di Bulan Desember 2025, maka diputuskan untuk tidak dilaksanakan kegiatan ini.

➤ **Pengadaan Laptop Fasilitas KUSUKA dan NIB**

Kegiatan pengadaan Laptop Fasilitas KUSUKA dan NIB sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.15.900.000. (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah dilakukan proses reviu oleh PBJ pada Biro Barjas Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan proses seleksi rekanan melalui aplikasi Inaproc Versi 6 oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dari hasil seleksi ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Putri Aliyah Herlang dengan Surat Pesanan nomor : EP-01KAYRo8FYD1KQJ8DWJA4So393 tanggal 26 Nopember 2025. Jangka waktu pelaksanaan selama 3 (Tiga) hari kalender dimulai dari tanggal 26 Nopember 2025 s/d 28 Nopember 2025. Nilai SP sebesar Rp.15.784.200,- (Lima Belas Juta

Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.Rp. 15.784.200,- (99,27 %).

➔ **Pengadaan Printer Fasilitas KUSUKA dan NIB**

Kegiatan pengadaan Printer Fasilitas KUSUKA dan NIB sebanyak 1 unit dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.5.459.000. (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Setelah dilakukan proses revidi oleh PBJ pada Biro Barjas Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan proses seleksi rekanan melalui aplikasi Inaproc Versi 6 oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dari hasil seleksi ditunjuk sebagai rekanan pengadaan adalah CV. Putri Aliyah Herlang dengan Surat Pesanan nomor : EP-01KAFWE6ZVGGEMH52SRV659YVB tanggal 24 Nopember 2025. Jangka waktu pelaksanaan selama 3 (Tiga) hari kalender dimulai dari tanggal 24 Nopember 2025 s/d 26 Nopember 2025. Nilai SP sebesar Rp.5.383.500,- (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.Rp. 5.383.500,- (98,62 %).

B. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

➔ **Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

➔ **Pemeliharaan Mangrove**

Kegiatan pemeliharaan mangrove dengan jumlah anggaran di DPA sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Realisasi fisik sebesar 0 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0 %). Kegiatan pemeliharaan mangrove yang direncanakan secara swakelola tipe 4 di Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba tidak dilaksanakan disebabkan sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen LS ke Subag Keuangan kegiatan belum berkontrak. Lambatnya RAB dari kelompok menjadi faktor tidak bisa dilaksanakan proses kontrak.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

1.1. PERMASALAHAN

- Kegiatan patroli pengawasan SDKP CDK Wilayah Selatan di Laut Flores untuk pengawasan illegal fishing dan destructive fishing tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya rencana refocusing serta faktor cuaca di laut yang kurang bagus untuk melaksanakan patroli.
- Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan gagalnya proses penunjukan langsung serta keterbatasan waktu pemasukan dokumen pada Bulan Desember 2025.

1.2. UPAYA PEMECAHAN

- Terkait dengan kegiatan patroli pengawasan SDKP CDK Wilayah Selatan yang tidak maksimal terlaksana pada Tahun 2025, akan tetap dianggarkan Tahun 2026 untuk tetap

menjaga laut di wilayah kerja CDK Wilayah Selatan dari kegiatan illegal fishing dan destructive fishing.

- Terkait kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diupayakan tetap diusulkan untuk Tahun 2026.

4.3.9. CDK Kepulauan Selayar

Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar memiliki tugas sebagai berikut :

- 1). Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- 2). Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- 3). Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya dan,
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait tugas dan fungsinya.

Hasil pelaksanaan tersebut selama kurung waktu 1 (Satu) Tahun Anggaran 2025 pada Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar yang terdiri dari :

1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- **Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi terlaksana sesuai dengan rencana yaitu Pemeliharaan Mangrove di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan anggaran Rp30.600.000,00 realisasi fisik 100% dengan Realisasi Keuangan Rp30.532.000 (99,78%).



2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

■ Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sampai Dengan 12 Mil

Hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Bahan Bakar Patroli Pengawasan

Belanja bahan bakar minyak (BBM) pertamax sebanyak 2821 Liter dengan anggaran Rp36.531.950,00 realisasi fisik 54,34% dan realisasi keuangan Rp19.840.000 (54,34%).

- Belanja Pemeliharaan Kapal Pengawas

Belanja uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 18 orang/hari dengan anggaran Rp7.740.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 0 %.

- Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

Belanja uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 74 orang/hari dengan anggaran Rp31.820.000,00 realisasi fisik 68,92% dan realisasi keuangan Rp21.930.000 (68,92%).

4.3.10. CDK Pangkajene dan Kepulauan

Pembangunan perikanan berkelanjutan (Sustainable Fisheries) harus berlangsung secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan. Upaya Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia Dilakukan melalui tiga pilar, yaitu Kedaulatan (Sovereignty) yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga Pilar ini dimaksudkan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan disulawesi selatan., namun sampai saat ini upaya tersebut dirasakan masih belum optimal, disamping karena keterbatasan sarana dan prasarana, penyebab lainnya adalah belum adanya pemahaman yang menyeluruh tentang aturan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk menjawab hal tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2018 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan yang lebih bersifat

Teknis dan operasional serta mandiri, hal ini dimaksudkan untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kelautan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah cabang dinas kelautan pangkajene dan kepulauan, Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan kepulauan mempunyai dua tugas utama yaitu pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penataan dan Pengelolaan kawasan perairan di wilayah Pangkajene dan Kepulauan.

I. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

A. Kegiatan Pengelolaan Ruang laut sampai dengan 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi meliputi:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan dan penyediaan sarana pendukung kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat kawasan konservasi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12.950.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp12.390.000,00 atau 95,68%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Sisa anggaran sebesar Rp560.000,00. Realisasi kegiatannya meliputi:
 - Pengadaan sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi perairan daerah, berupa papan bicara sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi perairan daerah



Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Sarana Informasi Papan Bicara di KKPD Pulau Sarappo

Monitoring pelaksanaan pengadaan sarana informasi berupa papan bicara di KKPD Pulau Sarappo bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta lokasi penempatan. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menilai efektivitas papan bicara sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat dan pengunjung terkait pengelolaan serta aturan di kawasan konservasi.

Kegiatan sinergi dan koordinasi lintas sektor dilaksanakan bersama dinas/instansi terkait, pemangku kepentingan, serta organisasi non-pemerintah (NGO) dalam rangka mendukung

pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar kegiatan minyak dan gas bumi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan peran masing-masing pihak agar pengelolaan ruang laut dapat berjalan efektif, terpadu, dan berkelanjutan.



Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor dengan Dinas/Instansi Terkait, Pemangku Kepentingan, Serta Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp16.770.000,00 digunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi keuangan dan fisik masing-masing mencapai 100%. Seluruh anggaran terealisasi dan tidak terdapat sisa anggaran.

II. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI 12 MIL

1. Belanja Barang Pakai Habis

Dialokasikan sebesar Rp41.964.800,00, dengan realisasi keuangan Rp39.216.000,00 atau 93,45%, serta realisasi fisik 96,28%. Belanja ini digunakan untuk mendukung operasional kegiatan patroli pengawasan, khususnya pengadaan bahan bakar dan pelumas. Kegiatan patroli pengawasan SDKP menggunakan BBM Pertamina dengan volume perencanaan 3.200 liter, terealisasi 3.120 liter, dengan realisasi keuangan Rp39.216.000,00 atau 94,63%.

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover .

Direncanakan melalui pengadaan alat tulis kantor berupa kertas HVS dan tinta printer untuk Fasilitas KUSUKA dan NIB yang mana belum terealisasi pada Tahun Anggaran 2025. Total anggaran sebesar Rp524.800,00 belum terealisasi dan menjadi sisa anggaran.

3. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Anggaran pemeliharaan kapal pengawas dialokasikan sebesar Rp125.000.985,00 untuk pemeliharaan badan kapal, kelistrikan, dan mesin. Namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, kegiatan ini belum terealisasi sehingga seluruh anggaran menjadi sisa karena masih sementara proses perlimpahan aset kapal dari Dinas Kesehatan ke Dinas Kelautan dan Perikanan dan belum ada persetujuan dari Kepala Daerah.

4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja perjalanan dinas dialokasikan sebesar Rp82.225.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp78.485.000,00 atau 95,45%, serta realisasi fisik 95,45%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka Koordinasi/Konsultasi/Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan/Pemantauan Kapal/Pembinaan/Monitoring/Fasilitasi Kusuka dan NIB sebesar Rp44.290.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 40.850.000 atau 92,23%. Selain itu terdapat realisasi pembayaran utang perjalanan dinas Tahun 2024 sebesar Rp37.235.000,00 yang terealisasi 100%.

Kegiatan koordinasi dan konsultasi dilaksanakan melalui Cabang Dinas Kelautan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dalam rangka mendukung pelaksanaan program kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut meliputi konsultasi teknis, pendampingan administrasi, serta koordinasi dengan pelaku usaha perikanan dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, kesesuaian data, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada nelayan.



Koordinasi dan Konsultasi

Patroli pengawasan sumber daya kelautan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di Perairan Desa Mattiro Dolangeng, Perairan Desa Mattiro Deceng, dan Perairan Desa Mattiro Bone, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam rangka mendukung pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan serta kepatuhan terhadap ketentuan perikanan yang berlaku



Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, telah dilaksanakan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 471 dokumen bagi nelayan yang berdomisili di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai bagian dari upaya peningkatan legalitas usaha dan tertib administrasi pelaku usaha perikanan.



Fasilitasi NIB

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, telah diterbitkan sebanyak 719 Kartu KUSUKA bagi nelayan yang berdomisili di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penerbitan kartu tersebut dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pendataan dan pelayanan penerbitan Kartu KUSUKA yang dilakukan secara bertahap dan terjadwal di berbagai pulau dan desa, sebagai upaya peningkatan tertib administrasi serta pemutakhiran data pelaku usaha perikanan subsektor penangkapan ikan.



Pembuatan Kartu Kusuka

Selain fasilitasi penerbitan Kartu KUSUKA, dilakukan pula pemantauan kapal perikanan melalui Cabang Dinas Kelautan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, verifikasi, dan koordinasi lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data kapal perikanan dengan data pelaku usaha, serta mendukung pengawasan dan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah kepulauan.



Pemantauan Kapal Perikanan

Pembinaan dan monitoring terkait kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil laut, meliputi kegiatan pendampingan, pemantauan, dan pengawasan terhadap aktivitas perikanan, guna mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Pembinaan dan Monitoring

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil laut, telah dilaksanakan sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan dinas/instansi terkait, pemangku kepentingan, serta organisasi non-pemerintah (NGO). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta mengoptimalkan peran masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan. Melalui kerja sama tersebut, dilakukan pertukaran informasi, penyelarasan program dan kegiatan, serta peningkatan dukungan teknis dan non-teknis guna mencegah dan menanggulangi potensi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan secara optimal dan berwawasan keberlanjutan.



PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2025, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, serta penataan dan pengelolaan kawasan perairan;
2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan, pengendalian, dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga belum sepenuhnya mampu menjangkau luasnya wilayah perairan kerja Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan;
3. Meningkatnya kompleksitas pemanfaatan ruang laut dan aktivitas perikanan pada wilayah kepulauan yang memerlukan intensitas pengawasan dan pengendalian yang lebih optimal.

B. UPAYA PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan dan direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Mendorong penambahan dan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi teknis sesuai kebutuhan tugas operasional, antara lain:
 - Petugas Pengawas Perikanan;
 - Petugas pemeriksa fisik kapal perikanan;
 - Personel yang memiliki kompetensi teknis konservasi, termasuk tenaga penyelam, dalam mendukung kegiatan pemantauan kondisi biofisik perairan.
2. Melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur terkait operasional pengawasan, pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, serta kegiatan konservasi;
3. Mengusulkan dan mengupayakan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, antara lain:
 - Peralatan selam;
 - Sarana transportasi operasional berupa kendaraan roda dua dan roda empat;
 - Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

4.3.11. CDK Luwu Raya

Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya memiliki tugas sebagai berikut : 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur; 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, dan; 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Menyikapi kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Luwu Raya, diperlukan peran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat selaku *stakeholder* dalam membantu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Keberadaan Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya untuk melaksanakan dua fungsi yaitu dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan serta bidang Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan di wilayah administrasi Luwu Raya yang mencakup sebagian perairan Teluk Bone.

Perairan Luwu Raya (Teluk Bone) yang merupakan bagian dari WPP-NRI 713 mencakup wilayah kerja pada enam kabupaten/kota antara lain Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya salah satunya adalah kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Kegiatan tersebut memprioritaskan penanganan/pengendalian *illegal fishing* dan *destructive fishing*. *Illegal fishing* dan *destructive fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan atau pelaku usaha perikanan dengan cara merusak sumber daya ikan dan lingkungannya seperti pengeboman ikan, penggunaan racun sianida/pembiusan dan penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* (pukat harimau) serta eksploitasi habitat laut yang dilindungi. *Destructive fishing* merupakan malpraktek dalam kegiatan penangkapan ikan yang secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

Selain kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya mempunyai tugas dalam hal penataan dan pengelolaan kawasan perairan di Luwu Raya. Salah satu contohnya adalah menata dan mengelola daerah konservasi. Kegiatan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan.

Hal tersebut di atas merupakan acuan bagi Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya dalam menyusun program kegiatannya dalam Tahun Anggaran 2024. Hal ini juga merupakan bagian dari tupoksi Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No.03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

➤ **HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN**

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Teluk Bone. Wilayah tersebut merupakan jalur penangkapan ikan yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 713, yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional tersebut, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil laut. Kegiatan ini mencakup subkegiatan pengawasan

usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil laut sesuai dengan kewenangan provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp221.494.000,00, realisasi fisik 30,13% dan realisasi keuangan Rp65.888.482,00 atau 29,74%.

Selama tahun anggaran 2025, telah dilakukan pelayanan dalam bidang pengawasan yang terdiri dari pemantauan atau penertiban pelaku usaha perikanan tangkap serta fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kartu KUSUKA bagi para pelaku usaha yang ada di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya. Hasil pemantauan atau penertiban kepatuhan kapal perikanan yaitu sebanyak 54 unit yang telah diperiksa dan yang patuh sebanyak 36 unit (terlampir). Sedangkan untuk fasilitasi pembuatan NIB sebanyak 30 dan kartu KUSUKA sebanyak 81 (terlampir).

Hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan diuraikan sebagai berikut:

- a. Patroli pengawasan SDKP – BBM Pertamina 1000 liter dengan anggaran senilai Rp12.950.000,00 realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan Rp12.250.000,00 atau 94,59%.
- b. Pembayaran utang tahun 2024 – bahan bakar dan pelumas patroli 1 paket dengan anggaran senilai Rp10.335.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp10.335.000,00 atau 100%.
- c. Pemeliharaan kapal pengawas 1 unit dengan anggaran senilai Rp154.490.000,00 realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan Rp0 atau 0% karena kegiatan ini batal dilaksanakan
- d. Koordinasi/ konsultasi/ patroli pengawasan/ pemantauan kapal/ pembinaan/ identifikasi/ monitoring/ fasilitasi KUSUKA dan NIB/ kedinasan lainnya 34 OH dengan anggaran senilai Rp14.620.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp6.450.000,00 atau 44,12%.
- e. Pembayaran utang tahun 2024 – perjalanan dinas 1 paket dengan anggaran senilai Rp7.740.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp7.740.000,00 atau 100%.
- f. Fasilitasi KUSUKA dan NIB – laptop 8 GB, SSD 512 1 unit dengan anggaran senilai Rp15.900.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp15.608.820 atau 98,17%.
- g. Fasilitasi KUSUKA dan NIB – printer portabel A4 (black/colour) up to 14 ppm / 11 ppm 1 unit dengan anggaran senilai Rp5.459.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp5.334.660,00 atau 97,72%.

➤ **HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI PENATAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERAIRAN**

Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan dan pengelolaan kawasan perikanan yang meliputi seluruh wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional tersebut, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dengan subkegiatan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.500.000,00, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp40.400.000,00 atau 99,75%. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perairan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan penanaman mangrove 100 OH dengan anggaran senilai Rp10.000.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp9.900.000,00 atau 99%.
- b. Pembayaran utang tahun 2024 – perjalanan dinas 1 paket dengan anggaran senilai Rp30.500.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp30.500.000,00 atau 100%.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

PERMASALAHAN

- Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir.
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang berdampak pada kurangnya partisipasi dalam upaya konservasi.
- Pemanfaatan sumber daya alam yang belum berkelanjutan, termasuk praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, yang berdampak pada penurunan stok biota perairan serta terganggunya kesehatan ekosistem laut dan pesisir.
- Berdasarkan hasil patroli pengawasan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 di wilayah perairan Luwu Raya, masih ditemukan kapal-kapal nelayan usaha perikanan tangkap yang belum memiliki dokumen perizinan usaha serta dokumen kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan.
- Masih ditemukannya nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, yaitu *mini trawl*.
- Pelaksanaan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum berjalan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya belum tersedianya armada *speedboat* pada Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya.

IV.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- Melakukan koordinasi dengan Subbagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan agar pada perubahan anggaran, baik parsial maupun melalui DPA Perubahan, dapat dilakukan revisi lokasi dan jumlah unit kegiatan sesuai kebutuhan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye peningkatan kesadaran.
- Mengusulkan penambahan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing seksi dan subbagian, mengingat luasnya wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Luwu Raya, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pembangunan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) serta masyarakat pesisir.
- Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk mendukung optimalisasi kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Melaksanakan pembinaan rutin, sosialisasi, serta penyadaran hukum secara berkelanjutan kepada pemilik kapal, nahkoda, dan nelayan kecil.
- Melaksanakan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan kelompok nelayan binaan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- Mengimbau pelaku usaha perikanan yang masih beroperasi secara ilegal atau belum memiliki legalitas usaha agar segera melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengimbau para pemilik kapal perikanan untuk segera melakukan pengukuran ulang kapal serta tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan.
- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, khususnya kapal pengawas, guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan kegiatan patroli pengawasan.

V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

5.1. Ekonomi

5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro ekonomi untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2021 - 2025 data produksi total perikanan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan rata - rata sebesar 3,9 %.

5.1.2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2025 total tercatat sebesar 5,227,864.7 ton. Dibanding dengan hasil yang dicapai tahun 2024 sebesar 4,825,587.5 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 402,276.7 ton atau 8,3 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 15. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2024 - 2025

No.	Sumber Daya	Tahun		%
		2024	2025	
1	Penangkapan (Ton)	511,356.4	522,884.5	2.3
	a. Laut	465,546.3	476,656.6	2.4
	b. Perairan Umum	45,810.1	46,228.0	0.9
2	Budidaya (Ton)	4,314,231.1	4,704,980.1	9.1
	a. Tambak	1,493,787.6	1,648,566.6	10.4
	b. Laut (Rumput Laut)	2,796,410.3	3,030,227.6	8.4
	c. Kolam	17,411.7	19,294.1	10.8
	d. Sawah	5,992.1	6,317.2	5.4
	e. KJA (Laut)	63.9	45.0	(29.6)
	f. KJA (Tawar)	565.9	529.7	(6.4)
	Jumlah (Ton)	4,825,587.5	5,227,864.7	8.3

a. Budidaya

Ada 2 (dua) komoditi utama yang dipacu dalam menunjang ekspor perikanan yaitu udang dan rumput laut, disamping itu komoditi kepiting bakau juga memiliki prospek untuk diekspor.

Udang

Di Sulawesi Selatan ada beberapa jenis udang yang hidup di tambak, tetapi yang dibudidayakan ada 2 (dua) jenis yaitu udang Windu dan Vannamei.

Produksi udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,114.9 ton yang terdiri dari udang Windu 8,967.3 ton, udang Vannamei 49,109.10 ton, dan udang lainnya 13,038.54 ton, Jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 68,577.5 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 3,7 %.

Produksi udang di Sulawesi Selatan terbanyak terdapat di kabupaten Bone sebesar 21,181.6 ton (29,8 %), Kabupaten Pinrang sebesar 13,241.5 ton (18,6 %), Kabupaten Wajo sebesar 9,373.6 ton (13,2 %), Kabupaten Barru sebesar 4,502.2 ton (6,3 %) dan Kabupaten Bulukumba sebesar 4,019.6 ton (5,7 %).

Rumput Laut

Di Sulawesi Selatan ada 3 (tiga) jenis rumput laut yang diusahakan oleh pembudidaya yaitu jenis *Eucheuma spp*, *Spinosium spp* dan *Gracillaria spp*, jumlah produksi ketiga jenis rumput laut tersebut pada tahun 2025 sebesar 4,397,044.1 ton basah, yang terdiri dari *Eucheuma spp* sebesar 2,545,972.0 ton basah, *Gracillaria spp* sebesar 1,366,816.5 ton basah dan *Spinosium spp* sebesar 484,255.6 ton basah. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2024 sebesar 4,018,692.1 ton basah, maka terjadi kenaikan sebesar 9,4 %.

Daerah produksi *Eucheuma cottonii* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Pangkep, Barru, Luwu Timur, Pinrang, Maros, Sinjai, Kota Palopo dan Kota Pare - Pare

Produksi Rumput laut untuk jenis *Eucheuma cottonii* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 452,286.8 ton basah (17,8 %), Kabupaten Wajo sebesar 450,433.3 ton (17,7 %), Kabupaten Luwu sebesar 319,377.6 ton (12,5 %), Kabupaten Pangkep sebesar 313,400.0 ton (12,3 %) dan Kabupaten Jeneponto sebesar 257,157.9 ton (10,1 %).

Daerah produksi *Gracillaria spp* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Maros, Pangkep, Luwu Timur, Pinrang, dan Kota Palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Gracillaria sp* terbesar terdapat di kabupaten Luwu sebesar 330,421.9 ton (24,2 %), Kabupaten Bone sebesar 222,245.0 ton (16,3 %), kabupaten Luwu Utara sebesar 208,432.5 ton (15,2 %), Kabupaten Luwu Timur sebesar 182,601.0 ton (13,4 %) dan Kota Palopo sebesar 157,520.0 ton (11,5 %).

Daerah produksi *Spinosium spp* yaitu Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Bulukumba, Selayar dan Bantaeng. Produksi Rumput laut untuk jenis *Spinosium spp* terbesar terdapat di kabupaten Pangkep sebesar 151,000.0 ton (31,2 %), Bulukumba sebesar 131,431.0 ton (27,1 %),

Takalar sebesar 99,512.7 ton (20,5 %), Bantaeng sebesar 45,827.4 ton (9,5 %) dan Sinjai sebesar 33,253.9 ton (6,9 %).

Kepiting Bakau (*Scylla serrata*)

Adapun komoditi lainnya melalui usaha budidaya yaitu kepiting bakau (*Scylla serrata*). Produksi pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,869 ton sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,865.2 ton atau terjadi kenaikan produksi sebesar 35 %.

Selain komoditi udang, rumput laut dan kepiting bakau, ada beberapa komoditi ikan hasil budidaya yang dipacu untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat meliputi ikan bandeng, ikan mas, ikan nila dan ikan lainnya.

Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Produksi ikan bandeng dari hasil budidaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 201,557.6 ton dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 193,873.1 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 7,684.5 ton atau 4,0 %. Penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Bone sebesar 102,425.0 ton (51,8 %), Kabupaten Luwu Timur sebesar 19,098.1 ton (9,5 %), kabupaten Wajo sebesar 17,158.7 ton (8,5 %), kabupaten Pangkep sebesar 15,130.0 ton (7,5 %) dan kabupaten Luwu sebesar 12,287.8 ton (6,1 %).

Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)

Produksi ikan Mas dari hasil budidaya di kolam, sawah (mina padi), dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,171.1 ton, dibanding dengan tahun 2024 tercatat sebesar 9,777.5 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 393.6 ton atau 4,0 %. Daerah - daerah yang selama ini andalan produksi ikan Mas yaitu Kabupaten Pinrang sebesar 2,142.4 ton (21,1 %), Kabupaten Toraja Utara sebesar 1,455.0 ton (14,3 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,279.1 ton (12,6 %), Kabupaten Bone sebesar 1,103.0 ton (11,8 %) dan Kabupaten Wajo sebesar 1,090.4 ton (10,7 %).

Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Produksi ikan Nila dari hasil budidaya kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,727 ton, dibanding dengan tahun 2024 tercatat sebesar 13,815.2 ton, maka terjadi kenaikan produksi produksi sebesar 912.02 ton atau 6,6 %. Kabupaten penghasil ikan Nila di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang sebesar 3,335.9 ton (22,7 %), Kabupaten Pangkep sebesar 3,229.0 ton (21,9 %), Kabupaten Bone sebesar 1,392.6 ton (9,5 %), Kabupaten Wajo sebesar 1,201.7 ton (8,2 %) dan Kabupaten Sidrap sebesar 1,156.3 ton (7,9 %).

b. Penangkapan

Ikan Tuna /Cakalang/Tongkol

Dimaksudkan dengan ikan tuna/cakalang/tongkol adalah ikan-ikan pelagis besar dalam hal ini meliputi : Albakora, Madidihang, Tuna Mata Besar, Setuhuk Loreng, Setuhuk Biru, Setuhuk Hitam, Ikan Layaran, Ikan pedang, Tongkol Komo, Tongkol Krai, Tongkol Abu-Abu, Lisong, Kenyar, Cakalang.

Pada tahun 2025 produksi tangkapan ikan tuna/Cakalang/Tongkol di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 85,693 ton, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 91,424.0 ton hal tersebut berarti terjadi penurunan produksi tangkapan ikan tuna/cakalang/tongkol sebesar 5,730.5 ton atau sebesar 6,3 %. Kabupaten/Kota Penghasil TTC di Sulawesi selatan yaitu : Kabupaten Bukukumba sebesar 29,407.4 Ton (32,2 %), Kabupaten Sinjai 20,102.4 Ton (22 %), Kabupaten Bone sebesar 9,639.0 Ton (10,5 %), Kabupaten Pinrang sebesar 8,122.3 Ton (8,9 %) dan kabupaten Pangkep sebesar 5,550.0 Ton (6,1 %).

5.1.3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 73,6 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,6 kg/kapita/ tahun dengan penduduk Sulawesi Selatan diproyeksi mencapai 9.563.127 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan konsumsi perkapita sebesar 1,4 %.

5.1.4. Volume dan Nilai Eksport

Komoditi hasil perikanan Sulawesi Selatan dipasarkan tujuan ekspor pada tahun 2024 tercatat sebesar 202,712.5 ton dengan nilai US\$ 515,173,716.9 dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 202,045.5 ton dengan nilai US\$ 372,471,217.2 atau terjadi Kenaikan volume sebesar 0,3 % dan nilai 38,3 %. Kenaikan nilai Eksport Perikanan Sulawesi Selatan yang cukup besar disebabkan karena pada tahun 2025 komoditi ekspor Gurita mengalami permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan nilai ekspor perikanan, dimana pada tahun 2025 nilai ekspor Gurita meningkat dari 15,3 Juta US\$ menjadi 51,1 Juta US\$.

5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya

Tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dikelola dan komoditi yang diusahakan.

Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat antara Rp. 16,242,553 sampai Rp. 54,858,120 per tahun. Secara berurutan tingkat

pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah Budidaya Dilaut (Rumput Laut) Rp. 53,419,327, Budidaya Tambak Rp. 46,865,203 , Budidaya Kolam Rp. 31,378,105, Budidaya KJA Laut Rp. 22,748,593, Budidaya sawah Rp. 20,362,454 dan Budidaya KJA tawar Rp. 16,242,553 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 45,220,574 dan nelayan perairan umum Rp. 54,858,120.

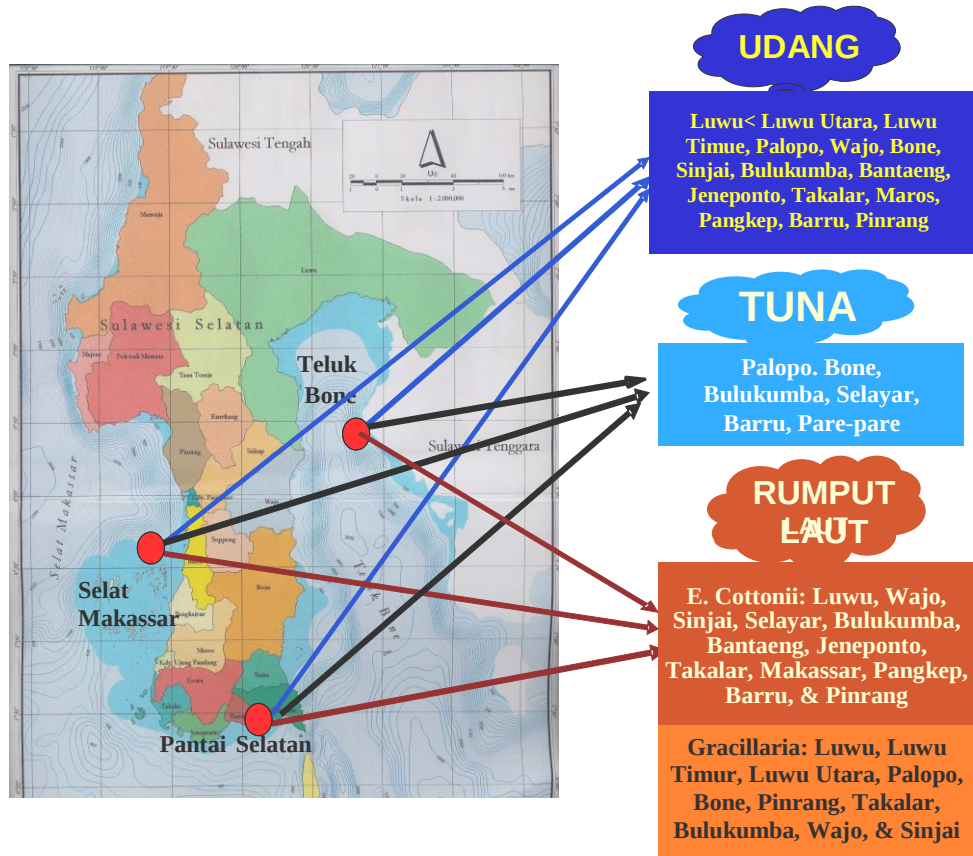
5.1.6. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat pada Tahun 2025 sebanyak 468,420 orang atau 4,9 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 281,262 orang (60 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 187,158 orang (40 %).

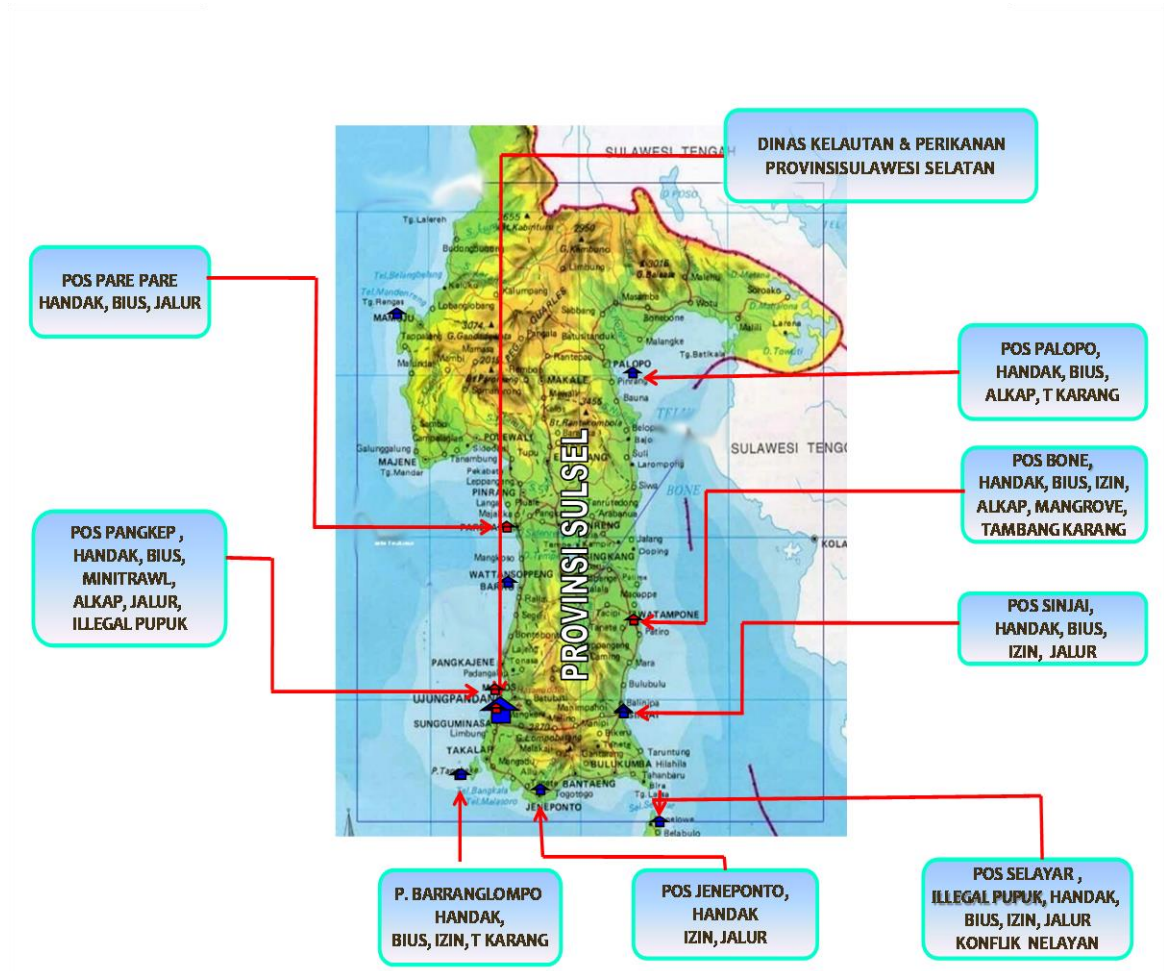




Lampiran 1. Wilayah Peta Penangkapan Tuna dan Budidaya, Udang dan Rumput Laut



Lampiran 2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsie Pengembangan SDM Pengawasan KP Sulawesi Selatan Tahun 2025



**Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan,
Tahun 2025**

Satuan : Ribu Orang

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Kepulauan Selayar	144.232
2	Bulukumba	458.997
3	Bantaeng	207.651
4	Jeneponto	423.370
5	Takalar	321.144
6	Gowa	826.957
7	Sinjai	273.313
8	Maros	419.148
9	Pangkajene Dan Kepulauan	362.692
10	Barru	190.465
11	Bone	837.104
12	Soppeng	240.424
13	Wajo	391.456
14	Sidenreng Rappang	333.524
15	Pinrang	429.891
16	Enrekang	241.667
17	Luwu	389.256
18	Tana Toraja	295.345
19	Luwu Utara	341.516
20	Luwu Timur	316.894
21	Toraja Utara	282.236
22	Kota Makassar	1.473.907
23	Kota Parepare	163.404
24	Kota Palopo	198.534
Total		9.563.127

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020 – 2035 (Hasil Sensus Penduduk 2020)

Lampiran 4. Data Produksi Pembenihan Udang Windu pada UPT Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut Tahun 2025

SIKLUS PERTAMA (September s/d Oktober)

No	Nama	Komoditas	Jumlah (Ekor)	Harga	Nilai	Keterangan
1	ARIF	Vanamae	200,000	25	5,000,000	Pembelian Umum
2	SURYAWAN ALI	Vanamae	480,000	25	12,000,000	Pembelian Umum
3	TESTING	Vanamae	140,000	25	3,500,000	Pembelian Umum
4	ARIF	Vanamae	70,000	25	1,750,000	Pembelian Umum
5	SOFYAN	Vanamae	126,000	25	3,150,000	Pembelian Umum
6	H. SUDI	Vanamae	200,000	25	5,000,000	Pembelian Umum
7	TESTING	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
8	ANDI ASO	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
9	AWAL	Vanamae	120,000	25	3,000,000	Pembelian Umum
10	TAUFIK	Vanamae	45,000	25	1,125,000	Pembelian Umum
11	GUSMAN	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
12	JIHAN	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
13	ABDULLAH	Vanamae	110,000	25	2,750,000	Pembelian Umum
14	Hj. NANI	Vanamae	150,000	25	3,750,000	Pembelian Umum
15	NURYONO	Vanamae	280,000	25	7,000,000	Pembelian Umum
16	ILYAS	Vanamae	98,000	25	2,450,000	Pembelian Umum
17	MUH. ASRI	Vanamae	80,000	25	2,000,000	Pembelian Umum
18	GUSMAN	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
Sub Jumlah			2,499,000		62,475,000	

SIKLUS KEDUA (November s/d Desember)

No	Nama	Komoditas	Jumlah (Ekor)	Harga	Nilai	Keterangan
1	GUSMAN	Vanamae	210,000	25	5,250,000	Pembelian Umum
2	MUH. JABIR	Vanamae	30,000	25	750,000	Pembelian Umum
3	MUH. ASRI	Vanamae	80,000	25	2,000,000	Pembelian Umum
4	TESTING	Vanamae	85,000	25	2,125,000	Pembelian Umum
5	SAFRUDDIN	Vanamae	140,000	25	3,500,000	Pembelian Umum
6	H. SUDI	Vanamae	126,000	25	3,150,000	Pembelian Umum
7	AMIRUDDIN	Vanamae	270,000	25	6,750,000	Pembelian Umum
8	EDY	Vanamae	25,000	25	625,000	Pembelian Umum
9	ALWI	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
10	SUMIATI	Vanamae	100,000	25	2,500,000	Pembelian Umum
11	ALWI	Vanamae	80,000	25	2,000,000	Pembelian Umum
12	WANDI	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
13	AMIRUDDIN	Vanamae	80,000	25	2,000,000	Pembelian Umum
14	GUSMAN	Vanamae	60,000	25	1,500,000	Pembelian Umum
15	ANDI ASO	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
16	GUSMAN	Vanamae	50,000	25	1,250,000	Pembelian Umum
17	ARI	Vanamae	80,000	25	2,000,000	Pembelian Umum
18	SYAFRUDDIN	Vanamae	90,000	25	2,250,000	Pembelian Umum
19	JAMIL	Vanamae	24,000	25	600,000	Pembelian Umum
20	WANDI	Vanamae	40,000	25	1,000,000	Pembelian Umum

Lanjutan.....

No	Nama	Komoditas	Jumlah (Ekor)	Harga	Nilai	Keterangan
21	SYAFRUDDIN	Vanamae	82,800	25	2,070,000	Pembelian Umum
22	ANDRE	Vanamae	64,400	25	1,610,000	Pembelian Umum
23	GUSMAN	Vanamae	210,000	25	5,250,000	Pembelian Umum
24	AGUS	Vanamae	27,600	25	690,000	Pembelian Umum
25	H. SUDI	Vanamae	96,000	25	2,400,000	Pembelian Umum
26	SYAFRUDDIN	Vanamae	114,400	25	2,860,000	Pembelian Umum
27	JAMIL	Vanamae	96,000	25	2,400,000	Pembelian Umum
Sub Jumlah			2,461,200		61,530,000	
Total			4,960,200		124,005,000	

Sumber : UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU LAUT TAHUN 2025

Lampiran 5. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
Januari 2025					
	Belum Ada SKP Yang terbit	Masa Peralihan dari Dirjen PDSPKP ke BPPMPHPK			
Februari 2025					
	PT. Mina Timur Indonesia	Jl. Pendidikan No.8, Kel. Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Tuna Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Flying Fish Roe Frozen Shellfish
	PT. Celebes Ocean Fishery	Dusun Borong Kalukua, Jalan Poros Bantaeng Bulukumba, km 131, Kel. Pajukukang, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopoda Frozen Tuna Fresh Tuna
	PT. Sumber Lautan Nusantara	Jl. Lantebung No.168, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopoda
	PT. Panen Bumi Nusantara	Dusun Bottae Kel. Makkowaru, Kec. Mattiro Bulu, Kab Pinrang Sulawesi Selatan 91271	Baru	Kering	Dried Seaweed
	UD. Jaya Abadi Sentosa	Kima 10, Kawasan Industri Makasar Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90244	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna Trimmings Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Milkfish
	PT. Blue Ocean Resources	Lingkungan Buttatao Utara Kel. Pettuadade, Kec. Turikale, Kab Maros Sulawesi Selatan 90552	Alamat Baru	Segar	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna
	Poklahsar Waroeng Buna	Sanuale, Desa Marioritennggae, Kec. Marioriwawa, Kab Soppeng, Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Squid Chili Paste Fish Chili Paste
	Poklahsar Wirausaha Mandiri	Salotungo, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Bakso Ikan

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
	CV. Karya Murni	Jl. Poros Galesong Utara No. 4 Kampung Parang Dusun Jonggo Batu, Kel. Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Fish Maw Dried Sea Cucumber Dried Shark Fin, Dried Shark Skin, Dried Shark Bones
	PT. Asia Sejahtera Mina	Jl. Ir Sutami No. 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok A1, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	PT. Prima Bahari Inti Lestari	Jl. Kima 12 KAV-5C Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp Fresh Tuna Fresh Milkfish Fresh Cephalopods
				Beku	Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Shrimp Frozen Tuna Frozen Milkfish Frozen Cephalopods
	PT. Phoander Jaya	Jalan Kapasa Raya, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav J-2 Kawasan Industri Makassar Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Pasteur	Chilled Pasteurized Crabmeat
	PT. Global Maju Pratama	Pattene Business Park Blok H No. 2 Kel. Pabentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan 90551	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Frozen Pelagic Fish
				Beku	Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods
	PT. Prima Indo Papua	Jl. Kima 4 Kav. P3 B Kel. Biring Kanaya, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90241	Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp
	PT. Rumput Laut Indah Sejahtera	Jl. Lantebung Gudang NO 100, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90244	Baru	Kering	Dried Seaweed
	Koperasi Kospermindo	Jl. Kima 8 Kav. 3A1, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
Maret 2025					
	UD. Seaweed Sukses Sejahtera	Jl. Ir. Sutami Blok E3/10 Komp. Pergudangan Parangloe Indah Makassar, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Rumput Laut Kering
	Poklahsar Aisyah	Jl. Kayangan, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan	Baru	Olahan	Abon Ikan
	UKM Bolu Bollo	Jl. Politeknik Singapore Link Beroanging, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Olahan	Bandeng Presto
	CV. Berkah Samudera Mandiri	Dusun Tinggito Kel. Tenringangkae, Kec. Mandai, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Pelagis Fish Fresh Demersal Fish
	PT. Giwang Citra Laut	Poros Pabrik Gula Takalar Km 1,5, Kel. Pa'rappunganta, Kec. Polobangkeng Utara, Kab Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed Alkali Treated Seaweed Chips Semi Refined Carrageenan

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamelleng No.42, Kel Bojo Baru, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Canned Pasteurized Crabmeat Frozen Tuna Fillet
April 2025					
	PT. Refa Mulia Utama	Gudang Pattene Business Park Blok AC nomor 01 H, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Rumput Laut Kering
	PT. Prima Indo Tuna	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No.32, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Fresh Tuna Fresh Demersal Fish Frozen Whole Demersal Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopods Frozen Tuna
	PT. Derya Utama Seafood	Jl. Sultan Abdullah Raya No.43, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Ikan Pelagis Segar
	PT. Seaweed Sukses Sejahtera	Jl. Ir. Sutami Blok E3/10 Komp. Pergudangan Parangloe Indah Makassar, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
	PT. Mitra Timur Nusantara	Jl. Sultan Abdullah Raya Lr 3 No.9, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Tuna Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods
	PT. Faris Indo Seafood	Pattene Busines Park, K, 02, Kel. Pabbenteng, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan 90551	Perpanjangan	Segar	Ikan Tuna Segar Loin Tuna Segar
	CV. Anugerah Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38A, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Tuna Beku
	PT. Lontara Jaya Sakti	Jl. Pasar Ikan Beba, Kel. Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods
	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No.38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed Dried Shark Fin Dried Sea Cucumber Dried Flying Fish Roe Dried Fish Maw Dried Abalone
	PT. Trans Anugerah Mulia	Pattene Bussines Park Blok U3 B, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods
Mei 2025					
	PT. Maelo Tuna Indonesia	Jl. Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Tuna Segar
	PT. Bumi Laut Pertiwi	Jl. Poros Makassar - Maros, Dusun Bulutanae, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Flying Fish Roe
	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamelleng No.42, Kel Bojo Baru, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Cooked Crab Meat
	CV. Maros Timur Jaya	Jl. Poros Makassar - Maros, Dusun Bulutanae, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Live Crab Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish
	CV. Adiwandy Hanania Mandiri	Jl. Kapasa Raya No.1 Gudang Blok 1, Kel. kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Rumput Laut Kering

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
	PT. Sumberguna Makassarnusa	Jl. Ujung Pandang Baru No.17, Kel. La'latang, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Rumput Laut Kering
	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima Raya I Blok D-2B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Telur Ikan Terbang Kering
				Beku	Frozen Pelagic Fish
	CV. Najwa Bahari	Jl. Sabutung Baru 3 No.25, Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish
					Fresh Demersal Fish
	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No.1, Makassar, Sulawesi Selatan, Kel. -, Kec. -, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Rumput Laut Kering
	CV. Sugarindo Trading,CO	Jl. Bakau No.60, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Rumput Laut Kering
	PT. South Suco	I. Kima VI Blok G-4, Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Frozen Shrimp
	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima 8 Kav SS No.23A Kawasan Industri Makassar, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna
					Frozen Cephalopods
					Frozen Milkfish
					Frozen Demersal Fish
					Frozen Pelagic Fish
					Fresh Tuna
					Fresh Demersal Fish
					Fresh Milkfish
					Fresh Pelagic Fish
	PT. Wahyu Pradana Binamulia	I. Kima 10 Blok T No.2B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Lobster
					Frozen Demersal Fish
					Frozen Tuna
					Dried Flying Fish Roe
					Frozen Flying Fish Roe
					Frozen Pelagic Fish
					Fresh Pelagic Fish
					Frozen Farm Raised Fish
					Fresh Demersal Fish
					Frozen Raw Cephalopod
					Fresh Tuna
Juni 2025					
	PT. Bumi Menara Internusa	Jl. Kima 15 Kavling R No.4C, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna Loin
					Frozen Octopus
	PT. Dwira Masagena	Jl. Kima Raya 1 Kav B5, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish Fillet
					Fresh Tuna
					Fresh Pelagic Fish
					Fresh Demersal Fish
					Fresh Cephalopods
					Frozen Tuna
					Frozen Pelagic Fish
					Frozen Demersal Fish
					Frozen Cephalopod
					Frozen Cooked Octopus
	CV. Arif Dermawan	Jl. Sabutung Timur Lr.3, Kel. Patingalloang, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Sea Cucumber

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
	PT. Asnur Anton Jaya	Jl. Tol Lama Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G No. 11, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	CV. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No.38 Blok H2-10, Kel. Parang Loe, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	CV. Persada Semesta	Jl. Sultan Hasanuddin No. 193, Kel. Sombalabella, Kec. Pattalasang, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	PT. Sutracco Nusantara Megah	Pattene 88 Cluster Green Park Blok C18-C20,Kel.Temmappadaue, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	PT. Keumkang Industri Indonesia	Jl. Kima 15 Kav R4D - R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Lobster Frozen Raw Shrimp
Juli 2025					
	PT. Karya Lautan Jaya Utama	Ir. Sutami No.107, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering Beku	Dried Flying Fish Roe Frozen Flying Fish Roe Frozen Cephalopod Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish
	CV. Alga Marina Sukses	Ir. Sutami No.107, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	UKM Anugerah	Jl. Ujung No.157, Kel. Lemba, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan	Baru	Olahan	Kerupuk Ikan
	CV. Simpul Agro Globalindo	Jl. pattene komp. pergudangan Pattene Business Park Blok B/C No. 11 Kel. Pabentengang, Kec. Marusu K, Kel. pabentengang, Kec. marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Homebes RT 01 RW 02, Kel. Batu Walenrang, Kec. Telluwanua, Kota Palopo Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	PT. Keumkang Industri Indonesia	Jl. Kima 15 Kav R4D - R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopod
	PT. Hokky Seafood Nusantara	Pelabuhan Perikanan Untia Jl. Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopoda
	PT. Armita Laut Nusantara	Jl.Tarakan Lr.155 No.14 Rt.04 Rw.02, Kel. Malimonga Tua, Kec. Wajo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Sea Cucumber
	PT. Central Fishery Indonesia	Lingkungan Buttatoa Utara, Kel. Pettuadade, Kec. Turikale, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Tuna Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish
	PT. Samalona Bay Seafood	Pusat Distribusi Regional, Jalan Daeng Matoo, Kompleks Gudang Nomor 6, RT 007, RW 006, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Octopus Frozen Sliper Lobster
	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Jl. Jembatan Tua No.89, Kel. Bontoo, Kec. Mandai, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar Beku	Frozen Demersal Fish Frozen Tuna Loin Frozen Pelagic Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Frozen Octopus Fresh Tuna Loin

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
Agustus 2025					
	PT. Changleong Maritim Indonesia	Jl O Blok O3-Pabenteng Kel. pabenteng, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan 90551	Baru	Kering	Dried Sea Cucumber
	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima Raya I Blok D-2B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering Beku	Frozen Cephalopods Fresh Demersal Fish Frozen Raw Shrimp Frozen Cooked Shrimp
	PT. Karya Nelayan	Ruko Graha Cemerlang Blok E No. 16-17 Km 21, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering Beku	Dried Shark Bone Dried Shark Skin Dried Fish Maw Dried Shark Fin Dried Sea Cucumber
	CV. Cahaya Resky	Perumahan Griya Batas Kota Blok D 15 No. 4, Kel. Tellumpoccoe, Kec. Marusu, Kab Maros Sulawesi Selatan	Baru	Hidup	Live Crab
	PT. Niaga Adijaya Mandiri	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Salted Sea Urchin Egg
	PT. Tujuh Samudera Jaya	Jl. Homebase Armed, Kel. Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering Beku	Dried Flying Fish Roe Frozen Flying Fish Roe
	PT. Jaya Utama Quality	Jl. Sultan Abdullah Raya, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Sea Cucumber
	CV. Anugerah Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38A, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Cooked Cephalopod
	CV. Gembira Galesong	Jl. Abdul Kadir, Kel. Galesong Kota, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Sea Cucumber
	PT. Nuraeny Coldstorage Asia	Jl karaeng patingalloang no 350 tol ir sutami gudang 350, Kel. bulurakeng, Kec. biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish
	PT. Tobitama Makassar Indonesia	Jl. Sultan Alauddin No 45, Kel. Pa"baeng-Baeng, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Flying Fish Roe
	PT. BPH Global Indonesia	Gudang Pattene 88 Blok Ac No.01/F Maros, Kel. Pabbentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
	PT. Mujur Jaya Bersama	Jl. Poros Makassar Maros, Graha Cemerlang, Ruko Graha Cemerlang Blok I No. 20, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab Maros Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Cephalopods Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish
	PT. Lintas Antar Nusa	Pelabuhan Perikanan Untia Jl. Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering Beku	Dried Flying Fish Roe Frozen Flying Fish Roe
	PT. Duta Mitra Semesta	Pergudangan Garuda Blok B6-B7, Jalan Lantebung No. 42, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
	PT. Zhongyi Suply Chain Services	Pergudangan 30 Nomor 30 P, Jl. Ir. Sutami No. 30, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Jl. Sabutung No.3, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar Beku	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopod Frozen Fillet Demersal Frozen Milk Fish
	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Bahagia No.2, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar Beku	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Fresh Tuna Frozen Pelagic Fish Frozen Tuna Frozen Demersal Fish
	CV. Hokky Seafood Nusantara	Pelabuhan Perikanan Untia Jl. Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar Beku	Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cooked Cephalopods
	PT. Anugerah Mapan Jaya	Jl. Poros Kariango, Dusun Majannang, Kel. Kurusumange, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed Semi Refined Carrageenan Alkali Treated Chips
	CV. Makassar Lestari	Jl. Poros Makassar Km 24 Gudang 78 Ballu - Ballu Maros , Kel. Turikale , Kec. Taroada , Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal fish
	PT. New Meranti Sejahtera	Griya Batas Kota Blok D 27 No.10, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Baru	Hidup	Live Crab
	PT. SUKSES RAYA FOOD	Jl. Bahagia No.2, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopod Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Frozen Shelfish Frozen Flying Fish Roe
	PT. Sumber Guna Makassar Nusa	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 53, Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	PT. Hasil Indo Sejahtera	Jl. Sulawesi Blok A/25, Kompleks Pergudangan Pattene 88, Kel. Pa'bentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
September 2025					
	PT. Utamakan Kemakmuran Rakyat	Dusun Sentosa, Kel. Lekopancing, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar Beku	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Fresh Milk Fish Freshwater Fish
	PT. Fishery Industri Indonesia	Jl. Sultan Abdullah Nomor 43 B, Desa/Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi S, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Fresh Tuna
	CV. Adi Tirta	Kompleks Pelabuhan Perikanan Untia, Jl. Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrae No.1, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar Beku	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish
	PT. Rahmat Bahari Indonesia	Jl. Poros Pattene, Komplek Pergudangan Pattene Business Park, Blok H No. 1, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
	PT. BPH Global Indonesia	Gudang Pattene 88 Blok Ac No.01/F Maros, Kel. Pabbentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
	PT. Mujur Jaya Bersama	Jl. Poros Makassar Maros, Graha Cemerlang, Ruko Graha Cemerlang Blok I No. 20, Kel. Bontaa, Kec. Mandai, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Cephalopods Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish
	PT. Lintas Antar Nusa	Pelabuhan Perikanan Untia Jl. Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering Beku	Dried Flying Fish Roe Frozen Flying Fish Roe
	PT. Duta Mitra Semesta	Pergudangan Garuda Blok B6-B7, Jalan Lantebung No. 42, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
	PT. Zhongyi Suply Chain Services	Pergudangan 30 Nomor 30 P, Jl. Ir. Sutami No. 30, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed
	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Jl. Sabutung No.3, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar Beku	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopod Frozen Fillet Demersal Frozen Milk Fish
	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Bahagia No.2, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar Beku	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Fresh Tuna Frozen Pelagic Fish Frozen Tuna Frozen Demersal Fish
	CV. Hokky Seafood Nusantara	Pelabuhan Perikanan Untia Jl. Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar Beku	Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cooked Cephalopods
	PT. Anugerah Mapan Jaya	Jl. Poros Kariango, Dusun Majannang, Kel. Kursumange, Kec. Tanralilli, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed Semi Refined Carrageenan Alkali Treated Chips
	CV. Makassar Lestari	Jl. Poros Makassar Km 24 Gudang 78 Ballu - Ballu Maros, Kel. Turikale, Kec. Taroada, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal fish
	PT. New Meranti Sejahtera	Griya Batas Kota Blok D 27 No.10, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Baru	Hidup	Live Crab
	PT. SUKSES RAYA FOOD	Jl. Bahagia No.2, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopod Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Frozen Shelfish Frozen Flying Fish Roe
	PT. Sumber Guna Makassar Nusa	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 53, Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed
	PT. Hasil Indo Sejahtera	Jl. Sulawesi Blok AJ/25, Kompleks Pergudangan Pattene 88, Kel. Pa'benteng, Kec. Marusu, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
October 2025					
	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No.59 Kel. Tallo, Kec. Tallo Lama, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90212	Perpanjangan	Beku	Frozen Slipper Lobster Frozen Cephalopods Frozen Fillet Pelagic Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Froz Fillet Demersal Frozen Mud Crab Fresh Demersal Fish Fresh Cephalopod Fresh Fillet Demersal
	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima III Kav 5 AB, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Pasteurized Canned Crabmeat
	PT. Marindo Jaya Maros	Jl. Dr. Ratulangi (Poros Makassar-Pangkep) , Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Raw Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish
	PT. Cakra Buana Network	Jl. KIMA 14 Blok F2 SS3, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,	Baru	Kering	Dried Seaweed
	CV. Mitra Alam	Jl. Lantebung No.9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopod
	PT. Buana Laut Nusantara Indonesia	Jl. Kima Raya 6 F1 B1, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Cephalopods Froz Cooked Cephalopods Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Milkfish Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Fresh Slipper Lobster
	PT. Bumi Menara Internusa	Jl. Kima 9 Kav L No.7A, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp
	PT. Dunia Marine Products	Jl. Kawasan Industri Makassar 3/K-4B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar Beku	Froz Cooked Cephalopoda Frozen Cephalopoda
November 2025					
	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	Jl. Kima 6 Kav F3/B1 - F3/B2 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish
	CV. Prima Indo Tuna	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No.32, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp Frozen Salted Sea Urchin Egg Frozen Cephalopods
	PT. Samudera Ekspor Anugerah	Jl. Garuda Benteng, Kel Bonto Mate"ne, Kec. Mandal, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selata	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna
	PT. Celebes Berkah Niaga	Pergudangan Logistik Terpadu Pelitagro blok A no 15 Jl Ir Sutami No 24, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Produk
	PT. Biota Laut Ganggang	Jl. Bahagia No.2 Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90242	Perpanjangan	Kering	Rumput Laut Kering Tepung Rumput Laut Agar Agar Powder Tepung Keragenan
	PT.Sukses Raya Food	Jl. Bahagia No.2 Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90242	Perpanjangan	Kering Segar Beku	Dried Flying Fish Roe Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Milk Fish
	PT. Prima Global Sukses	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No 32 A Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90242	Perpanjangan	Segar Beku	Fresh Demersal Fish Fresh Tuna Frozen Demersal Fish Frozen Tuna Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopod
Desember 2025					
	CV. Rezky Bahari	Jl. Poros Makassar-Maros KM 24 Lingkungan Ballu Ballu, Kel. Taroda, Kec. Turikale, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Frozen Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Crab Fresh Demersal Fish Frozen Raw Cephalopods
	CV. Nur Bahari Abadi	Jl.Sultan Abdullah Raya Kota Makassar, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Teripang kering
	PT. Changleong Maritim Indonesia	Jl O Blok O3-Pabentengang, Kel. pabentengang, Kec. Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Gelembung Ikan Kering Kulit Ikan Kering
	PT. Crown Seafood Indonesia	Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15A, Kel. Parang Loe, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Salted Anchovies
	CV. Kudatama Mas	Komplek Pelabuhan Perikanan Untia, Jl Salodong, Kel Untia, Kec Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Beku	Frozen Raw Shrimp

Sumber : Laporan Tahunan UPT BPMPP 2025

Lampiran 6. Jumlah Produksi Benih di Instalasi BBI Lajoa Kab. Soppeng Tahun 2025

No	Bulan	Jenis Ikan	Total Produksi (Ekor)	Restoking (Ekor)	Jumlah Penjualan Benih (Ekor)	Harga Penjualan Benih(Rp)	Lokasi Restoking
1	Januari	Mas	33,500	-	33,500	6,700,000	-
		Nila	50,500	-	50,500	8,300,000	-
2	Februari	Mas	14,800	-	14,800	2,500,000	
		Nila	18,000	7,000	11,000	2,000,000	Cabenge Soppeng
3	Maret	Mas	8,500	-	8,500	1,600,000	
		Nila	46,000	-	46,000	4,600,000	
4	April	Mas	9,500	2,000	7,500	1,700,000	
		Nila	67,000	7,000	60,000	9,500,000	BA.MN.Kompi 4 Von C por Bone
5	Mei	Mas	26,800	7,000	19,800	3,500,000	Bulu Kae Pitumpanua Wajo
		Nila	42,000	22,500	19,500	3,200,000	Kec. Bungin Enrekang
6	Juni	Mas	34,000	10,000	24,000	4,600,000	Kera Kab. Wajo, Kab. Maros
		Nila	78,800	5,300	73,500	15,800,000	Bosowasi Bone

Lanjutan.....

No	Bulan	Jenis Ikan	Total Produksi (Ekor)	Restocking (Ekor)	Jumlah Penjualan Benih (Ekor)	Harga Penjualan Benih(Rp)	Sisa Stok Benih (Ekor)	Lokasi Restocking
7	Juli	Mas	35,000	-	35,000	13,850,000		
		Nila	41,000	-	41,000	7,150,000		
8	Agustus	Mas	29,600	5,000	24,600	5,700,000		Kab. Gowa
		Nila	39,000	5,000	34,000	4,800,000		Kab. Gowa
9	September	Mas	89,000	-	89,000	12,000,000		
		Nila	73,000	23,000	50,000	7,000,000		Kab. Sidrap dan Kab Bone
10	Oktober	Mas	86,000	-	86,000	10,500,000		
		Nila	35,000	-	35,000	8,000,000		
11	November	Mas	48,100	12,600	35,500	4,550,000		Polres Soppeng, Arajang Kab. Wajo
		Nila	60,000	20,000	40,000	4,000,000		Kab Wajo , Kab.Bone, Kota Palopo
12	Desember	Mas	35,000		35,000	2,500,000	53,200	
		Nila	52,000		52,000	7,000,000	46,200	
Sub Total		MAS	503,000	36,600	413,200	69,700,000	53,200	
		NILA	648,500	89,800	512,500	81,350,000	46,200	
Total			1,151,500	126,400	925,700	151,050,000	99,400	

Sumber : Instalasi BBI Lajoa Soppeng Tahun 2025

Lampiran 7. Data Pokmaswas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
1	Pangkep		47 Klp				
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Bone	Komando	Muh. Ridwan	13	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2015
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Ujung	Mattiro Ujung	Saparuddin	17	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Matae	Cinta Bahari	H. Tajuddin Nur	13	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bulu	Mattiro Bulu	Mustakim	9	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Liukang Tangayya Desa Balo-Baloang	Balo Baloang	Rustam	16	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Deceng	Lestari Biru	Abdullah	13	Pengawasan di perairan laut dan rehabilitasi terumbu karang	2019

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Langi	Alam Lestari	Muhammad Nur	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattaro Adae	Mattaro Adae	Mustamin, S.Pdi	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Kanja	Mattiro Kanja	Abd. Rahman. N	11	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Baji	Baji Bahari	Hamirullah	22	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bombang	Mattiro Bombang 1	Syahrir	13	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Bombang	Mattiro Bombang 2	Rijal	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Wale	Pallodang	Nur Alam, Amd.Pi	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Utara Desa Mattiro Uleng	Nusa Bahari	Muksin	17	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Kalmas Desa Dewakang	Cahaya Pulau	Juhairi	15	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Balo Baloang	Bahari Lestari	Tinri	14	Pengawasan di perairan Laut	2006
		Kec. Liukang Tangayya Desa Satanger	Duta Bahari Sumanga	Muhlis	13	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Satanger	Satanger Jaya	Muslimin	13	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Mandalle Desa Mandalle	Mandalle	Anwar	15	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Mandalle Desa Tamarupa	Tamarupa	Faisal	25	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbirng Utara Desa Tamarupa	Sahabat Bahari	Burhanuddin	12	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Labangeng	Nelayan Tapaang Bersatu	Ramli	18	Pengawasan di perairan Laut	2019

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Liukang Tangayya Desa Tappaang	Nelayan Aloang Bersatu	A. Malau	15	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Tappaang	Nelayan Kawassang Bersatu	Mansyur	18	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Tappaang	Nelayan Sapinggang Bersatu	Ambo Naha	17	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Sompe	Toddopuli Balang Lompo	Maskur	13	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tupabbiring Desa Mattiro Dolangeng	Sahabat Jaya	Muh. Ilyas	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Mandalle Desa Boddie	Bintang Laut	Muh. Safir	14	Pengawasan di perairan laut	2021
		Kec. Liukang Kalmas Desa Sabaru	Pabeta Hebat	Muh. Arsyad	18	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Liukang Tangaya Desa Sabalana	Arung Samudera Kayu Bangkoa	Sapo	24	Pengawasan di perairan Laut	2022
		Kec. Liukang Tangayya Desa Balo-Baloang	Passamaturukang	Tinri	14	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Liukang Tangayya Desa Kapoposang Bali	Sahabat Nelayan	Suhaedy	15	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Liukang Tangayya Desa Sailus Besar	Baracuda Perkasa	Rahman	11	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Desa Mattirolangi Kecamatan Liukang Tupabbiring	Sea Of Sarappo	Nuryadi`	20	Pengawasan di perairan laut	2023
		Desa Bontomanai Kecamatan Labakkang	SINGA PESISIR	Tanaing	10	Pengawasan di perairan laut	2023
		Kec Lk.Tuppabiring DsMattirodolangeng	Podang Lestari	Abbas	16	Pengawasan di perairan Laut	2024
		Kec Lk.Tuppabiring Desa Mattirodeceng	Pasir Putih	Santa	12	Pengawasan di perairan Laut	2024
		Kec Lk.Tuppabiring Desa Doang Doangan	Kompas	Bado	34	Pengawasan di perairan laut	2024
		Kec. Lk. Tangaya, Kel. Sapula	Ampibi	Irfan Samsir	35	Pengawasan di perairan laut	2020
		Kec. Bungoro, Desa Bulu Cindea	Balanga	H. Muksin	9	Pengawasan di perairan laut	2021

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Ma'rang Desa Pitusunggu	Mappideceng	Abd. Rakib Dg. Gama	96	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Lk Tupabbiring Desa Mattiro Langi	Bina Laut	Safaruddin	12	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Mandalle Desa Boddie	Berkah Laut	Mustakin	12	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Lk.Tupabbiring Desa Mattiro Sompe	Balang Taesa	Nursaid	13	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Lk.Tupabbiring Desa Mattiro Bone	Sinar Laut	Tuwo Dahang	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec LK. Kalmas Desa Dewakkang	Bulo Sibatang	Baharuddin	13	Pengawasan di perairan laut	2025
		Kec Lk.Tuppabiring Desa Mattirodolangeng	Lamputang bersatu	Jamaluddin S	14	Pengawasan di perairan Laut	2025
2	Luwu Utara	13 Klp					
		Kec. Bone Bone Desa Munte	Kuda Laut	Bahtiar Baso	14	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pombakka	Pombakka Affair	Mursalim	15	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Takkalala	Bone Pute	Juswan	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bone Bone Desa Poreang	Bunga Karang	Aksan Siswali	11	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Desa Tongke	Bajak Laut	Jasmin	17	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Bone Bone Desa Tamuku	Mappatunru	Hafid Hasan	14	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Waelawi	Pulau Indah	Jisman	22	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pao	Pao Raja	Marsuki	18	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Benteng	Mamminasae	Syamsudin	15	Pengawasan di perairan Laut	2010
		Kec. Bone Bone Desa Batangtongka	Sipatuo	M. Arief	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Sukamaju Desa Subur	Harapan Baru	Darwis	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Desa Salekoe	Teluk Bone	Bahar	9	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Malangke Barat Desa Pengkajoang	Mantalinga Indah	H. Annas	13	Pengawasan di perairan laut	2018

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
3	Kota Palopo	6 Klp					
		Kec. Wara Timur Kel. Sarutanga	Wahana Lingkungan	Basri Taha	19	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Wara Selatan Desa Sampoddo	Retona	Basmi	15	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Selatan Desa Takkalala	Salu Karo	Awaluddin	24	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Selatan Kel. Songka	Salutanga	Sabil	24	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Timur Kel. Benteng	Salu Tompotika	Idris	25	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Wara Timur Kel. Malatunrung	Baja Pole	Drs. Hamruddin, SE	25	Pengawasan di perairan Laut	2015
4	Luwu Timur	9 Klp					
		Kec. Wotu Desa Bawalipu	Cinta Bahari	Mismar, S.Pd	34	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Angkona Desa Harapan Baru	Harapan Baru	Jumhur	21	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Angkona Desa Harapan Baru	Lampia	Rusdin	16	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Burau Desa Lauwo	Teluk Bone	Muh. Yusuf	27	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Wotu Desa Lera	Lalambate	Ansar M. Galib	22	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Malili Desa Cerekang	Pejuang WTC	Arlin, S.Pi	18	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Wotu Desa Lakawali	Bintang Timur	Andi Wahyudin	22	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Nuha Desa Nikkel	Pengawas Danau	H. Umar Ranggo	13	Pengawasan di PUD	2020
		Kec Malili Kab Luwu Timur	Sinar Bakau	M. Said	23	Pengawasan di perairan Laut	2024
5	Takalar	17 Klp					
		Kec. Mangarabombang Desa Laikang	Tanjung Laikang	Basir Sila	34	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Sanrobone Desa Ujung Baji	Lestari Alam Samudra	Ahmad Yusuf Mile	10	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Mangarabombang Desa Punaga	Tubariana	Syamsu Alam	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Galesong Utara Desa Tamasaju	Sitalasi	Aswandi Dg. Duni	10	Pengawasan di perairan laut	2011

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Galesong Kota,Desa Galesong Baru	Sanrobengi	Ripai Nai	30	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Mangarabombang	Tumalilia	Abd. Rahman	10	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Galesong Selatan Ds. Bontokanang	Hunter	M. Ramli Liong	30	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Mappakasunggu	Panjis	Umar Bani	8	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Galesong Utara	Perintis Bahari	Mustari Tantu	15	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Galesong Desa	Lestari Bahari	Saharuddin Dg. Tayang	30	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mappakasunggu Desa Balang Datu	Balang Datu	Abdul Malik Dg. Ngewa	11	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Mappakasunggu Desa Tompo Tanah	Tompo Tanah	Haris Dg. Nangga	13	Pengawasan di perairan laut	2013
		Desa Matirobaji Kec Kep Tanakeke	Jagad Samudera	Masriadi	16	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kec Kep Tanakeke Kab Takalar	Ma'minasa Baji	Fadli	18	Pengawasan di perairan Laut	2024
		Kec Kep Tanakeke, Ds. Rewatayya	JAGA LAUT	Andika	18	Pengawasan di perairan Laut	2025
		Kec Kep Tanakeke, Ds. Balangdatu	Samudera Biru	Abdul Malik Ewa	18	Pengawasan di perairan Laut	2025
		Kec Kep Tanakeke, Ds. Maccini Baji	Bangko Tinggi	Syamsuddin Dg Rate	19	Pengawasan di perairan Laut	2025
6	Maros	9 Klp					
		Kec. Bonto Desa Pajukukang	Singa Laut	Ilham	20	Pengawasan di perairan Laut	2020
		Kec. Bontoa Desa Pajukukang	Bahari	Hasanuddin /	25	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontoa Kel. Pajukukang	Sipakatau	Idrus Bora	19	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Marusu Kel. Nisombalia	Mina Bahari	H. Ruslan Manye	13	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Maros Baru Kel. Bori Masunggu	Minasa Baji	Supriadi	15	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Lau Kel. Soreang	Sejahtera	Arsyad Rauf	13	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Marusu Desa Nisombalia	Samudra Bahari Jaya	Sapri	13	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Lau Desa Marannu Dusun Kalokko	Rajawali	Safaruddin	13	Pengawasan di perairan laut	2021

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
7	Bantaeng	14 Klp					
		Kec. Bisapu Desa Bontojai	Pantai Batunu	Subhan Yusuf	10	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bissapu Ds. Bonto Lebang	Sikamaseang	syahrir	10	Pengawasan di perairan laut	2011
		Kec. Pajukukang Desa Nipa Nipa	Kuda Laut	Nasir	9	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Borong Loe	Marina Indah	H. Nurung	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang	Biangkeke Berkarya	Ismail	27	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Biangkeke	Pantai Gading	Ahmad	11	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Ds. Lumpangang	Lumpangang Raya	Hasan	7	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Pajukukang	Pajukukang Raya	Bakso Pali	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Desa Papanloe	Papanloe Bersinar	H. Arif	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pajukukang Kel. Lembang	Pantai Selatan	Ihsan	7	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pajukukang Desa Rappoa	Pinang Raya	M. Yunus	10	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bantaeng Kel. Palantikang	Timur Laut	Achmad	10	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kelurahan Lembang Kec Bantaeng	Pantai Lamalaka	Aidil	33	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kelurahan Lembang Kec Bantaeng	BERKAH	Irvan	16	Pengawasan di perairan Laut	2023
8	Luwu	6 Klp					
		Kec Larompong Desa Buntu Matabing	Bilongka	Abd. Rahman	30	Pengawasan di perairan laut	2013
		Kec. Larompong Selatan Desa Babang	Pasir Putih	Ismail Marsuki, SH	10	Pengawasan di perairan laut	2007
		Kec. Larompong Selatan Desa Batu Lappa	Antasari	Drs. Syukri. L	19	Pengawasan di perairan laut	2010
		Kec. Larompong Selatan Desa Temboe	Cinta Bahari	Abdi, S.Pd	10	Pengawasan di perairan laut	2019
		Kec. Belopa Utara Desa Lauwa	Alam Bahari	M. Aris Sade, SH.MH	22	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ponrang Desa Muladimeng	Teluk Mutiara	Ihwan Ilham	12	Pengawasan di perairan Laut	2021

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
9	Bone	14 Klp					
		Kec. Salomekko Desa Manera	Manera	Muh. Asaf	20	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tellu Siattinge Desa Lamuru	Mabarackae	Bakhris Bahtiar	56	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone Desa Mallari	Mallari Ade	Mahyudin, S.Ag.S.Pd	19	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tonra Desa Bulu-Bulu	Bahari	Arsyad	20	Pengawasan di perairan Laut	2009
		Kec. Sibulue Desa Pattiro Sompe	Pattiro Sompe	Abbas Amir, S.Pd,Msi	25	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone	Mallusetasi	Herman Sukri	21	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Awangpone Desa Kajuara	Mattiro Deceng	Suardi	33	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Desa Carigading	Pallete	Abdullah, A.Ma	30	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Desa Pallete	Bintang Laut	Zulkifli Azroni	25	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Desa Bajoe	Kading	Kile	10	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Barebo Desa Kading	Sipatokkong	Mujetaba	37	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Mare Desa Ujung Salangketo	Pada Tuo	Abdullah	15	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Kajuara Desa Angkue	Angkue	Alias	15	Pengawasan di perairan Laut	2007
		Kec. Tanete Riattang Timur Kel. Bajoe	Bajo Bersatu	Suyuti	10	Pengawasan di perairan laut	2020
10	Makassar	9 Klp					
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Lumba Lumba	Yusran	8	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Hiu	H. Yusup	8	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Ujung Tanah Kel. Barrang Lompo	Bahari	Abd. Rasyid	10	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mariso Kel. Mariso (Pulau Samalona)	Barakuda	Kamaruddin Dg. Lalo	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Kepulauan Sangkarang Kel. Barrang	Barrang Lompo	Ismail Muhtar	10	Pengawasan di perairan laut	2008
		Kec. Ujung Pandang Kel. Lae Lae	Cinta Laut	Wahab Dg. Sikki	7	Pengawasan di perairan Laut	2011

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Ujung Tanah Kel. Barrang Cadi	Bahari Nusantara	Jala'	14	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kel. Br. Caddi Kec. Kepulauan Sangkarrang	Mutiara Laut	Naba	16	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kec. Kepulauan Sangkarrang	Sipakatau	Tabrani	12	Pengawasan di perairan Laut	2024
11	Pare-Pare	3 Klp					
		Kec. Wattang Soreang Kel. Wattang Soreang	Bagan Lolo	Ali Hafid	17	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Bacukiki Barat Kel. Data	La' Balesse	Ahmad Yani	11	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Lumpue Kec. Bacukiki Barat	Madecenge	Abdul Wahid, SP, MM	7	Pengawasan di perairan Laut	2023
12	Barru	7 Klp					
		Kec. Mallusetasi Kel. Mallawa	Nirwana Bahari	Bowo Prihanto	33	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Mallusetasi Desa Kupa	Batu Loange	Suardi Haruna	40	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Palanro Kel. Palanro	Bunga Nelayan	Udin Basri	10	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Tanete Rillau Desa Lasitae	Balanak	Usman	23	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Tanete Rillau Desa Tellumpanua	Bahari Polejiwa	Hamzah	13	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Lembae Kecamatan Barru	Pantai Bahari Coppo	Ismail	12	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Desa Bojo Kec. Mallusetasi	Bolong Bojo	Amir	12	Pengawasan di perairan Laut	2023
13	Sinjai	9 Klp					
		Kec. Tellulimpoe Desa Bua	Sipakainge	Bustam	12	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Panaikang	Adapi Nagau	Umar, S.Pdi	18	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pl. Sembilan Ds. Pulau Persatuan	Mamminasae	Andi Darwis	15	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pl. Sembilan Desa Pulau Padaelo	Seasseri	Hijriandi	14	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Sinjai	Mattiro Deceng	Baharuddin, S.Sos	21	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Pl. Sembilan Desa Pl. Harapan	Karang Merah	Abdullah	10	Pengawasan di perairan Laut	2014

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Pl. Sembilan Ds. P. Buhung Pitue	Batu Maccidong	Umar	13	Pengawasan di perairan laut	2014
		Kec. Sinjai Timur Desa Pasimaranu	Mabbulo Sipeppa	Rustan, S.Pi	14	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Desa Pulau Padaelo	Padaelo	M. Malik	23	Pengawasan di perairan Laut	2023
14	Jeneponto	10 Klp					
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	Bahari	Muh. Nasir	25	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	General	Suharto	13	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Binamu Kel. Empoang Selatan	Pannara Indah	Dado Dg. Joa	15	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Arungkeke Kel. Araneae	Bahari Arungkeke	Abd. Razak	15	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Tamalate Desa Bontojai	Lompo Bulu	Dulla	20	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Tarowang Kel. Tarowang	Tarowang Indah	Bazuki	20	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bangkala Barat Desa Garassikang	Samaturu	Supardi	23	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bangkala Kel. Pantai Bahari	Garuda Bahari	Andi Mattewakang	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Binamu Kel. Empoang Selatan	Senapan	Sudirman	13	Pengawasan di perairan Laut	2009
		Desa Tuju Kec. Bangkala Barat	Sipakatutu	Zainal	7	Pengawasan di perairan Laut	2022
15	Selayar	15 Klp					
		Kec. Bontomanai Desa Parak	Bambangan	Andi Nawir	16	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontosikuyu Desa Patikarya	Harayya	Mursalim	10	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Benteng Kel. Benteng Utara	Antasena	Rahmat Bonto	8	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontoharu Ds. Bontoborusu	Liang Kareta	Lukman	11	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontomatene Desa Barat Lambangan	Boneria	Demma Lalli	14	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Bontomanai Desa Barugaia	JuLu Siri	Andi Suryanto	12	Pengawasan di perairan Laut	2020
		Kec. Pasirmarranu Desa Bonea	Taka Bassi Bonea 2	La onso	10	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontomanai Desa Parak	Pamtera 2	Burhanuddin	11	Pengawasan di perairan Laut	2015

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Pasimarannu Desa Bonea	Taka Bassi Bonea	Kamaluddin	11	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontosikuyu Ds. Tambolongan	Nambolaki	Muh. Amang	10	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Bontomatene Ds. Menara Indah	Cahaya Purnama	Marzuki	14	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Desa Bontona Kec Bontomatene	Langsangiring	Sabri Anto	10	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Desa Kayu Bauk Kec Bontomatene	Lembangia	Mappalewa	12	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Desa Kahu Kahu Kec Bontoharu	Harma laut	Ansar	15	Pengawasan di perairan Laut	2023
		Kecamatan Buki	ASSIPAINGA	Andi Arwin Patta	38	Pengawasan di perairan Laut	2024
16	Pinrang	8 Klp					
		Kec. Supa Desa Lotang Salo	Lotang Salo	Abidin	19	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lembang Desa Binanga Karaeng	Bina Bahari	Muh. Basir Basiru	22	Pengawasan di perairan Laut	2008
		Kec. Mattiro Sompe Kel. Langnga	Sinar Bahari	Herman	10	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lasinrang Desa Waetuoe	Mario Marennu	Muladi	33	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Lembang Desa Sabang Paru	Bina Bahari	Alimuddin	28	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Mattiro Sompe Kel. Pallameang	Samaturue	Ibnu Hajar	24	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Supa, Desa Labuang Ujung	Bersatu	H. Ahmad Jawadi	28	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Supa, Desa Labuang Ujung	Siamasei	Erwin Daming	19	Pengawasan di perairan Laut	2013
17	Wajo	17 Klp					
		Kec. Takkalala ,Ds Pantai Timur	Sipakainge	Syarifudin	12	Pengawasan di perairan Laut	2015
		Kec. Pitumpanua Kel. Siwa	Kompas	Muchin	21	Pengawasan di perairan Laut	2021
		Kec. Takkalala Desa Pantai Timur	Mappideceng	Umar H. Sandu	13	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Penrang Desa Doping	Wahana Bahari	H. Panogi	19	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Bola Desa Pasir Putih	Mappasitujue	Baso Mattalunru	15	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Sajoanging Desa Akkajeng	Bina Lestari	Mustamin	21	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pitumpanua Desa Siwa	Siwa Bahari	Gunawan Malik	19	Pengawasan di perairan Laut	2011

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
		Kec. Keera Desa Keera	Maruddanie	Nurdin	31	Pengawasan di perairan Laut	2011
		Kec. Pitumpanua Desa Siwa	Basma Community	Hafid Assegaf	31	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Pammana Desa Pammana	Sukamaju	Abd. Halid	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Tanasitolo Desa Tanasitolo	Massedie	Samsu Alam	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Tempe Desa Watallipue	Siparingerrang	Arifin	15	Pengawasan di perairan Laut	2016
		Kec. Belawa Desa Limporilau	Tosagena	Suparman	11	Pengawasan di perairan Laut	2019
		Kec. Maniangpajo Desa Maniangpajo	Sipakainge	Joni. K	11	Pengawasan di PUD	2015
		Kec. Belawa Ds. Lautang	Nelayan danau tempe	Amiruddin	11	Pengawasan di perairan Darat	2022
		Kec sajoanging	Mattiro deceng	Akmal salahuddin	13	Pengawasan di perairan laut	2023
		Kec Bola Ds. Pasir Putih	Delapan Enam	Radinal	18	Pengawasan di perairan Darat	2024
18	Soppeng	3 Klp					
		Kec. Marioriawa Desa Attang Salo	Salomate	Ismail	5	Pengawasan di perairan umum	2017
		Kec. Marioriawa Desa Attang Salo	Bintang 27	Ambo Aman	13	Pengawasan di perairan umum	2017
		Kec. Marioriawa Kel. Kaca	Lasimpo	La Tanggung	14	Pengawasan di perairan umum	2017
19	Bulukumba	7 Klp					
		Kec. Kajang Desa Tana Jaya	Lumba Lumba Putih	H. Muh. Judar	12	Pengawasan di perairan Laut	2014
		Kec. Bontobahari Kelurahan Sapolohe	Batu Mesu	Nurdin Patta	14	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Herlang Kel. Bonto Kamase	Katinroang Jangang	Sangkali	12	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bontobahari Desa Tanah Lemo	Ujung Baru	H. Ali Imran	10	Pengawasan di perairan Laut	2013
		Kec. Bontobahari Kel. Eka Tiro	Cakalang	Badorra	13	Pengawasan di perairan Laut	2012
		Kec. Bonto Bahari Ds. Darubiah Dusun Kasuso	Kasuso Bersatu	Mappawali	27	Pengawasan di perairan Laut	2022
		Desa Lembanna Kec Bontobahari	SINGKOLO	Ahmad Arfan	14	Pengawasan di perairan Laut	2023
20	Sidrap	2 Klp					
		Kec. Wtg. Sidenreng Desa Mojong	Mamminasae	H. Ardin	26	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Wtg. sidendreng Desa Mojong	Mojong Sejahtera	Balbastian	16	Pengawasan di perairan umum	2022

Lanjutan.....

No	Kabupaten	Kec./Kel./Desa	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Tahun Pembentukan
21	Enrekang	12 Klp					
		Kec. Baraka Desa Baraka	Baraka	Simen	18	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Malua Kel. Malua	Malua	Sudirman Datma	12	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Curio Kel. Salasa	Wai Sitodon	Syarif Sinaru	17	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Masalle Desa Buntu Sarong	Masalle	Mardan, A.Md.Pi	14	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Cendana Desa Cendana	Salu Sa'dang	Muhammad Yunus, S.Sos	15	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Buntu Batu Desa Latimojong	Buntu Batu	Ikhsan	16	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Anggeraja Desa Tampo	Anggeraja	Taufan Supu	18	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Baroko Desa Baroko	Baroko	Waluddin	15	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Maiwa Desa Pattondonsalu	Maiwa	Sainal Ballu	16	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Bungin Kel. Bungin	Bungin	Jamaluddin	19	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Enrekang Kel. Galonta	Samata	Supatman Polimin, SP	17	Pengawasan di perairan umum	2015
		Kec. Alla Desa Pana	Pedas Alla	Basri Pea	30	Pengawasan di perairan umum	2015
22	Gowa	4 Klp					
		Kec. Parangloe Kel.Bontoparang	Beroanging	Rais Patta, S.Sos	26	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec. Parangloe Kel. Lanna	Jeneberang	Hadi, S.Sos	16	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec. Manuju Kel.Bontoparang	Sinar Moncong Loe	Johannis	15	Pengawasan di perairan umum	2011
		Kec Somba Opu Kel Mawang	Danau Mawang	Sakir Dg Sarring	15	Pengawasan di perairan umum	2024
Jumlah		241 Klp					

Sumber : Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2025

Lampiran 8. Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
1	Destructive Fishing Bahan Peledak (Bom Ikan)	SYAMSUDDIN DG MAJEPPU BIN MAPPIARA	2 (Dua) buah botol kaca bekas berisi pupuk amonium nitrate 1 (Satu) buah perahu jolloro	Pada hari Sabtu, Tanggal 08 Februari 2025, sekitar pukul 20.53 Wita di Perairan Bone, sungai tuju-tuju, Desa /kelurahan Tarasu, Kecamatan Kajurua, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.	pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan, Mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak.	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Kasus di proses secara Hukum

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT
2	Illegal Fishing	H. HARIS BIN KAMARUDDIN	ALAT TANGKAP CANTRANG	pada hari Selasa, Tanggal 11 Maret 2025, sekitar pukul 16.20 Wita di wilayah perairan sebelah utara pulau Sarappo Lompo, Kec. Tupabbiring, Kab. Pangkep	pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PERMEN-KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon dan atau mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut	Penanganan Perkara dilakukan oleh bidang pengawasan sebagai ahli Sidik
3	Illegal Fishing	- Edi -Antoni	1 (Satu) Lembar Surat Berharga Dokumen Nota Penjualan 1 (Satu) Unit Angkutan (Darat, Laut, Udara) perahu Motor 2 (Dua) buah plastik tali tambang 2 (Dua) buah Lain-lain pemberat 1 (Satu) buah lain-lain alat tangkap ikan (Pair Trawl) Dan 1 (Satu) Lembar Surat Berharga Dokumen Nota Penjualan 2 (Dua) buah Lain-lain pemberat 2 (Dua) buah Lain-lain Alat Tangkap Ikan (Pair Trawl) 1 (Satu) unit Angkutan (Darat, Laut, Udara) Perahu Motor 1 (Satu) buah lain-lain Jaring Ikan Pukat Trawl	pada hari Selasa, 06 Mei 2025, sekitar pukul 11.46 Wita Jl. Pesisir Pulau Batanglampe, RT- RW-Titik Koordinat Lat 5.317.0305 Long 120.274903, Pulau Padaelo, Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan di hari yang sama dgn titik koordinat Lat 5.317092 Long 120.275, 710, Pulau Padaelo, Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.	Illegal Fishing UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 Juncto Pasal 9 Subsider Pasal 100 B	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK
4.	Illegal Fishing	Samsul Joni Bin Joni	Bahan Peledak Jenis bom Ikan	pada hari Rabu, Tanggal 11 Juni 2025, sekitar pukul 19.30 Wita di tepi pulau Pandangan, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep	Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN NO. 78 dalam perkara tindak pidana dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, di hukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun	Penanganan Perkara dilakukan oleh bidang pengawasan sebagai ahli Sidik
5.	BAHAN PELEDAK (BOM IKAN)	HENDRI bin TOLA	1. 6 (enam) batang diduga detonator Rakitan 2. 2 (dua) batang diduga sumbu api 3. 2 (dua) bungkus diduga serbuk bahan detonator rakitan 4. 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi serbuk bahan detonator 5. ± 15 lima belas Kg diduga pupuk amonium nitrate yang sudah tercampur minyak tanah 6. 2 (dua) karung yang berisi 5 kilogram pupuk merk cantik.	Pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 07.00 wita, team Subdit gakkum Ditpolairud Polda sulsel melakukan mapping dan pengumpulan informasi terkait lokasi penyimpanan bahan peledak dan setelah informasi terkumpul anggota subdit gakkum melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Sdr. HENDRI Bin TOLA yang berlatar di lingkungan bajo, RT/RW 002/002, kel/Desa Bajoe, Kec. Tanete riattang timur, Kab. Bone, Prov. Sulsel dan menemukan barang bukti yang diduga bahan peledak berupa bom ikan. Selanjutnya terduga pelaku Sdr HENDRI Bin TOLA ke Mako Ditpolairud Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. tentang senjata api, munisi, atau sesuatu bahan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT
6.	BAHAN PELEDAK (BOM IKAN)	RUSLIN Alias Pirang Bin H. MUHLIS,	a. 3 (tiga) djerjen warna merah ukuran 10 liter berisi pupuk amonium nitrate. b. 3 (tiga) jerigen warna merah ukuran 5 liter berisi pupuk amonium nitrate c. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 liter berisi pupuk amonium nitrate d. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 liter, berisi minyak tanah. e. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 2,5 liter berisi pupuk amonium nitrate. f. 3 (tiga) botol plastik ukuran 1,5 liter berisi pupuk amonium nitrate. g. 1 (satu) unit kompor mata seribu. h. 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg i. 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 liter berisi batu pemberat j. 1 (satu) buah baki diameter 50 cm k. 2 (dua) botol plastik berisi batu pemberat. l. 2 (dua) buah baskom warna hijau diameter 50 cm m. 5 (lima) kemasan kosong pupuk cantik ukuran 5 kg n. 1 (satu) buah sendok panjang pengaduk wajan o. 1 (satu) unit mesin penggiling merk Honda 5 Pk. p. 1 (satu) buah wajan diameter 60 cm	Pada hari Minggu tanggal 13 April 2025, sekitar pukul 20.30 wita Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel tiba di Pulau Pandangan, Kecamatan Iukang tumpangbiring, Kabupaten Pangkep, Prov. Sulsel, dan langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di gudang kosong yang berdasarkan informasi bahwa di dalam gudang tersebut sering di gunakan untuk mengolah bahan peledak Bom Ikan. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 orang yang berada didalam gudang bersama barang bukti berupa jerigen dan botol yang berisi bom ikan. Selanjutnya personil subdit gakkum Ditpolairud Polda Sulsel bersama 2 orang yang ditemukan dalam gudang menuju ke rumah Sdr RUSLIN Alias PIRANG. Selanjutnya personil subdit gakkum mengamankan barang bukti dan terduga pelaku dibawa menuju ke Mako Ditpolairud Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. tentang senjata api, munisi, atau sesuatu bahan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK
7.	BAHAN PELEDAK (BOM IKAN)	AYUNG Bin HADIR	a. 1 (satu) buah baskom berisi 25 kg pupuk amonium nitrate yang sudah tercampur minyak tanah b. 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk paranak yang belum tercampur cat perak. c. 29 (dua puluh sembilan) batang detonator rakitan terangkai sumbu api. d. 1 (satu) buah botol plastik bekas ukuran 330 ml berisi serbuk paranak yang telah tercampur cat perak.	Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 05.00 WITA, Personil Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap sebuah rumah milik Sdr. AYYUNG di Jl. Kampung bajo, RT/RW 001/001, Desa/Kel Bajoe, Kec. Taneite riatang timur, Kab. Bone Prov Sulsel. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti bahan peledak berupa pupuk amonium nitrate yang telah dicampur minyak tanah yang disimpan didalam sebuah baskom sebanyak 25 kg dan detonator rakitan terangkai sumbu api sebanyak 29 batang yang diakui kepemilikannya oleh Sdr AYYUNG. Kemudian Personil mengamankan terduga pelaku dan barang bukti dan membawa ke Kantor Dit Polairud Polda Sulsel untuk proses lebih lanjut.	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. tentang senjata api, munisi, atau sesuatu bahan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK
8.	BAHAN PELEDAK (BOM IKAN)	MURSIDI Bin LAUDU,	a) 22 batang diduga sumbu api yang terangkai Detonator rakitan b) 19 (sembilan belas) batang diduga detonator c) 4 (empat) bungkus diduga berisi ikan dan detonator oleh nelayan di perairan Pasimatallu Kabupaten Selayar d) 1 (satu) botol plastik diduga berisi pupuk amonium nitrate e) 3 (tiga) keping obat nyamuk f) 9 (sembilan) Pack korek kayu merk Agogo g) Potongan karet sendal jepit yang dipergunakan sebagai penutup botol h) 4 (empat) batang besi pematik sumbu api. i) 1 (satu) bungkus plastik pengantar / peranak j) + 2 meter selang diduga bahan bahan sumbu api k) ½ karung pupuk merk cantik l) ½ baskom 50 cm m. 5 (lima) kemasan kosong pupuk cantik ukuran 5 kg	Pada hari selasa tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 07.30 wita, team subdit gakkum ditpolairud polda sulsel melakukan penyelidikan terkait bahan peledak / bom ikan dan detonator oleh nelayan di perairan Pasimatallu Kabupaten Selayar Prov. Sulsel. Selanjutnya team subdit gakkum ditpolairud polda sulsel yang melakukan maapping dan pengumpulan informasi terkait lokasi penyimpanan bahan peledak dan setelah informasi terkumpul team subdit gakkum subdit gakkum ditpolairud polda sulsel melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Sdr MURSIDI Bin LAUDU yang berlatar di jalan dusun kampung tengah, RT/RW 000/000. Kel./desa tambuna, Kec. Takabonerate, Kabupaten selayar dan ditemukan barang bukti yang diduga bahan peledak. Setelah melakukan pemeriksaan tim subdit gakkum ditpolairud polda sulsel membawa MURSIDI Bin LAUDU ke Mako Ditpolairud Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. tentang senjata api, munisi, atau sesuatu bahan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Selayar

Lanjutan.....

9.	BAHAN PELEDAK (BOM IKAN)	H. LEWA Bin UDDING,	a. 5 (lima) karung ukuran 25kg berisi pupuk amonium nitrat b. 1 (satu) karung ukuran 50 kg berisi 1/2 merek cantik c. 50 (lima puluh) jergen warna putih ukuran 5 liter berisi pupuk amonium nitrat d. 3 (tiga) jergen warna kuning ukuran 2.5 liter berisi pupuk amonium nitrat e. 9 (sembilan) botol plastik ukuran 1.5 liter berisi pupuk amonium nitrat f. 4 (empat) botol plastik ukuran 1.5 liter isi 1/2 pupuk amonium nitrat g. 3 (tiga) botol plastik ukuran 1 liter berisi pupuk amonium nitrat h. (enam belas) botol plastik ukuran 600 ml berisi pupuk amonium nitrat i. 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml berisi 1/2 pupuk amonium nitrat j. 1 (satu) buah lain-lain Jaring Ikan Pukat n. 1 (satu) buah sendok panjang pengaduk wajan o. 1 (satu) unit mesin penggiling merk Honda 5 PK p. 1 (satu) buah wajan diameter 60 cm	Pada hari Senin Tanggal : 15 April 2025, pers KP Pelikan - 5008 dan Anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel mendapat informasi terkait Penyalahgunaan Bahan Peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Nelayan yang berada di Pulau Lumu lumu Kecamatan sangkarrang Kota Makassar Prov. Sulsel. Pada pukul 17.00 wita Tim Gabungan yang dipimpin capri KP Pelikan Kompol RESKA ARDI WIBOWO, SH didampingi pers subdit GAKKUM POLDA Sulsel PTU Abdul Malik menuju Pulau lumu lumu dengan speed boat di tempuh dalam waktu ± 1 jam. Sekitar pukul 17.00 wita tim gabungan tiba di pulau lumu lumu langsung menuju lokasi pemeriksaan dan penggeledahan di rumah sasaran. Setelah dilakukan penggeledahan di temukan bahan peledak (bom ikan).Selanjutnya tim gabungan bergerak cepat mengamankan barang bukti dan terduga pemilik bahan peledak (bom ikan).	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. tentang senjata api, munisi, atau sesuatu bahan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Mamminasata sebagai AHLI SIDIK	P 21 TAHAP II
10.	BAHAN PELEDAK (BOM IKAN)	MISWAR ALIAS CIWANG BIN SAHAR,	a. 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 liter di duga berisi Pupuk Amonium Nitrate b. 9 (Sembilan) botol kaca di duga berisi pupuk amonium nitrate c. 1 (satu) botol kaca keol di duga berisi pupuk amonium nitrate d.1 (satu) botol plastik di duga berisi serbuk pemicu. e. 2 (dua) botol plastik ukuran 1.5 Liter di duga berisi pupuk amonium nitrate f. + 1 (satu) meter selang kecil transparan di duga sebagai bahan sumbu api.	Pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, team Pos Polairud Luwu Ditpolairud Polda Sulsel di Pimpin Oleh Bripta Muh Irfan Tory melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Bahan Peledak oleh Nelayan Selanjutnya sekitar Pukul 05.00 Wita team Pos Polairud Luwu Ditpolairud Polda Sulsel yang melakukan Mapping dan pengumpulan informasi terkait lokasi penyimpanan dan orang yang di duga melakukan penyalahgunaan bahan peledak dan setelah informasi terkumpul team Pos Polairud Luwu Ditpolairud Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sdr MISWAR ALIAS CIWANG BIN SAHAR	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. tentang senjata api, munisi, atau sesuatu bahan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD	P 21 TAHAP II
11.	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN KAPAL)	RISAL Bin DG. MUNTU	a. 1 (satu) Unit KMN BUANA RESKY 03 b. 1(satu) Bundel KMN c. 1 (satu) unit alat tangkap	Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, pukul 16.00 Wita, team Gabungan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel mencurigai dan melakukan pemeriksaan diatas KMN BUANA RESKY 03 diperairan bonetambung, Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan dengan koordinat 050 28' 45" S dan 1190 25' 54" E. Pada saat dilakukan pemeriksaan diatas KMN BUANA RESKY 03 ditemukan diduga tindak pidana mengoperaskan kapal penangkap ikan diwilayah perikanan republik indonesia dan / atau dilaut lepas yang tidak memenuhi Perizinan berusaha. Selanjutnya terduga pelaku dan barang	Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD	Pelimpahan Perkara ke CDK PANGKEP
				Bukti dibawa menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.			

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
12.	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN KAPAL)	HAMZA Bin DG BASSANG	a. 1 (satu) Unit KMN PUTRI JAYA 57 GT 24 b. 1 (satu) Bundel KMN PUTRI JAYA 57 GT 24 c. 1 (satu) unit alat tangkap Jaring tarik berkantong d. + 8 (delapan) gabus ikan jenis campuran	Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, pukul 16.00 Wita, team Gabungan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel mencurigai dan melakukan pemeriksaan diatas KMN KMN PUTRI JAYA 57 GT 24 diperairan sebelah timur Bontosua, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep Prov Sulawesi Selatan dengan koordinat 040 90' 535" S dan 1190 28' 938" E. Pada saat dilakukan pemeriksaan diatas KMN PUTRI JAYA 57 GT 24 ditemukan diduga tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan diwilayah perikanan republik indonesia dan /atau dilaut lepas yang tidak memenuhi Perizinan berusaha. Selanjutnya terduga pelaku dan barang	Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD	Pelimpahan Perkara ke CDK PANGKEP
				Bukti dibawa menuju ke Kantor Ditpolairud Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.			
13.	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN KAPAL)	TAKDIR Bin DG MANYE	a. 1 (satu) unit KMN BAJI MINASA b. 1 (satu) Bundel KMN BAJI MINASA c. 6 (enam) gabus ikan campur hasil tangkapan	Pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, Pukul 09.15 Wita, team gabungan subdit gakkum Ditpolairud Polda Sulsel mencurigai dan melakukan pemeriksaan diatas Kapal KMN BAJI MINASA di perairan Pulau barrang lompo Kec. Sangkaran, Kota Makassar Prov. Sulsel dengan Koordinat 05. 42' 31' S dan 119. 22' 151" E. Pada saat dilakukan pemeriksaan diatas KMN BAJI MINASA ditemukan diduga tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan diwilayah perikanan republik indonesia dan / atau dilaut lepas yang tidak memenuhi Perizinan berusaha. Selanjutnya terduga pelaku dan barang bukti dibawa menuju ke Makro Ditpolairud Polda Sulsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.	Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Mamminasata sebagai AHLI SIDIK	Pelimpahan Perkara ke DPK CABANG MAMMINASATA
14	BAHAN PELEDAK (BOM IKAN)	ADLI BIN MURSALIM	a. 1 (satu) jerigen warna merah berisi pupuk amonium nitrate. b. 4 (empat) botol kaca berwarna hijau ukuran 620 ml berisi pupuk amonium nitrate. c. 1 (satu) botol kaca bening ukuran 930 ml berisi pupuk amonium nitrate. d. 1 (satu) botol kaca bening ukuran 420 ml berisi pupuk amonium nitrate. e. 1 (satu) botol plastik bekas ukuran 500 ml berisi pupuk amonium nitrate. f. 1 (satu) botol plastik bening ukuran 1500 ml berisi + 300 ml berisi serbuk paranak. g. 37 (tiga puluh tujuh) sumbu rakitan siap pakai. h. 4 (empat) batang detonator rakitan / lappa-lappa. i. 6 (enam) batang	Pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, sekitar pukul 20.00 WITA, anggota Intel Air Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel melakukan pemeriksaan dan pengecekan didalam rumah terduga pelaku ADLI Bin MURSALIM dan ditemukan beberapa botol dan jerigen yang berisikan pupuk amonium nitrate dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah berisi detonator rakitan (lappa- lappa) dan beberapa sumbu rakitan siap pakai, sehingga anggota melakukan interogasi awal terhadap lelaki ADLI Bin MURSALIM, dan mengakui bahwa bahan peledak yang ditemukan adalah miliknya yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Sehingga pada saat itu anggota menanyakan dokumen terkait kepemilikan bahan peledak namun lelaki ADLI Bin MURSALIM tidak dapat menunjukkan, sehingga pada saat itu lelaki ADLI Bin MURSALIM beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Sulsel	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. tentang senjata api, munisi, atau sesuatu bahan	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	P21

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
			detonator rakitan mini. j. 1 (satu) Bungkus serbuk putih isi detonator pabrik. k. 1 (satu) buah ember warna hitam berisi ¼ pupuk amonium nitrate. l. 4 (empat) lembar seng plat yang sudah digunting. (satu) buah gunting. m. 1 (satu) buah pisau. n. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru	untuk proses lebih lanjut.			
15.	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN KAPAL)	INCEK AHMAD ALIAS DG CADDI Bin ANCE SAMPARA	a. 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter diduga berisi pupuk amonium nitrate. b. 4 (empat) botol plastik diduga berisi pupuk amonium nitrate siap pakai. c. 1 (satu) botol plastik diduga berisi pupuk amonium nitrate. d. 1 (satu) buah korek api gas. e. 1 (satu) buah sabut kelapa.	Pada hari jumat tanggal 08 Agustus tahun 2025, Personil Intel Air Subdit gakkum Ditpolairud Polda Sulsel melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Bahan peledak Bom ikan di perairan pulau Barrang Lompo Kec Sangkarrang kota makassar, dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. INCEK AHMAD Bin ANCE SAMPARA, dan ditemukan barang bukti berupa bahan peledak Bom ikan. Selanjutnya Personil Subdit gakkum mengmankan pelaku dan Barang bukti ke Mako Ditpolairud Polda Sulsel Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.	Pasal 1 ayat (1) UU darurat No 12 tahun 1951 Jo pasal 56 Ke - 2 KUH Pidana.	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Mamminasata sebagai AHLI SIDIK	Tahap I
16.	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN KAPAL)	SOFYAN Bin USMAN,	a. 1 (satu) unit Kapal KMN AFDAL ABISAR 02 b. 1 (satu) set alat tangkap jaring c. 4 (empat) Boks ikan hasil tangkapan jenis campuran.	Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 Wita, Personil Subdit gakkum Ditpolairud Polda Sulsel mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya kapal nelayan beroperasi melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang, di perairan Kab, Bone, Sulawesi Selatan. Personil Subdit gakkum Ditpolairud Polda Sulsel kemudian bergerak menuju sebelah timur tanggul Bajoe, Kab. Bone, sulsel dan mendapatkan KMN AFDAL ABISAR 02 GT 18 yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang. Selanjutnya anggota subdit gakkum melakukan interogasi terhadap Nahkoda kapal KMN	Pasal 27 UU RI No 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Citpta Kerja.	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Pelimpahan Perkara ke Kantor DKP CDK BOSOWASI Kab. Bone, Prov. Sulsel.
				AFDAL ABISAR 02 GT 18 dan menerangkan kapal tersebut melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak dilengkapi dengan Dokumen kapal.Selanjutnya personil mengamankan pelaku dan membawa ke Kantor Ditpolairud Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.			

Lanjutan.....

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	PASAL YANG DIGUNAKAN	TINDAK LANJUT	HASIL
17	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN KAPAL)	HARMOKO Bin AMBO TUO.	a. 1 (satu) unit kapal KMN DIKA JAYA 02 GT 20 b. 1 (satu) bundel Dokumen kapal KMN DIKA JAYA 02 c. 1 (satu) alat tangkap diduga jaring d. 10 (sepuluh) gabus ikan hasil tangkapan.	Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, tema subdit gakkum Ditpolairud Polda Sulsel melakukan penyelidikan terkait adanya nelayan yang sering melaukan penangkapan ikan. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, team subdit gakkum Ditpolairud Polda Sulsel melakukan penyelidikan diwilayah perairan kampung Bajo, Kec. Tanete riattang timur, Kab. Bone, personil menemukan KMN DIKA JAYA 02 GT 20 yang diduga telah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen Kapal yang sah. Selanjutnya Nahkoda kapal diamankan dan dibawa menuju ke Mako Ditpolairud Polda Sulsel Untuk	Pasal 27 UU RI No 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	Penanganan Perkara dilakukan oleh POLAIRUD dan melibatkan CDK Bosowasi sebagai AHLI SIDIK	Pelepasan Perkara ke Kantor DKP BOSOWASI Kab. Bone, Prov. Sulsel
18	ILLEGAL FISHING (BOM IKAN)	1. PENDI Bin DG. NUHUNG, 2. ABD. MUIS Als H. GONRONG Bin H. MUHLIS, 3. MANSYUR Bin H. SABO	Pada hari selasa tgl 23 september 2025 sekitar jam 15.00 wita Anggota subdit gakkum mendapat informasi dari informan bahwa terduga pelaku destructive fishing (bom ikan) inisial P Menguasai Bahan peledak (bom ikan) di rumahnya, kemudian sekitar pukul 18.10 wita anggota subdit gakkum tiba di Pulau Kodingareng, Kec. Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dan langsung bergerak menuju rumah terduga pelaku melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan bahan peledak (bom ikan) siap pakai sudah berada di dalam kemasan botol dan jerigen, anggota subdit gakkum ditpolair juga menemukan beberapa batang detonator rakitan (lappa-lappa) dan juga sumbu siap	a. 17 (tujuh belas) Jerigen ukuran 5 liter diduga berisi ammonium nitrate. b. 4 (empat) botol plastik ukuran 1.5 liter diduga berisi ammonium nitrate. c. 8 (delapan) batang detonator pabrik beserta sumbu siap pakai. d. 9 (Sembilan) buah sumbu api rakitan e. 13 (tiga belas) detonator rakitan (lappa-lappa) sudah terakit dengan sumbu siap pakai. f. 31 (tiga puluh satu) batang detonator rakitan (lappa - lappa) g. Sumbu sepanjang + 2,9 meter		Penanganan Perkara dilakukan oleh POLAIRUD dan melibatkan CDK Mamminasata sebagai AHLI SIDIK	SIDIK
			pakai yang diduga milik dari Lk ABD. MUIS Alias H. GONDRONG Bin SANGKALA. Kemudian Personil mengamankan terduga pelaku dan barang bukti dan membawa ke Kantor Dit Polairud Polda Sulsel untuk proses lebih lanjut.				
19	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN KAPAL)	SYARIFUDDIN Bin DG. DOLLAHI	a. 1 (satu) kapal KMN. MALOMOE 02 GT. 27 b. 1(satu) set alat tangkap berupa jaring Trawl (cantang) c. 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN. MALOMOE 02 GT. 27	Pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2025, sekitar pukul 12.00 wita anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kapal Nelayan yang sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang diperairan Kab. Pangkep Prov. Sulsel, Sekitar pukul 12.30 wita Personil Subdit Gakkum bergerak menuju di perairan sebelah barat Pulau Balanglombo Kab. Pangkep Prov. Sulsel, pada pukul 13.30 mendapatkan kapal KMN. MALOMOE 02 GT 27 yang sementara melakukan penangkapan ikan diduga menggunakan alat tangkap yang dilarang (Cantang). Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Sulsel untuk proses lebih lanjut.	Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100 B sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	Penanganan Perkara dilakukan oleh POLAIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	PELIMPAHAN PERKARA KE KANTOR CAB. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKEP

Sumber : laporan Tahunan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Lampiran 9. Data Penanaman Mangrove dan Transplantasi Karang TA 2025

➤ **Penanaman Mangrove**

No	Usulan Lokasi	Volume	Status lahan	Pengusul	keterangan
1	Kabupaten Bone	35.602 Batang/0,7 Ha	Lama	Dinas perikanan Kab Bone/CDK Bosowasi	Desa Padatuo Kec. Tonra 4°54'17" S 120°18'35" E
2	Kabupaten Jeneponto	35.602 Batang/0,7 Ha	Lama	Dinas perikanan Kab Jeneponto/CDK Wilayah Selatan	Desa Pallengu, Kec. Bangkala 5°36'07" S 119°33'08" E
3	Kabupaten Pangkep	35.602 Batang/0,7 Ha	Baru	Dinas perikanan Kab Pangkep/CDK Pangkep	Pulau Sabangko Ds. Mattiro Bombang Kec. Liukang Tupabiring Utara 4°42'31" S 115°28'30" E
4	Kabupaten Pinrang	35.602 Batang/0,7 Ha	Baru	Dinas perikanan Kab Pinrang/CDK Ajatappareng	Kel. Watang Suppa Kec. Suppa 3°58'27" S 119°35'56" E
5	Kabupaten Takalar	35.621 Batang/0,7 Ha	Baru	Dinas perikanan Kota Makassar/CDK Mamminasata	Ds. Mattirobaji Pulau Satanga Kec. Tanakeke Kepulauan Tanakeke 5°26'29" S 119°13'19" E
6	Kabupaten Selayar	35.602 Batang/0,7 Ha	Lama	Dinas perikanan Kab Selayar/CDK Selayar	Desa/Kel. Bonto Bangun Kec. Bontoharu 6°09'07" S 120°26'58" E
7	Kabupaten Luwu	35.602 Batang/0,7 Ha	Baru	Dinas perikanan Kota Palopo/CDK Luwu Raya	Desa Kamiri, Kec. Bua 3°10'51" S 120°19'14" E
Jumlah		249.233 batang	Lama : 2,1 Ha Baru : 2,8 Ha		

➤ **Transplantasi Karang**

No	Usulan Lokasi	Volume		Pengusul	keterangan
1	Kota Makassar	1.047 Unit	0,104 Ha	Hasil Verifikasi Lokasi dan Pendampingan dari Kota Makassar	Pulau Baranggaddi Kel. Baranggaddi kec. Sangkarrang (5.126637, 119.343529)
2	Kabupaten Pinrang	1.047 Unit	0,104 Ha	Dinas Perikanan Kab. Pinrang	- Kompak Tanah Dewata Desa Ujung Labuang Kec. Suppa, (-4.013944,119.603129) - Lima Putra Pesisir Desa. Wiring Tasi, Kec. Suppa (-3.9850455,119.5741758)
3	Kabupaten Sinjai	1.047 Unit	0,104 Ha	Pemerintah Desa Kab. Sinjai	Desa Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan Lat : -5,11439, Lng : 120,39431

Sumber : laporan Tahunan Bidang PRL Tahun 2025

Lampiran 10. Data kasus *illegal fishing* atau pelanggaran/tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah CDK Wilayah Selatan selama Tahun 2025

NO	Jenis Kasus / Jenis Pelanggaran TPP	Nama Pelaku / Tersangka	Barang Bukti	Waktu dan Tempat Kejadian (TKP)	Pasal Yang Disangkakan	Keterangan
1	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Dg. Sibali	KMN. Cahaya Fitrah 2	Tanggal 12 Maret 2025 di PPI Kajang Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Kapal tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah selatan apabila tidak memiliki dokumen SLO dan SIB
2	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Suardi	KMN. Wahyu Jaya 4	Tanggal 12 Maret 2025 di PPI Kajang Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Kapal tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah selatan apabila tidak memiliki dokumen SLO dan SIB
3	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Saki Dg. Siala	KMN. Cahaya Fitrah 04	Tanggal 12 Maret 2025 di PPI Kajang Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Kapal tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah selatan apabila tidak memiliki dokumen SLO dan SIB
4	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Suardi	KMN. Anita Jaya	Tanggal 26 Juni 2025 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Kapal tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah selatan apabila tidak memiliki dokumen SLO dan SIB
5	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Arifuddin	KMN. Ilham Hidayat	Tanggal 26 Juni 2025 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Kapal tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah selatan apabila tidak memiliki dokumen SLO dan SIB
6	Tidak membawa dokumen SLO dan SIB pada saat melakukan penangkapan ikan di laut	Melly Asni	KMN. Difa Mandiri 01	Tanggal 26 Juni 2025 di PPI Bonto Bahari Kab. Bulukumba	Pasal 26,27 dan 43 tentang dokumen kapal SLO, SIUP, SIPI, dan Pasal 92 dan 93 tentang ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan	Kapal tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah selatan apabila tidak memiliki dokumen SLO dan SIB

Sumber : CDK Wilayah Selatan 2025

Lampiran 11. Data Tindak Pidana Perikanan yang Ditemukan di Wilayah CDK Bosowasi Tahun 2025

No	Nama tersangka	Pasal yang dilanggar	Jenis Tindak Pidana	Putusan
1	AA Bin B Dusun Macedde, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone	Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang	Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia	Putusan Pengadilan Negeri No. 120/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 21 November 2024 pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2	AS Bin ASA Lagoppo Desa Masangkae Kec.Kajuara Kab.Bone.	Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, terakhir di ubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	“dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”	Putusan Pengadilan Negeri Sinjai 114/Pid.Sus/2024/PN Snj. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3	A Bin A M	Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, terakhir di ubah dengan UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,	Putusan Pengadilan Negeri Sinjai 113 / Pid. Sus / 2024 / PN Snj. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4	NHJ Bin B Pulau Kodingare RT/RW 003/002 Desa Padaelo Kec Pulau Sembilan Kab Sinjai	Pasal 84 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 9 huruf a UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”	Putusan Pengadilan Negeri 75/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 12 Agustus 2025 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Lanjutan.....

No	Nama tersangka	Pasal yang dilanggar	Jenis Tindak Pidana	Putusan
5	A Alias A Bin MT Dusun Ulunipa, Desa Manera, Kec.Salomekko, Kabupaten Bone	Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terakhir sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Tindak pidana memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil	Putusan Pengadilan Negeri No. 80/Pid.Sus/2025/PN Snj tanggal 11 September 2025 pidana pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6	E Bin N Dusun Ulunipa, Desa Manera, Kec. Salomekko, Kabupaten Bone.	Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terakhir sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	“Tindak pidana memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil	Putusan Pengadilan Negeri Sinjai 79/Pid.Sus/2025/PN Snj 11 September 2025 Pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Sumber Data : CDK Bosowasi

Lampiran 12. Data Tindak Pidana Perikanan yang Ditemukan di Wilayah CDK Pangkep Tahun 2025

No	Jenis Kasus	Nama Pelaku	Barang Bukti	Pasal yang digunakan	Keterangan	Hasil
1	Illegal Fishing Penggunaan Alat Tangkap Tidak Sesuai Ketentuan	- H. Haris Bin Kamaruddin - Andika Bin Rifai Daeng Alle - Dassir Bin Muse - Idris Bin Kamaruddin - Asri Bin Tetta Sehu - Insar Bin Hallaju - Aidil Bin Batola - Jumain Bin Saleng - Wandu Bin Samsul - Ramli Bin Tala	Bukti ikan berjumlah 7 (tujuh) gabus berukuran sedang yang terdiri dari ikan ciko-ciko, ikan merah, ikan bete-bete dan ikan cilala, yang merupakan hasil tangkapan dengan menggunakan alat tangkap terlarang yaitu jaring tarik jenis Cantrang	Pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan atas perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo PERMEN-KP No.18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas serta penataan andon	Penanganan Perkara dilakukan oleh POL AIRUD dan melibatkan CDK Pangkep sebagai AHLI SIDIK	Putusan Pengadilan
2	Illegal Fishing - Penggunaan Alat Tangkap Tidak Sesuai Ketentuan	Syarifuddin Bin Dg. Dollahi	-1 (satu) buah kapal KMN. Malomoe 02 GT 27 - 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN. Malomoe 02 GT 27 - 1 (satu) set alat tangkap berupa jaring	Pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan atas perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo PERMEN-KP No.18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Laut Lepas serta penataan andon	Pelimpahan ke Penyidik Perikanan CDK Pangkep	Pembinaan dengan ketentuan tidak menggunakan mata jaring 1 inchi

Sumber Data : CDK Pangkajene dan Kepulauan

Lampiran 13. Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan CDK Ajatappareng tahun 2025

No	Lokasi Patroli/Pemantauan Kapal	Nama/Identitas Kapal yang diawasi/dipantau	Nama Pelaku Usaha	Alat Tangkap	*Patuh atau Tidak Patuh (isi salah satu)	Keterangan (alasan tidak kepatuhan)
Triwulan I 2025						
1	PPI Cempae	Sinar Lestari 87	Nurdin	Purse Seine	Patuh	
2	PPI Cempae	Cahaya Suku	Abdul Karim	Purse Seine	Patuh	
3	PPI Cempae	Cahaya Rasul	Muhammad	Purse Seine	Patuh	
4	PPI Cempae	Sukaria 10	Erwin	Purse Seine	Patuh	
5	PPI Cempae	Kurniaallahi 01	Suparman	Pancing	Tidak Patuh	Tidak Bawa TDKP
6	PPI Cempae	Nurmadina 05	Multasam	Purse Seine	Patuh	
Triwulan II 2025						
1	PPI Lero (Pinrang)	Hidup Baru 75	Samsul	Purse Seine	Patuh	
2	PPI Lero (Pinrang)	Cahaya Suku	Abdul Karim	Purse Seine	Patuh	
3	PPI Lero (Pinrang)	Losmen II	Seini Umar	Purse Seine	Patuh	
4	PPI Lero (Pinrang)	Jabal Rahma 5	H.M. Amin	Purse Seine	Patuh	
5	PPI Lero (Pinrang)	Mizab Rahmah	Rifai	Purse Seine	Patuh	
6	-4.043792, 119.564220	Putra Rejeki	Pillo	Pancing Ulur	Tidak Patuh	Tdk Memiliki Dokumen Kelaikan
7	-4.024368, 119.565388	Kasih sayang 01	Rahmat	Purse Seine	Patuh	
8	-3.991733, 119.556431	Mamminasae	Amirullah	Bagan Perahu	Tidak Patuh	Tidak membawa dokumen kapal melaut
9	-4.012324, 119.542410	Harapan muda	Ichsan	Pancing Ulur	Patuh	
10	-4.067101, 119.540463	Siqri 01	Hamka	Pancing Ulur	Patuh	
11	-4.057778, 119.561883	Hikmah Utama	Amin	Pancing Ulur	Tidak Patuh	Tidak membawa dokumen kapal melaut
12	-4.062440, 119.587198	Cahaya Fitri 09	Abdullah	Pancing Ulur	Patuh	
13	-3.954823, 119.511643	Tassbih	Abu	Gill net	Patuh	
14	-3.962983, 119.541631	Losmen II	Saeni Umar	Purse Seine	Patuh	
15	-3.931511, 119.491002	Lero ujung	Umar	Pancing Ulur	Tidak Patuh	SIPI Habis masa berlakunya
16	-3.933454, 119.522158	Kasih sayang 02	Kamarudin	Purse Seine	Patuh	
Triwulan III 2025						
1	PPI Cempae	Harta Mulia	Saripuddin	Pancing Ulur	Patuh	
2	PPI Cempae	Nurlia Indah	Hamsar	Pancing Ulur	Patuh	
3	PPI Cempae	Swo 198	Ramali	Pancing Ulur	Patuh	
4	PPI Cempae	Fadel	Nudin usman	Pancing Ulur	Patuh	
5	PPI Cempae	nurmadina	musdar	Pancing Ulur	Patuh	
6	PPI Cempae	oce	Hamsi	Pancing Ulur	Patuh	
7	PPI Cempae	buana hawa	muskading	Pancing Ulur	Patuh	
8	PPI Cempae	Air Zamzam	hansari	Pancing Ulur	Patuh	
9	PPI Cempae	kurnela	suardi	Pancing Ulur	Patuh	
10	PPI Cempae	cahaya passarang 02	muhammad	Pancing Ulur	Patuh	
11	PPI Cempae	hajar aswad	basri	Pancing Ulur	Patuh	
12	PPI Cempae	aptraya	syaruddin	Pancing Ulur	Patuh	
13	PPI Cempae	paindo kaiba	rahman	Pancing Ulur	Patuh	
14	PPI Cempae	dian widiya	waris	Pancing Ulur	Patuh	

Lanjutan.....

No	Lokasi Patroli/Pemantauan Kapal	Nama/Identitas Kapal yang diawasi/dipantau	Nama Pelaku Usaha	Alat Tangkap	*Patuh atau Tidak Patuh (isi salah satu)	Keterangan (alasan tidak kepatuhan)
15	PPI Cempae	jabal arafah	rajab	Pancing Ulur	Patuh	
16	PPI Cempae	Aluwiar	Ahyar	Pancing Ulur	Patuh	
17	PPI Cempae	Nurmadina	Masdar	Pancing Ulur	Patuh	
Triwulan IV 2025						
1	PPI Cempae	Pammase	Sali	Pancing Ulur	Patuh	
2	PPI Cempae	Sabran	Irfan	Pancing Ulur	Patuh	
3	PPI Cempae	Melati	Bilal	Pancing Ulur	Patuh	
4	PPI Cempae	cahaya jihan	akbar	Pancing Ulur	Patuh	
5	PPI Cempae	nurhidaya	kaco	Pancing Ulur	Patuh	
6	PPI Cempae	alfiat raya	syaruddin	Pancing Ulur	Patuh	
7	PPI Cempae	reiysa purnama	jumardi	Pancing Ulur	Patuh	
8	Sumpang Minangae	Tayyo	Bahru	Perre-perre	Tidak Patuh	Tidak memiliki Pas Kecil
9	Sumpang Minangae	Merpati	Syaripuddin	Perre-perre	Tidak Patuh	Tidak memiliki Pas Kecil
10	Sumpang Minangae	Rezki	Ridwan	Perre-perre	Tidak Patuh	Tidak memiliki Pas Kecil
11	Sumpang Minangae	H3R	Rukmin	Perre-perre	Tidak Patuh	Tidak memiliki Pas Kecil
12	Sumpang Minangae	Mutiara 02	Nonding	Perre-perre	Tidak Patuh	Tidak memiliki Pas Kecil
13	Sumpang Minangae	Fathur	Laonggo	Perre-perre	Tidak Patuh	Tidak memiliki Pas Kecil
14	Sumpang Minangae	Tiga A	Sardin	Perre-perre	Tidak Patuh	Tidak memiliki Pas Kecil
15	PPI Lero	doa bersama	jamal	Pancing Ulur	Patuh	
16	PPI Lero	bunga indah 2	hariadi	Pancing Ulur	Patuh	
17	PPI Lero	kurnia ilahi 03	mahmudi	Pancing Ulur	Patuh	
18	PPI Lero	suka damai	here	Pancing Ulur	Patuh	
19	PPI Cempae	Elang samudra 01	jais	Pancing Ulur	Patuh	
20	PPI Cempae	gelora	abdul raoh	Pancing Ulur	Patuh	
21	PPI Cempae	cahaya alam	ramasa	Pancing Ulur	Patuh	

Sumber : laporan Tahunan Ajatappareng 2025

Lampiran 14. Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan CDK Luwu Raya Tahun 2025

No	Lokasi Patroli/Pemantauan Kapal	Nama/Identitas Kapal yang diawasi/dipantau	Nama Pelaku Usaha	Alat Tangkap	*Patuh atau Tidak Patuh (isi salah satu)	Keterangan (alasan tidak kepatuhan)
Triwulan I 2025						
1	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	KMN Saldi 01 (GT:6)	Asri, SE	Bagan Perahu	Patuh	SIUP (6 Januari 2022 s/d tgl 5 Januari 2027), SIPI (10 Januari 2025 s/d 9 Januari 2026)
2	Pelabuhan Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu	KMN Bintang Harapan BLK 07 (GT:14)	Ismail Marzuki	Kapal Pengangkut	Patuh	SIUP (25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2017), SIKPI (12 November 2024 s/d 11 November 2025)

Lanjutan.....

No	Lokasi Patroli/Pemantauan Kapal	Nama/Identitas Kapal yang diawasi/dipantau	Nama Pelaku Usaha	Alat Tangkap	*Patuh atau Tidak Patuh (isi salah satu)	Keterangan (alasan tidak kepatuhan)
Triwulan I 2025						
3	Pelabuhan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu	KMN Linda Buana 02 (GT:28)	Kasman N	Purse Saine	Patuh	SIUP (10 Maret 2025 s/d 9 Maret 2030), SIPI (11 Maret 2025 s/d 10 Maret 2026)
4	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN Arfan 02 (GT:18)	Martang Dg. Pagala	Purse Saine	Patuh	SIUP (10 Maret 2025 s/d 9 Maret 2030), SIPI (11 Maret 2025 s/d 10 Maret 2026)
5	PPI Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur	KMN Buana Bahari 495 (GT:15)	Agussalim Laemmang	Purse Saine	Patuh	SIUP (24 Desember 2024 s/d 23 Desember 2029), SIPI (27 Desember 2024 s/d 26 Desember 2025)
6	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN Mekar 01	Nilawati	Purse Saine	Tidak Patuh	Belum Memiliki Izin SIUP dan SIPI
7	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN Arsy AR	Rika	Purse Saine	Tidak Patuh	Belum Memiliki Izin SIUP dan SIPI
8	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN Bunga Waru (GT:11)	Abdul Hamid	Purse Saine	Tidak Patuh	Belum Memiliki Izin SIUP dan SIPI
Triwulan II 2025						
1	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	KMN King Fisher (GT:6)	Kiki Muchtar, S.Pd	Bagan Perahu	Patuh	SIUP (12 Januari 2023 s/d 11 Januari 2028), SIPI (25 April 2025 s/d 24 April 2026)
2	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN Dzaky (GT:6)	Muslim	Bagan Perahu	Patuh	SIUP (18 April 2023 s/d 17 April 2028), SIPI (16 Mei 2025 s/d 15 Mei 2026)
3	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN Imilea 01 (GT:29)	Junaedy/Bu di	Bubu	Patuh	SIUP (23 Mei 2025 s/d 22 Mei 2030), SIPI (23 Mei 2025 s/d 22 Mei 2026)
4	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN Imilea 02 (GT:29)	Junaedy/Bu di	Bubu	Patuh	SIUP (23 Mei 2025 s/d 22 Mei 2030), SIPI (23 Mei 2025 s/d 22 Mei 2026)
5	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Palopo	KMN BUNGAWARU (GT:11)	Abdul Hamid	Purse Saine	Patuh	SIUP (23 Mei 2025 s/d 22 Mei 2030), SIPI (23 Mei 2025 s/d 22 Mei 2026)
6	Kel.Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab.Luwu	KMN Mandala Timur (3 GT)	Nasrullah	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Pas kecil ada, SIPI dan SIUP lewat masa berlaku
7	Kel.Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	Tanpa Nama (2 GT)	Hamzah	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Tidak ada dokumen izin, belum pernah dilakukan pengurusan dokumen

Lanjutan.....

No	Lokasi Patroli/Pemantauan Kapal	Nama/Identitas Kapal yang diawasi/dipantau	Nama Pelaku Usaha	Alat Tangkap	*Patuh atau Tidak Patuh (isi salah satu)	Keterangan (alasan tidak kepatuhan)
8	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	Tanpa Nama (4 GT)	Zulkarnain	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Tidak ada dokumen izin, belum pernah dilakukan pengurusan dokumen
9	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	KMN Bombana 01 (3 GT)	Sadri	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Pas kecil ada, SIPI dan SIUP lewat masa berlaku
10	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	KMN Bombana 02 (3 GT)	Sadri	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Pas kecil ada, SIPI dan SIUP lewat masa berlaku
11	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	Tanpa Nama (3 GT)	Suhartono	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Tidak ada dokumen izin, belum pernah dilakukan pengurusan dokumen
12	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	Tanpa Nama (3 GT)	Suardi	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Pas kecil ada, SIPI dan SIUP lewat masa berlaku
13	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	Tanpa Nama (3 GT)	Rustam	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Tidak ada dokumen izin, belum pernah dilakukan pengurusan dokumen
14	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	KMN Hikma Aulya	Aco	Pancing Tuna	Tidak Patuh	Tidak ada dokumen izin, belum pernah dilakukan pengurusan dokumen
15	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	Tanpa Nama (12 GT)	Rasman	Purse Seine	Tidak Patuh	SIPI dan SIUP lewat masa berlaku
16	Kel. Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	Tanpa Nama (9 GT)	Jusman/Dae ng Adi	Purse Seine	Tidak Patuh	SIPI dan SIUP lewat masa berlaku
Triwulan III 2025						
1	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Pulau Libukang (6 GT)	Drs. M. Asjar	Bagan Perahu	Patuh	SIKPI (24 Juni 2025 s/d 23 Juni 2026)
2	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	KMN Metro 001 (16 GT)	Harmiyati	Purse seine	Patuh	SIUP (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2030), SIPI (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2026)
3	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	KMN Metro 003 (17 GT)	Harmiyati	Purse seine	Patuh	SIUP (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2030), SIPI (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2026)
4	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	KMN Ratna (11 GT)	Iwan	Purse seine	Tidak Patuh	SIUP (22 Januari 2021 s/d 21 Januari 2026), SIPI (10 Juni 2022 s/d 9 Juni 2023)
5	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Mattuju 05 (6 GT)	Yandi	Bagan Perahu	Tidak Patuh	Belum memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI
6	PPI Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	KMN Aisyah A4 (26 GT)	Jumria	Purse seine	Patuh	SIUP (11 Juli 2025 s/d 10 Juli 2030), SIPI (14 Juli 2025 s/d 13 Juli 2026)
7	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Usaha Bersama Palopo (9 GT)	Robbi	Purse seine	Patuh	SIPI (11 Juli 2025 s/d 10 Juli 2026)
8	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Bunga Waru 01 (20 GT)	Nurfianti Alfian	Purse seine	Patuh	SIPI (18 Juli 2025 s/d 17 Juli 2026)
9	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN BWR 02 (19 GT)	Abd. Kadir	Purse seine	Patuh	SIPI (18 Juli 2025 s/d 17 Juli 2026)

Lanjutan.....

No	Lokasi Patroli/Pemantauan Kapal	Nama/Identitas Kapal yang diawasi/dipantau	Nama Pelaku Usaha	Alat Tangkap	*Patuh atau Tidak Patuh (isi salah satu)	Keterangan (alasan tidak kepatuhan)
10	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Indo Malomo (6 GT)	Hasyim Naim	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (17 Juli 2025 s/d 16 Juli 2026)
11	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN HS 77 02 (6 GT)	Hj. Hawang	Bagan Apung	Patuh	SIPI (21 Juli 2025 s/d 20 Juli 2026)
12	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN HS 77 03 (5 GT)	Hj. Hawang	Bagan Apung	Patuh	SIPI (22 Juli 2025 s/d 21 Juli 2026)
13	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Iqra 02 (6 GT)	Saenal	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (23 Juli 2025 s/d 22 Juli 2026)
14	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Iqra 03 (6 GT)	Saenal	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (22 Juli 2025 s/d 21 Juli 2026)
15	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Iqra (6 GT)	Saenal	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (22 Juli 2025 s/d 21 Juli 2026)
16	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Kaira (21 GT)	Hirdas	Purse seine	Patuh	SIPI (30 Juli 2025 s/d 29 Juli 2026)
17	Perairan Ulo Ulo, Kec.Belopa, Kab.Luwu	Tanpa Nama (6 GT)	Sudirman	Pancing	Tidak Patuh	Belum memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI
18	Perairan Ulo Ulo, Kec.Belopa, Kab.Luwu	KMN Galipso (6 GT)	Muliadi	Pancing	Tidak Patuh	Belum memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI
Triwulan IV 2025						
1	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Pulau Libukang (6 GT)	Drs. M. Asjar	Bagan Perahu	Patuh	SIKPI (24 Juni 2025 s/d 23 Juni 2026)
2	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Metro 001 (16 GT)	Harmiyati	Purse seine	Patuh	SIUP (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2030), SIPI (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2026)
3	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Metro 003 (17 GT)	Harmiyati	Purse seine	Patuh	SIUP (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2030), SIPI (25 Juni 2025 s/d 24 Juni 2026)
4	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Ratna (11 GT)	Iwan	Purse seine	Tidak Patuh	SIUP (22 Januari 2021 s/d 21 Januari 2026), SIPI (10 Juni 2022 s/d 9 Juni 2023)
5	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Mattuju 05 (6 GT)	Yandi	Bagan Perahu	Tidak Patuh	Belum memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI
6	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Aisyah A4 (26 GT)	Jumria	Purse seine	Patuh	SIUP (11 Juli 2025 s/d 10 Juli 2030), SIPI (14 Juli 2025 s/d 13 Juli 2026)
7	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Usaha Bersama Palopo (9 GT)	Robbi	Purse seine	Patuh	SIPI (11 Juli 2025 s/d 10 Juli 2026)
8	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Bunga Waru 01 (20 GT)	Nurfianti Alfian	Purse seine	Patuh	SIPI (18 Juli 2025 s/d 17 Juli 2026)
9	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN BWR 02 (19 GT)	Abd. Kadir	Purse seine	Patuh	SIPI (18 Juli 2025 s/d 17 Juli 2026)
10	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Indo Malomo (6 GT)	Hasyim Naim	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (17 Juli 2025 s/d 16 Juli 2026)
11	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN HS 77 02 (6 GT)	Hj. Hawang	Bagan Apung	Patuh	SIPI (21 Juli 2025 s/d 20 Juli 2026)
12	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN HS 77 03 (5 GT)	Hj. Hawang	Bagan Apung	Patuh	SIPI (22 Juli 2025 s/d 21 Juli 2026)

Lanjutan.....

No	Lokasi Patroli/Pemantauan Kapal	Nama/Identitas Kapal yang diawasi/dipantau	Nama Pelaku Usaha	Alat Tangkap	*Patuh atau Tidak Patuh (isi salah satu)	Keterangan (alasan tidak kepatuhan)
13	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Iqra 02 (6 GT)	Saenal	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (23 Juli 2025 s/d 22 Juli 2026)
14	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Iqra 03 (6 GT)	Saenal	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (22 Juli 2025 s/d 21 Juli 2026)
15	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Iqra (6 GT)	Saenal	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (22 Juli 2025 s/d 21 Juli 2026)
16	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Kaira (21 GT)	Hirdas	Purse seine	Patuh	SIPI (30 Juli 2025 s/d 29 Juli 2026)
17	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	Tanpa Nama (6 GT)	Sudirman	Pancing	Tidak Patuh	Belum memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI
18	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Galipso (6 GT)	Muliadi	Pancing	Tidak Patuh	Belum memiliki dokumen izin SIUP dan SIPI
19	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Al Kautsar 4 (6 GT)	Nusbahuddin	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (17 Okt 2025 s/d 16 Okt 2026), SIUP (17 Okt 2025 s/d 16 Okt 2030)
20	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Restu (6 GT)	M Sukri	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (16 Okt 2025 s/d 15 Okt 2026), SIUP (16 Okt 2025 s/s 15 Okt 2030)
21	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Tenri Sau 01 (21 GT)	Sappe Sukri	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (17 Okt 2025 s/d 16 Okt 2026), SIUP (17 Okt 2025 s/d 16 Okt 2030)
22	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Tirolawe 03 (6 GT)	H. Sudir	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (27 Okt 2025 s/d 26 Okt 2026), SIUP (27 Okt 2025 s/d 26 Okt 2030)
23	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Wali 17 (5 GT)	Rustam	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (28 Okt 2025 s/d 27 Okt 2026), SIUP (28 Okt 2025 s/d 27 Okt 2030)
24	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Kakap Merah (6 GT)	Fitriyah S.	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (6 Okt 2025 s/d 5 Okt 2026), SIUP (8 Des 2022 s/d 7 Des 2027)
25	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Armada Palopo (17 GT)	Hasim	Purse seine	Patuh	SIPI (9 Okt 2025 s/d 8 Okt 2026), SIUP (6 Juni 2024 s/d 5 Juni 2024)
26	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KN Pengorbanan (12 GT)	Jabbar Husain	Purse seine	Patuh	SIPI (10 Okt 2025 s/d 9 Okt 2026), SIUP (21 Des 2021 s/d 21 Des 2026)
27	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Rambo 02 (16 GT)	Jaswar Machir Usman	Purse seine	Patuh	SIPI (11 Okt 2025 s/d 10 Okt 2026), SIUP (21 Jan 2021 s/d 20 Jan 2026)
28	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN RR (5 GT)	Risal Rahmat	Bagan Perahu	Patuh	SIPI (17 Nov 2025 s/d 16 Nov 2026), SIUP (17 Nov 2025 s/d 16 Nov 2030)
29	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Arsy AR (24 GT)	Rika	Purse seine	Patuh	SIPI (24 Nov 2025 s/d 23 Nov 2026), SIUP (24 Nov 2025 s/d 23 Nov 2030)
30	PPI Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo	KMN Noval (11 GT)	Agus	Purse seine	Patuh	SIPI (4 Des 2025 s/d 3 Des 2026), SIUP (4 Des 2025 s/d 3 Nov 2030)

Sumber : Laporan Tahunan CDK Luwu Raya 2025

Lampiran 15. Data Produksi Pemanfaatan Kegiatan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Bibit (Kg)	Panen (Kg Basah)
1	Luwu Timur (14 Klp)			
		RAJAWALI	3,600.0	10,100.0
		SINAR KATONIK	3,000.0	4,240.0
		MASEDDI	3,000.0	4,080.0
		PUCUK KUNING	3,000.0	4,410.0
		JAYA MAKMUR	3,000.0	3,310.0
		SAMUDRA	3,000.0	6,290.0
		BUDIMAN COTTONII	3,900.0	6,590.0
		WECUDAI JAYA	3,000.0	8,740.0
		CITRA BAHARI	2,400.0	6,900.0
		BURAU PANTAI	2,400.0	9,700.0
		AMANAH	3,000.0	12,500.0
		MARIO RENNU	3,000.0	11,090.0
		KATONIK LAURO	3,000.0	5,670.0
		SINAR KEPITING	6,900.0	12,160.0
		Sub Total	46,200.0	105,780.0
2	Luwu Utara (7 Klp)			
		USAHA BERSAMA	6,900.0	11,450.0
		MUNTE PESISIR	3,300.0	9,500.0
		SIPATUO	3,600.0	10,200.0
		KATONIK 1	4,500.0	6,600.0
		KATONIK 2	4,500.0	8,350.0
		KATONIK 3	4,200.0	5,200.0
		KATONIK 4	4,200.0	9,370.0
		Sub Total	31,200.0	60,670.0
3	Luwu (16 Klp)			
		USAHA TANI	2,700.0	14,510.0
		LAMISUKO JAYA	4,200.0	23,880.0
		MATTAJENG	3,000.0	14,325.0
		SIPAKAMASE KATONIK	3,900.0	19,980.0
		TERUSANG KATONIK	3,000.0	15,600.0
		TIROWALI KATONIK	3,000.0	15,720.0
		KATONIK MEKAR	3,000.0	15,360.0
		CAHAYA KATONIK	3,000.0	14,760.0
		MARANNU LAPANDOSO	3,300.0	17,280.0
		PUTRA LABEMBE	3,000.0	16,500.0
		BINTANG KATONIK	3,600.0	20,820.0
		BINTANG TIMUR	3,000.0	17,160.0
		PASSAMPA KATONIK	3,000.0	15,720.0
		BAHARI KATONIK	3,000.0	14,160.0
		CIPUTRA KATONIK	3,000.0	14,040.0
		KATONIK BERSAMA	3,300.0	15,420.0
		Sub Total	38,400.0	199,415.0
4	Palopo (4 Klp)			
		TOPI ABANG	3,000.0	2,580.0
		BERKAH KATONIK	3,000.0	7,500.0
		MAKMUR SEJAHTERA	3,000.0	1,890.0
		BENTENG RAYA	3,000.0	5,691.0
		Sub Total	12,000.0	17,661.0

Lanjutan.....

No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Bibit (Kg)	Panen (Kg Basah)
5	Barru (3 Klp)			
		BIRA LAUT	3,300.0	12,700.0
		MUTIARA LAUT	3,600.0	18,000.0
		MAWAR JUPPAI	3,000.0	8,920.0
		Sub Total	9,900.0	39,620.0
6	Pinrang (13 Klp)			
		SIPAKARIO RIO	3,000.0	16,100.0
		IJO LUMUT	3,000.0	16,700.0
		MAPPASITUJUE	3,300.0	19,400.0
		SIPATUJUE	3,000.0	15,300.0
		MITRA LAUT	4,500.0	18,750.0
		MASSED DI ATI	3,000.0	19,500.0
		MACCOLLI LOLOE	3,000.0	21,050.0
		SIPATOKKONG	3,000.0	21,100.0
		TUNAS HARAPAN	3,300.0	20,050.0
		SIPAKARIO	3,000.0	17,050.0
		BIRU LAUT	3,000.0	18,950.0
		SIPURENNU	3,000.0	16,800.0
		MASAGENAE	3,000.0	12,750.0
		Sub Total	41,100.0	233,500.0
7	Takalar (16 Klp)			
		BAJI ARENG	3,000.0	3,710.0
		PESISIR INDAH	3,000.0	4,000.0
		UJUNG PANDALA	3,000.0	3,790.0
		BUNGUNG LOMPOA	3,000.0	3,800.0
		ONGKOA MAJU	3,300.0	3,930.0
		SEJAHTERA BERSAMA	3,000.0	4,100.0
		PATTOPAKANG CITY	3,000.0	3,400.0
		SENTOSA	3,000.0	4,080.0
		PANTAI POKKO	4,500.0	5,100.0
		BONTO SALAMA	2,700.0	4,160.0
		SIPAKALABIRI	6,000.0	10,610.0
		ABADI	3,000.0	4,360.0
		PARANNUANGKU	3,000.0	5,180.0
		PERBATASAN	3,000.0	3,650.0
		MINASA BAJI	3,600.0	4,060.0
		MANDIRI BERSAMA	3,300.0	3,620.0
		Sub Total	53,400.0	71,550.0
8	Pangkep (16 Klp)			
		AZZIDIK	3,000.0	8,050.0
		RESTU	3,000.0	8,300.0
		ALIF JAYA	3,000.0	8,900.0
		MADDEPPUNGANGGE	3,000.0	6,950.0
		CEMPAE	3,000.0	7,350.0
		SITUJU TUJUE	5,100.0	13,750.0
		TUNAS PESISIR	4,200.0	10,500.0
		BOSEL PESISIR	3,000.0	7,400.0
		LAUT BIRU	4,800.0	13,100.0
		MELATI BIRINGKASSI	3,000.0	8,400.0
		CAHAYA JOLLO	2,400.0	6,900.0
		PADANG PADANGE	3,000.0	8,700.0

Lanjutan.....

No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Bibit (Kg)	Panen (Kg Basah)
		CAHAYA BINTANG LAUT	3,000.0	8,750.0
		RANGGA LAWE	3,000.0	8,550.0
		HIDUP BERSAMA	6,000.0	20,600.0
		LAUT BIRU	6,000.0	21,000.0
Sub Total			58,500.0	167,200.0
9	Sinjai (15 Klp)			
		KESSILAMPE 2	3,000.0	31,200.0
		MUTIARA PUTIH	3,000.0	30,900.0
		PALLAHANGENGE	3,000.0	31,400.0
		PADAELO TIGA	3,000.0	31,500.0
		BUHUNG PABELLE	3,000.0	31,500.0
		KUDA LAUT	3,000.0	31,600.0
		BATU PAYUNG	3,000.0	30,700.0
		SARO MASE	3,000.0	30,300.0
		BUNGA LAUT	3,000.0	30,951.0
		HARAPAN BARU	3,000.0	28,476.0
		KAMBUNO C	3,000.0	30,987.0
		KAMBUNO EMPAT	3,000.0	30,942.0
		KATONIK	3,000.0	28,350.0
		PANTAI SELATAN	3,000.0	31,131.0
		POHON BERINGIN	3,000.0	30,294.0
Sub Total			45,000.0	460,231.0
10	Jeneponto (13 Klp)			
		SAMATURU	3,000.0	18,600.0
		MELATI	3,000.0	11,360.0
		BAJI GAU	3,000.0	19,100.0
		CAHAYA KEMANG	3,000.0	14,700.0
		HATI GEMBIRA	3,000.0	9,640.0
		PANTAI PAO	3,000.0	17,300.0
		SINAR KALOKO	3,000.0	16,900.0
		TANRUSAMPE 45	3,000.0	16,635.0
		BONTO RAYA	3,000.0	15,140.0
		PANTAI TANRUSAMPE	3,000.0	15,010.0
		BERKAH	3,000.0	15,785.0
		BORONGTALA INDAH	3,000.0	18,830.0
		SUMBER MAJU	3,000.0	20,470.0
Sub Total			39,000.0	209,470.0
11	Bantaeng (9 Klp)			
		SINAR UJUNG	3,000.0	4,440.0
		PARAIKATTE SIKAPACCEI	3,000.0	4,230.0
		APPATUJU	3,000.0	4,085.0
		MUTIARA LAUT	2,700.0	3,840.0
		MUTIARA LAUT(LAMALAKA)	3,300.0	4,835.0
		KAMPONG BERU JAYA	3,300.0	4,185.0
		BIOTA LAUT	3,000.0	4,340.0
		MATAHARI LAUT	3,600.0	5,045.0
		PERMATA LAUT	3,600.0	5,060.0
Sub Total			28,500.0	40,060.0
12	Wajo (10 Klp)			
		MALOMOE	3,900.0	6,453.0
		SABAR MENANTI	3,000.0	8,000.0

				Lanjutan.....
No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Bibit (Kg)	Panen (Kg Basah)
		SALOMPARE	3,000.0	7,900.0
		LEBONGNGE	3,000.0	8,100.0
		MASAGENA	3,000.0	4,350.0
		MAPPADAELO	3,600.0	8,500.0
		MALLUSE TASI	4,500.0	5,300.0
		CAHAYA LABULENG	3,300.0	9,695.0
		SIPATUO	4,500.0	9,205.0
		MAPPEDCENG	3,300.0	9,700.0
Sub Total			35,100.0	77,203.0
13	Bone (11 Klp)			
		PAMMASE	3,600.0	2,000.0
		KARANG WARING	3,000.0	4,100.0
		SAROMASE	3,600.0	4,290.0
		TANJUNG HARAPAN	2,700.0	7,950.0
		TAJENG PAMMASE	3,000.0	2,450.0
		BARA BATUE	3,600.0	9,450.0
		RESKI UTAMA	3,000.0	7,200.0
		CINTA MADINA	3,000.0	6,000.0
		BINTANG TIMUR	3,000.0	6,615.0
		TOKILLA	3,000.0	5,980.0
		BULU MABBALAE	3,600.0	5,650.0
Sub Total			35,100.0	61,685.0
TOTAL			473,400.0	1,744,045.0

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Budidaya dan daya Saing 2025

* Sisa 2 Kab yang blm memasukkam data produksi

Lampiran 16. Daftar Unit Pengolahan Ikan/ Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
1	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N. 4-B1 Makassar	Frozen cooked shrimp, Frozen Breaded shrimp, Frozen Raw Shrimp
2	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. Kima Raya I Kav. D-1b, Makassar	Frozen Shrimp Frozen cooked shrimp
3	CV. Bone Agung Mina Persada	Jl. Wiyatamandala Kel. Lonrae Timur	Frozen Shrimp, Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopods
4	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima raya I Blok D-2B	Frozen cooked shrimp, Frozen Raw Shrimp, Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods, Frozen Tuna (loin, steak), Frozen Farm Raised Fish (lele) Dried Flying Fish Roe
5	PT. South Suco	Jl. Kima VI Blok G/IV B	Frozen Shrimp
6	PT. Wahyu Pradana BM	Jl. Kima raya I Blok D No. 2C	Frozen shrimp Dried flying fish roe Frozen Demersal Fish, Frozen Chephalopods, Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cookedshrimp

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
7	CV. Prima Indo Tuna	Jl. Ir. Sutami No. 32	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen Demersal Fish
8	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59	Frozen Pelagic Fish, Frozen Slipper Lobster, Frozen Octopus, Frozen Fish Fillet
9	PT. Perikanan Nusantara	Jl. Sabutung 1 No.1.	Frz Demersal & Pelagic Fish Frozen Cephalopods
10	PT. Prima Bahari Inti lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C	Fresh tuna, Frozen Tuna, Fresh cephalopods, Frozen Cephalopods Fresh fillet fish, Frozen Cephalopods Fresh fish, Frozen Demersal Fish Frozen Boneless Milkfish
11	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K. 9/B2 Jl.Kima 4 Kav.P-28,Makassar	Fresh tuna, Frozen tuna, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal Segar
12	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamellang No. 42 kel. Bojo baru Kec. Mallusetasin Kab. Barru	Chilled pasteurized crab meet Frozen Paste urized crabmeat Can Frozen demersal fish,Ikan Scombroid Beku
13	CV.Ome tradingcoy	Jl. Poros kanjilo gowa	Hana katsuo bushi
14	PT. Donglim Jireh	Komp kima square blok B. 1-2,	Dried Flying Fish Roe
15	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4b	Dried flying fish roe, Frozen Shrimp FrzCephalopods, Teripang krg
16	PT. Kawa Gutti	Jl. Tol lama no.22	Frozen flying fish roe (Dried Flying Fish Roe)
17	PT. Omeresso food	Jl. Poros Kanjilo, Barombong Gowa	Katsuo Powder Hana Katsuo
18	CV. Makassar jaya	Jl. Batara bira 6 Komp. PU No. 13	Dried sea cucumber
19	PT. Multi Sari Makassar	Jl. Kima 14 Kav. SS 12	Fresh Demersal Fish,Frozen Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen, Pelagic Fish Frozen cephalopods, Fresh cephalopods, Frozen Tuna, Fresh Tuna Frozen Shrimp, Fresh Shrimp
20	PT. Parlevliet Paraba	Jln. Jembatan Tua No.89 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros	Fresh Tuna &Frozen Tuna Fresh Pelagic, & Frz. Pelagic Fresh & Frz. Demersal Fish Fresh Cephalopods
21	PT. Kemilau Bintang timur	Jl. Kima 3 Kav. 2A	Frozen Crabmeat Frozen Pasteurized crabmeat Frozen Raw shrimp, Frozen cephalopods, Fresh Pelagis Fish, Frozen Pelagis Fish, Fresh Demersal fish, Frozen Demersal fish, Fresh Farm Raised Fish, Frozen Farm Raised Fish
22	CV. Usaha Centra Jaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No.31	Frozen octopus, frozen tuna & fresh Tuna Fresh demersal fish, Frozen Demersal Fish, Fresh Milk Fish
23	UD Resky Bahari	Jl. Perintis kemerdekaan km. 19	Fresh Demersal Fish,Fresh Pelagic Fish

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
24	CV. Jaya Indah Cemerlang	Jl. Buru No. 47	Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish Dried Shark Fin, Sea Cucumber
25	PT. Global Seafood International Indonesia	Jl. Poros Bantaeng, Bulukumba Km. 131 Ds. Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng	Frozen Surimi
26	PT. Ocean Cham Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2	Pateurized Canned Crab meat
27	PT. Kelola Mina laut	Jl. Kima 17 Blok DD-15-16, Makassar	Frozen demersal fish, Frozen pelagic fish , Frozen cephalopods
28	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Ruko No. 5	Produk kering (Dried Sea Cucumber, sirip Ikan, Perut Ikan, abalone dan rumput laut)
29	CV. Hokky Seafood	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 17	Live Crab, Fresh Tuna Fresh Demersal & Pelagic Fish
30	CV. Anugerah Sejati	Jl. Metro Tanjung Bunga A.33 Ruko Somba Opu	Dried Flying Fish Roe
31	CV. Udin Jaya	Jl. Komp Perumahan Nusa Indah mas	Frozen pelagic Fish , Live fish
32	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrae No. 1, Bulu-Bulu Kec. Marusu Kab. Maros	Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish Fresh shrimp, Live Fish
33	PT. Anugerah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu runcing No. 99	Fresh & Frozen Tuna
34	PT. Nusa Dwipa Citra Tunggal	Jl. Kima VII Blok J. N. 4	Frozen Fish
35	PT. Wahyu Putra BimaSakti	Jl. Kima 10 T-2B Makassar	Carrageenan Chip
36	UD. Atops	Jl. Bahagia No. 2	Dried flying Fis Roe
37	CV. Inti Makmur	Jl. Kima 6 Blok F1/A2	Fresh & Frozen Tuna, Fresh & Frozen demersal Fish, Frozen Cephalopods Fresh & Frozen Shrimp
38	PT. Mitra Sejahtera Makassar	Jl. Ir. Sutami Blok G2 No.11	Rumput Laut
39	UD. Delton	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Blok C No. 11 Makassar SulSel	Rumput laut Kering
40	CV. Sentosa Bimantara Laut	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Sulawesi Blok C No. 10 makassar SulSel	Rumput laut Kering
41	PT. Giwang Citra Laut	Poros Pabrik Gula Takalar Km 1,5 Ds.Pa'rappunganta,polombangkeng Utara.Kab. Talakar	carrageenan Chips , Semi Refined Carrageenan
42	Koperasi Agroniaga	JL. BAKAU NO. 66, KOTA PALOPO	Dried Seaweed
43	PT. Sumberguna Makassar Nusa	Jl. Ujung Pandang Baru No.17 Makassar	Dried Seaweed
44	PT. Rapid Niaga International	Jl. Ir. Sutami Blok L,5, Makassar	Dried Seaweed

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
45	CV. Putri Jaya	Kawasan Pergudangan Parang Loe Indah	Dried Seaweed
46	CV. Adi Tirta	Jl. Sabutung No. 123 Makassar	Dried Seaweed
47	CV. Benur Rahma	Jl. Tala-Tala Ds. Pattinong, Kec. Galesong Takalar. (0411) 82326564	Dried Flying fish roe
48	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima 4 Kav.P3A, Makassar	Dried Seaweed
49	UD. Centralindo Agar Utama	Gudang Parangloe Indah Blok E No. 10 Makassar Telp.(0411) 5774648,	Dried Seaweed
50	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A.Mks	Dried Seaweed
51	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Pemuda Pantai Salu Songka Kec. Wara Timur, Kota Palopo.	Dried Seaweed
52	CV. Pelita	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A Mks	Dried Seaweed
53	UD. Baharu	Komplek Pergudangan lantebung Jl.Ir. Sutami Blok A.12 No.5 Makassar	Dried Seaweed
54	CV. Agro Mina Dewata	Jl. Sungai Saddang Baru No.9A, Makassar	Fresh Demersal Fish
55	PT. Bantimurung Indah	Jl. Sam Ratulangi No. 163, Maros.	carrageenan Chips , Semi Refined Carrageenan
56	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima VIII Kav. SS No.23A Kima, Makassar	Frozen Tuna
57	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima 3 Kav.5 Makassar	Daging Rajungan Kaleng Past
58	PT. Mitra Timur Nusantara	JL. Sultan Abdullah Raya Lrg.3 No. 9 Makassar, Fax (0411) 428228	Ikan Demersal Beku ,Ikan Pelagis Beku Cephalopoda Beku , Tuna Beku
59	PT. Mina Timur Indonesia	JLABD.Kudus barombong kec. Tamalate, Makassar. Telp (0411) 2122637	Telur ikan terbang kering.
60	PT. Sentosa Sumber galesong	Komps.Graha Satelit Blok A/20 Jl. Sultan Hasanuddin , Sungguminasa Gowa, Makassar.	Telur ikan terbang kering
61	PT. Sinar Laut Nusantara	Ds Cikoang,DesaLakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Fresh Demersal Fish, Frozen Demersal Fish, Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish, Fresh Cephalopods, Frozen Cephalopods Fresh & Frozen Lobster Fresh & Frozen Slipper Lobster, Fresh Milkfish, Fresh Shrimp
62	PT. Tujuh Samudera Jaya	Jl. Malino Ds. Nirannuang, kec Bontomarannu, Gowa	Frozen Flying Fish Roe
63	PT. Asia Sejahtera Mina	Jl. Ir. Sutami Kawasan Terpadu Logistik Blok A-1 Makassar	Dried Seaweed
64	UKM "88 Marijo"	Jl. Poros Pinrang-Pare,Kel.Manarang (bulu) Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Boneless Milkfish
65	PT. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2-10, Makassar	Dried Seaweed
66	CV. Eltisyah	Jl. Monumen Emmy Zaelan III Komplek BTN Agraria blok q9/24,Makassar	Fish JELLY Product
67	PT. Karya Jaya Mandiri	Jl. Prof.Ir. Sutami no.15A, Makassar	Dried Seaweed
68	PT. Goh Fadel Buana	Jl. Poros Makassar-Maros no. 126 Ballu-Ballu Kel. Taroada, Kec. Turikale, Makassar	Fresh Pelagic Fish, Frozen Pelagic Fish, fresh Demersal Fish,frozen Demersal Fish, Frozen Fish Fillet
69	PT. Lintas Antar Nusa	Jl. Poros Kupa , Kec. Mallusetasi, Barru	Ikan Terbang beku
70	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng batu-Batu, Galesong Utara, Kab. Takalar	Frozen Dried Flying fish roe

Lanjutan.....

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
71	PT. Anugerah Gemilang succes sedayu	Jl.Poros Macoppa Maros Km.26. No.44 Kab.Maros	Dried Seaweed
72	PT. Galesong	Jl. Baso Dg. BellaDesa Kalukuang Galesong Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
73	PT. Prima Global Sukses	Jl. Prof.Dr.Ir.SutamiNo.32A	Ikan Demersal Segar, Ikan Demersal beku, Fresh Tuna, Frozen Tuna Cephalopoda Beku
74	PT. Boddia Jaya	Jl.Karaeng Salamaka, Dusun Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
75	UD. Generasi Baru	Jl. Andi Malla Poros pattiwo Bajo. Kel. Biru kec. Tanete Riattang, Bone sulse	Bandeng asap Bandeng duri lunak & tanpa duri
76	PT.Jireh Commodity	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square warehouse 2 No.11,12,13, Makassar	Dried Flying fish roe Frozen Flying fish roe Teripang Kering, Teripang Beku
77	PT. Agarindo	Kab. Bone	Rumput Laut Kering
78	CV. Persada Semesta	Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Rumput Laut Kering